

**PERUBAHAN PERILAKU SOSIAL KEAGAMAAN
UMAT MUSLIM DI TENGAH GERAKAN
MAINSTREAMING GENDER
Studi di Kalangan Profesional Kota Medan**

Oleh:

**DR. NURASIAH, MA
DR. NEFI DAMAYANTI M.Psi
DRA. Hj. RUSMINI M.A**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN
TINGGI ISLAM**

2014

**PERUBAHAN PRILAKU SOSIAL KEAGAMAAN
UMAT MUSLIM DI TENGAH GERAKAN
MAINSTREAMING GENDER
Studi di Kalangan Profesional Kota Medan**

Oleh:

**DR. NURASIAH, MA
DR. NEFI DAMAYANTI M.Psi
DRA. Hj. RUSMINI M.A**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN
TINGGI ISLAM
2014**

KATA PENGANTAR

Puji dan sukur kami kepada Allah SWT, sholawat dan salaman atas Rasulullah. Semua karena cinta Allah dan RasulNya semua aktivitas dapat terlaksana termasuk penyelesaian penelitian yang berwujud Mengajar Dengan hati (Program *Capacity Building* Konsep pembelajaran dengan Hati Bagi Duru-guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Tanjung Pura, Langkat).

Proses pelaksanaan penelitian ini merupakan kegiatan yang didukung oleh Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Kementerian Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan Penelitian *Participatory Action Research* (PAR) yang dilakukan untuk pemberdayaan sekolah-sekolah madrasah.

Penyelesaian penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam membantu terlaksananya penelitian ini hingga akhir penyusunan laporan. Ucapan terimakasih kepada kepala sekolah MAN 1 Tanjung Pura beserta guru-guru dan para siswa sebagai *target beneficiary*, guru-guru madrasah Ibtidayiah, Tsanawiyah dan Aliyah se-Kecamatan Tanjung Pura yang turut berpartisipasi aktif dalam rangkaian penelitian dan pendampingan yang dilakukan. Ucapan terimakasih juga tertuju kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian ini, tanpa kami dapat menyebutkannya satu persatu.

Peneliti menyadari dan yakin bahwa penelitian ini bukanlah sebuah karya yang sempurna. Oleh karena itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan penelitian ini, sehingga memberi manfaat kepada para pembaca dan kontribusi bagi masyarakat secara umum.

Medan, 25 Oktober 2014

Ketua Peneliti,

Muhammda Iqbal Irham, MA

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK.....	iv
BAB I: PENDAHULUAN	144
A. Justifikasi Masalah Penelitian.....	1
B. Rumusan Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikansi Penelitian	9
E. Kerangka Teori	10
F. Pembatasan Istilah	42
G. Metodologi Penelitian.....	44
BAB II : KAJIAN TEORITIS	49
A. Permasalahan Jender Dalam Prilaku Sosial Budaya Masyarakat Muslim	49
B. Permasalahan Keadilan Jender Dalam Norma Islam	69
BAB III : TEMUAN PENELITIAN.....	95
A. Tabel 1 : Rangkuman Kecenderungan prilaku pada lima profesi.....	95
B. Tabel 2-6 : Mayoritas Prilaku Pada Masing- Masing Profesi	103
C. Penjelasan Data per-Profesi	111
D. Data tentang Dalil-Dalil dan Alasan Keagamaan Pada Masing-Masing Indikator	123
BAB IV : ANALISIS DAN KESIMPULAN	128
A. Istri Bekerja/Keluar Rumah Mencari Penghasilan	128
B. Harus Memiliki Anak Laki-Laki	132
C. Mengutamakan Pendidikan Untuk Anak Laki-Laki	132
D. Suami Pengambil Keputusan Dalam Keluarga .	132

DAFTAR ISI

E. Harta Gono-Gini	133
F. Kepemimpinan Perempuan.....	136
G. Poligami.....	139
H. Upah Pekerja Laki-Laki Lebih Tinggi dari Perempuan	142
I. Keadilan Hukum Berwawasan Jender	143
J. Kecantikan dan Ketampanan Modal Sukses.....	143
K. Atribut Nama Suami	144
L. Warisan Anak Laki-Laki 2 x Lipat Bagian Anak Perempuan.....	144
M. Melaporkan Kekerasan dalam Rumah Tangga..	151

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa telah terjadi penerimaan ide-ide jender dalam masyarakat setelah masa satu dekade lebih program mainstreaming jender oleh pemerintah. Sebagai pengaruhnya telah terjadi pula perubahan prilaku sosial keagamaan terkait relasi jender dalam masyarakat. Kenyataan ini mengkondisikan adanya pemahaman ulang terhadap ajaran-ajaran agama tradisional sebelumnya sebab agama ditemukan menjadi salah satu alasan bagi prilaku diskriminasi jender.

Dengan hipotesis tersebut, penelitian ini ingin mencari jawaban apa prilaku sosial keagamaan sensitif jender yang telah menyebar dalam masyarakat ? Lalu, bagaimana pemahaman-pemahaman ulang ajaran agama yang telah diaplikasikan masyarakat untuk melegitimasi prilaku mereka tersebut ? Dengan redaksi lain, penelitian ini terdorong untuk mengeksplorasi bagaimana perubahan prilaku sosial keagamaan terkait relasi jender yang terjadi dalam masyarakat di tengah fenomena perubahan sosial penyebaran ide-ide jender yang mengglobal, dikhususkan lagi dengan program mainstreaming jender oleh pemerintah ?

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data yang menggunakan angket dan wawancara terstruktur. Paradigma kualitatif berbeda dari segi pencariannya yang bersifat kontekstualisasi, interpretasi, dan memahami perspektif subjek penelitian.

Penelitian ini menemukan bahwa benar telah terjadi pergeseran nilai, pandangan, sikap sampai perubahan prilaku ke arah yang lebih sensitif jender dalam berbagai bidang dan konteks kehidupan, yaitu konteks kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Dengan tinjauan kecenderungan dan penilaian mayoritas pada masing-masing indikator terlihat bahwa prilaku setara jender telah mendominasi di hampir semua bidang dan konteks relasi jender. Pada masyarakat profesi telah terdapat perubahan prilaku ke arah sensitif jender dalam berbagai masalah yang direpresentasikan pada 13 indikator relasi jender. Akan tetapi, dari tinjauan keseluruhan tanpa melihat profesi dan persentase per unit, sebenarnya perubahan prilaku sensitif jender tersebut masih minor dan belum mendominasi. Artinya, dinilai secara keseluruhan ketersebaran prilaku 'non sensitif jender'

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana telah terjadi perubahan ide-ide jender dalam masyarakat setelah masa satu dekade lebih program mainstreaming jender oleh pemerintah. Sebagai pengantar telah terjadi pada perubahan perilaku sosial masyarakat terkait relasi jender dalam masyarakat. Kenyataan ini menunjukkan adanya pemahaman yang berbeda-beda mengenai agama tradisional sebelumnya sebagai agama dominan menjadi salah satu elemen bagi perilaku diskriminasi jender.

Dengan hipotesis tersebut penelitian ini ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan sosial keagamaan sensitif jender yang telah muncul dalam masyarakat? Lalu, bagaimana pemahaman-pemahaman yang agama yang telah diadopsikan masyarakat untuk menginterpretasikan perilaku mereka terkait? Dengan metode ini penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana perubahan perilaku sosial keagamaan terkait relasi jender yang terjadi dalam masyarakat di tingkat keluarga, komunitas sosial, dan masyarakat jender yang terdampak, diteliti dengan menggunakan program mainstreaming jender oleh pemerintah?

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif dengan data yang menggunakan survei dan wawancara terstruktur. Pendekatan kualitatif berbeda dari kuantitatif yang bersifat kontekstual, interpretasi, dan naratif, kualitatif lebih banyak penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dengan nilai, pandangan, sikap, sikap, perilaku, dan sikap yang lebih sensitif jender dalam berbagai bidang dan konteks kehidupan, yaitu konteks kehidupan beragama, pemerintahan, dan lainnya. Dengan tujuan penelitian dan penelitian terapan, pada masing-masing indikator perilaku bahwa perilaku jender telah mendominasi di hampir semua bidang dan konteks relasi jender. Pada masyarakat protein telah terdapat perubahan perilaku ke arah sensitif jender dalam berbagai aspek yang diungkapkan pada 13 indikator relasi jender. Akan tetapi, dari uraian penelitian perilaku melalui proses dan persentase per unit, beberapa perubahan perilaku sensitif jender tersebut masih minor dan belum mendominasi. Artinya, dinilai secara keseluruhan kesadaran perilaku 'non sensitif jender'

masih luas dan mencolok dalam masyarakat. Hal lainnya, ketersebaran perilaku 'non sensitif jender' ini justru terdapat dalam konteks dan interaksi kehidupan yang sangat krusial yaitu konteks kehidupan keluarga.

Temuan ini tentunya memberikan kesimpulan bahwa efektifitas program kesetaraan jender masih rendah dan sosialisasi program-programnya belum maksimal. Hal lainnya, penelitian ini mengkonfirmasi pengaruh pemahaman agama terhadap perilaku relasi jender responden. Karena itu, penelitian ini menyarankan bahwa pelaksanaan dan sosialisasi program-program jender oleh pemerintah secara mutlak harus mengikutsertakan kelompok-kelompok pemuka agama yang telah mengalami transformasi wawasan jender.

perubahan sosial dan pembangunan. Khususnya belum diteliti secara mendalam, setidaknya ide-ide jender mulai mengayakkan tembok kokoh pandangan 'patriarkis'. Kenyataan ini disimpulkan oleh para ahli dengan berbagai redaksi, misalnya pernyataan Urmah King bahwa ini jender merupakan isu yang benar-benar penting dalam masyarakat saat ini. Dikatakan juga bahwa jender sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Di berbagai tempat, jender mulai telah memasuki berbagai bidang masyarakat. Dalam bidang politik, perempuan telah mulai menduduki berbagai jabatan penting. Dalam bidang kesehatan, kondisi perempuan mengalami peningkatan yang luar biasa. Pada bidang ekonomi, kesempatan kerja untuk kaum perempuan pun meluas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Justifikasi Masalah Penelitian

Pandangan tentang keadilan jender telah menyentuh, tepatnya menyerbu, seluruh belahan dunia serta ke berbagai suku, ras, budaya dan agama. Isu tentang jender telah menjadi bahasan analisis sosial, menjadi pokok bahasan dalam wacana perdebatan mengenai perubahan sosial dan pembangunan. Kalaupun belum diterima sepenuhnya, setidaknya ide-ide jender mulai menggoyahkan tembok kokoh pandangan 'patriarkis'. Kenyataan ini dikemukakan oleh para ahli dengan berbagai redaksi, misalnya pernyataan Ursula King bahwa isu jender merupakan isu yang benar-benar penting dalam masyarakat dunia dari berbagai budaya sekarang ini. Dikatakannya juga bahwa studi jender sangat mempengaruhi dan mentransformasi berbagai disiplin ilmu di perguruan tinggi.¹

Di beberapa tempat, gerakan jender malah telah memperlihatkan hasil gemilangnya. Dalam bidang politik, perempuan telah memiliki hak untuk memilih bahkan dipilih. Dalam bidang pendidikan, prestasi perempuan juga mengalami kemajuan yang signifikan dibanding laki-laki. Di bidang kesehatan, kondisi perempuan mengalami perbaikan yang luar biasa. Pada bidang ekonomi, kesempatan kerja untuk kaum perempuan pun meluas

¹ Ursula King (ed.), *Religion and Gender* (Cambridge: Blackwell, 1995), misalnya hal. v, 1.

karena dianggap produktif. Sedikitnya, atau malah pencapaian terbesarnya, gerakan jender telah membawa isu perempuan menjadi isu global. Kini, banyak organisasi internasional dan negara merdeka mempunyai program untuk perempuan dan memiliki divisi/kementerian sendiri yang mengurus urusan perempuan. Hal ini tidak untuk menafikan kendala yang terus menghadang sepanjang jalan penyebaran pemikiran ini.

Negara Indonesia termasuk salah satu negara yang terbuka dan cepat merespons isu internasional terkait perempuan dan gerakan feminisme tersebut. Bahkan, ada yang menyebutkan gerakan feminisme telah masuk ke Indonesia sejak tahun 1960-an. Walaupun, sampai masa tahun 1975-1985 pemikiran jender belum populer. Pemikiran jender baru menjadi perbincangan, atau memasuki tahap pengenalan dan pemahaman dasar—tentang pengertian analisis jender dan mengapa isu jender menjadi masalah pembangunan—yaitu pada masa tahun 1985-1995. Pada masa-masa ini, jender sebagai suatu teori, perspektif dan ideologi mendapat tantangan dan menghadapi gejolak penolakan yang marak dari pemikiran dan tafsiran keagamaan yang patriarki. Juga, tantangan gerakan kilas balik dari aktivis laki-laki maupun perempuan sendiri yang ingin mempertahankan nilai-nilai tradisional. Tetapi masa berikutnya, ide jender sudah memasyarakat dan tidak bisa lagi dipisahkan dari perbincangan dalam semua aspek kehidupan. Pemerintah Indonesia sendiri secara sistematis telah mencanangkan sosialisasi dan implementasi ide-ide jender tersebut melalui program Pengarus-Utamaan Gender (PUG).

PUG adalah suatu program mencapai kesetaraan dan keadilan Jender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang pembangunan. Program PUG akan diimplementasikan melalui dua strategi teknis, yaitu pertama; mengintegrasikan program kesetaraan jender ke dalam seluruh kebijakan dan kerja organisasi-organisasi pemerintah, kedua; strategi Advokasi.

Penyebaran dan penyerapan ide-ide dan gagasan baru, termasuk ide-ide jender di Indonesia, dalam teori proses sosial, adalah salah satu faktor yang menggiring kepada perubahan sosial. Kalau Karl Marx merumuskan perubahan sosial dan budaya sebagai produk dari sebuah produksi materialisme, Max Weber (1864 – 1920) menonjolkan sebab perubahan pada sistem gagasan, sistem pengetahuan dan sistem kepercayaan. Menurut Weber, sebelum terjadinya perubahan teknologi dalam masyarakat terlebih dahulu terjadi perubahan gagasan baru dalam pola pemikiran masyarakat. Dalam hal ini Weber memfokuskan Etika Protestan sebagai pendorong berkembangnya semangat kapitalisme yang akhirnya memunculkan teknologi. Tesis Weber adalah agamalah yang berjasa melahirkan perubahan sosial yang paling spektakuler dalam sejarah peradaban manusia. Nilai gagasan dimaksud akhirnya menjadi

kekuatan dominan dari suatu kelompok masyarakat, yang dapat membedakan keberadaannya dengan masyarakat lain.²

Keterangan lainnya yang terus direproduksi tentang perubahan sosial adalah bahwa faktor perubahan sosial dapat dilihat dari segi internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari dinamika penduduk, penemuan baru (*discovery* dan *inventory*), pertentangan dalam masyarakat, dan revolusi. Penemuan-penemuan baru atau *Discovery* tersebut bisa berbentuk ide, gagasan dan nilai yang diciptakan dan diterima individu dan bisa juga dalam bentuk instrumen materil. Penemuan baru (*discovery*) selanjutnya disebut sebagai *invention* bila telah diterima luas, diakui dan diterapkan oleh masyarakat.³ Begitulah halnya dengan kebijakan pemerintah menerima dan mengarus-utamakan perspektif dan ide-ide jender akan menciptakan suatu perubahan dan fenomena sosial baru dalam masyarakat Indonesia.

Akan tetapi, untuk sampai kepada suatu perubahan sosial di mana suatu perilaku sosial tertentu telah tercipta, gagasan dan nilai-nilai baru ini akan berhadapan dan bergesekan dengan nilai-nilai, pemahaman dan ideologi yang dianut sebelumnya. Dalam kasus pemikiran dan gagasan jender, penyebaran dan penerimaannya dalam masyarakat Indonesia bergesekan dan berbenturan dengan pemahaman agama dan juga budaya yang telah mentradisi. Bahwa agama selalu dipakai sebagai basis resistensi terhadap ide-ide jender adalah merupakan fakta yang dijumpai dalam seluruh agama dan

²Dalam makalah yang diposting oleh Irineriskyana, (Irineriskyana/Blog.fisif.uns.ac.id/2011/01/01/perubahan sosial)

³Dalton dkk, *Community Psychology* (Australia : Wadsworth, 2001), hal. 80

tempat di dunia. Berbagai penelitian jender telah mengklaim bahwa teks-teks keagamaan mengandung dalil-dalil yang melegitimasi bias jender dan memperkuat struktur patriarki. Sementara bagi pemeluk agama sendiri, kesimpulan digiring untuk menyatakan bahwa yang terjadi sebenarnya adalah bias pemahaman dan bukan bias pada nas-nas normatif agama itu sendiri.⁴ Dalam hal ini, para penafsir keagamaan dipengaruhi oleh budaya patriarki yang melingkungi mereka. Pada agama Islam, para penafsir awal teks-teks Islam yang nyatanya seluruhnya adalah laki-laki jelas dipengaruhi oleh budaya lokal Arab yang sangat patriarkis. Karena itu, Amina Wadud mendesak kehadiran penafsir perempuan terutama untuk menafsirkan kembali ayat-ayat yang terkait dengan perempuan agar penafsiran tersebut didasarkan pada persepsi, pengalaman dan pemikiran mereka sendiri.

Selain Amina Wadud, sejumlah nama dari kalangan internal Muslim telah dikenal luas karena menggugat penafsiran bias jender yang terdapat dalam teks-teks keagamaan Islam. Misalnya Fatima Mernissi, Riffat Hassan, Nawal el Sadawi, Asghar Ali Engineer, dan lainnya. Mereka ini menggugat kecenderungan misoginis pada teks-teks tafsiran Islam, dan membongkar berbagai pengetahuan normatif

⁴ Keragaman biologis yang menciptakan peran dikotomis gender dianggap konstruksi budaya, sosialisasi kapitalisme, atau nilai patriarkat. Akan tetapi, menurut para feminis Marxis dan sosialis institusi yang paling eksis dalam melanggengkan peran gender adalah keluarga dan agama, sehingga usaha untuk menciptakan *perfect equality* (kesetaraan gender 50/50) adalah dengan menghilangkan peran biologis gender, yaitu dengan usaha radikal mengubah pola pikir dan struktur keluarga dan agama yang menciptakannya. Lihat dalam Ratna Megawangi, -----, 1999, hal. 91

yang bias kepentingan laki-laki dalam orientasi kehidupan beragama, terutama terkait dengan relasi gender. Jauh sebelum mereka, sebenarnya telah muncul tokoh-tokoh pembaharu Muslim yang juga menggugat paradigma dan orientasi penafsiran ulama-ulama awal yang memunculkan bias-bias dan penyimpangan dalam praktiknya, di antaranya M. Abduh dengan instrumen penafsirannya yang terkristal dalam jargon “kembali kepada Alqur’an dan Hadis.”

Dalam perjalanannya, penafsiran-penafsiran bias tersebut dibungkus menjadi norma dan prinsip-prinsip agama, lalu membentuk mainset dan kemudian menghasilkan prilaku bias jender masyarakat. Memang, konstruksi berpikir itu (*mindset*) tidak hanya berasal dari pemahaman keagamaan saja. Agama bukan satu-satunya nilai yang menentukan prilaku masyarakat, akan tetapi dalam praktik hidup sehari-hari, agama menjadi motivasi terpenting dan terkuat bagi prilaku moral seseorang.⁵ Satu penelitian mengemukakan bahwa dari beberapa faktor penyebab kekerasan jender di Indonesia, agama (tafsir keagamaan) merupakan faktor yang cukup berpengaruh. Begitu juga kenyataan dalam lingkungan organisasi-organisasi keagamaan yang menjadi pemandu keberagamaan anggotanya. Sumber di organisasi

⁵ Misalnya dalam satu penelitian oleh Hirschman tahun 1983. Di sini beliau menggunakan agama sebagai lawan religiusitas dalam mempelajari proses konsumsi konsumen. Dia berpendapat bahwa agama dapat berpengaruh pada (1) struktur kepribadian, (2) kesuburan dan adat istiadat seksual, (3) pandangan politik, dan (4) status sosial ekonomi. Hirschman menyelidiki perbedaan afiliasi agama Katolik, Protestan, dan Yahudi sehubungan dengan empat domain konsumsi: (1) hiburan, (2) transportasi, (3) perumahan, dan (4) hewan peliharaan keluarga. Data empiris menunjukkan bahwa agama berfungsi sebagai alat penting untuk mempelajari beberapa konstruksi perilaku konsumen. Begitu juga penelitian Wilkes et al., (1986) dan Kim et al, (2004) tentang bagaimana agama dan intensitas keyakinan agama memiliki efek pada sikap terhadap iklan produk kontroversial.

NU menyatakan bahwa perilaku bias gender masih begitu mengakar di lingkungan Nahdatul Ulama. Begitu mengakar sampai penguatan alternatif pemikiran keagamaan tentang keadilan gender dan isu-isu kebebasan lainnya yang semarak dan memadai di tubuh NU belum mampu untuk merubah perilaku bias gender di tubuh organisasi keagamaan terbesar dan mainstream tersebut.⁶

Uraian di atas hendak mengajukan tesis bahwa terdapat hubungan tarik menarik antara pemahaman dan penafsiran agama di satu sisi dan ide-ide gender di sisi lain terhadap perilaku keagamaan masyarakat. Maksudnya, baik pemahaman agama maupun ide-ide gender secara berlawanan akan memberikan pengaruhnya bagi perilaku keagamaan seseorang. Dengan kata lain, penerimaan pemahaman keagamaan tradisional akan menghasilkan perilaku bias gender. Di lain pihak, penerimaan ide-ide gender menghendaki pemahaman keagamaan yang tidak bias gender, artinya penafsiran ulang pemahaman keagamaan tradisional. Jadi, untuk menghasilkan perilaku yang tidak bias gender dibutuhkan pemahaman agama individu yang sensitif gender. Dari proposisi ini muncul pertanyaan menarik tentang fenomena penyerapan ide-ide gender dalam masyarakat dan perubahan perilaku sosial keagamaan mereka. Apa yang telah menjadi perilaku sosial secara umum dalam konteks perubahan sosial akibat penyebaran ide-ide gender ? Lalu, bagaimana mereka merumuskan pemahaman agama mereka untuk melegitimasi perilaku sosial keagamaan sensitif gender dimaksud ?

⁶ Hal ini diungkap ketua Fatayat NU (2005-2010), Maria Ulfah Ansor, yang banyak bergerak dalam kegiatan-kegiatan pembebasan perempuan di NU.

Dalam redaksi lain, penelitian ini terdorong untuk mengeksplorasi bagaimana perubahan perilaku sosial keagamaan terkait relasi jender yang terjadi dalam masyarakat di tengah fenomena perubahan sosial penyebaran ide-ide jender yang mengglobal, dikhususkan lagi dengan program mainstreaming jender oleh pemerintah ?

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini berangkat dari asumsi penerimaan ide-ide jender, kesadaran dan sensitif jender dalam masyarakat sebagai konsekuensi dari semarak perkembangan pemikiran jender dan penyebarannya yang meluas dan sistematis oleh pemerintah. Bahwa pemahaman agama mempengaruhi bias jender berarti pemahaman dan penerimaan ide-ide jender menghendaki reformulasi tafsir keagamaan seseorang. Dengan penerimaan ide-ide jender tersebut, lantas apa bentuk-bentuk perilaku keagamaan sensitif jender yang termanifestasi dan terimplementasi dalam masyarakat, dan bagaimana masyarakat merumuskan ulang pemahaman agamanya terkait perilaku sosial keagamaan yang diaplikasikannya ? Jelasnya, penelitian ini akan menjawab seputar pertanyaan penelitian berikut ini :

1. Apa bentuk-bentuk perilaku sosial keagamaan sensitif jender yang dipahami masyarakat ?

2. Apa bentuk-bentuk perilaku sosial keagamaan sensitif gender yang dipraktikkan dan diimplementasikan masyarakat dan bagaimana mereka mempraktikkannya ?
3. Bagaimana penafsiran ulang atau formulasi ulang masyarakat tersebut terhadap pemahaman keagamaan tradisional (umum) mereka dalam hubungannya dengan perubahan perilaku sosial keagamaan mereka ?

B. Kerangka Teori

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi gender masyarakat melalui penggalan informasi berkenaan perilaku-prilaku sosial keagamaan berwawasan gender yang dipraktikkan masyarakat.
2. Untuk mengetahui formulasi pemahaman keagamaan masyarakat terkait konsep dan ide-ide keadilan gender.

D. Signifikansi Penelitian

Pertama sekali, bagi kalangan akademik dan peneliti terkait judul ini, penelitian ini berguna untuk menginformasikan bagaimana masyarakat menggunakan dan mengikutsertakan agama mereka sebagai basis nilai bagi pemahaman dan tindakan mereka tentang keadilan gender. Selain itu, dapat menambah data tentang pengaruh perubahan sosial perkembangan pemikiran gender terhadap perilaku sosial keagamaan masyarakat. Adapun kepada pemerintah, penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan-

kebijakan sosialisasi dan implementasi ide-ide jender, dengan melibatkan unsur dan kalangan agamawan, menuju kehidupan kemasyarakatan yang damai, progresif dan bahagia. Sementara bagi masyarakat, penelitian ini menghidupkan kepekaan terhadap perubahan sosial di lingkungannya, terutama berkenaan penyebaran ide-ide jender, hingga mampu membangun persepsi dan respon yang tepat.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini memungkinkan untuk dianalisis berdasarkan kerangka teori berikut ini. Pertama, bangunan teori tentang agama dan perubahan sosial. Kedua, teori tentang agama dan perspektif jender. Ketiga, teori tentang perubahan perilaku sosial keagamaan.

Agama dan Perubahan Sosial

Teori agama dan perubahan sosial diawali dengan analisis teori perubahan sosial itu sendiri. Agama lalu diperbincangkan dalam permasalahan apakah agama berperan, mendorong atau malah menghambat perubahan.

Konsep perubahan sosial sendiri muncul dari dua kubu yang saling mencari pengaruh, yaitu kubu materialisme yang dipelopori oleh Karl Marx (1818), dan Durkheim dan kubu idealisme yang dipelopori oleh Marx Weber (1864 – 1920). Bagi Karl Marx, dengan acuan konsep materialisme historisnya, sejarah perubahan dan perkembangan manusia selalu berlandaskan pada kondisi sejarah kebutuhan material manusia. Dalam hal ini mode produksi, sebagai

basis ekonomi dan infrastruktur masyarakat sangat mempengaruhi proses hubungan-hubungan sosial yang terjadi. Perubahan sosial dipacu dengan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat terjadi dengan sangat cepat. Sebagai akibatnya, mode produksi masyarakat mengalami perubahan sangat cepat dan mendasar. Perubahan sosial berpusat pada kemajuan cara atau teknik produksi material sebagai sumber perubahan sosial budaya.⁷

Sementara menurut pandangan Weber, sebelum terjadinya perubahan teknologi terlebih dahulu terjadi perubahan gagasan baru dalam pola pemikiran masyarakat. Dalam hal ini Weber memfokuskan etika Protestan sebagai pendorong berkembangnya semangat kapitalisme. Menurut Weber, di setiap masyarakat ada suatu sistem nilai yang hidup dan tumbuh secara khusus, yang membedakan masyarakat satu dengan lainnya. Nilai yang merupakan gagasan tersebut akhirnya menjadi kekuatan dominan dari suatu kelompok masyarakat, yang membedakan keberadaannya dengan masyarakat lain. Nilai ini menjadi pemicu bagi perubahan sosial.⁸ Selain kasus etika Protestan yang dianalisis Weber, sebenarnya kejadian-kejadian revolusi dalam sejarah berbagai negara, misalnya revolusi di Rusia sendiri yang digerakkan dengan nilai komunisme, juga merupakan bukti bahwa nilai dan pandangan hidup akan menjadi penggerak perubahan. Biasanya revolusi diakibatkan oleh menyebarnya ide-ide

⁷ Agus Salim, *Perubahan Sosial : Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2002) hal. 9-25

⁸ Agus Salim, *Perubahan Sosial...*, hal. 50. Sutrisno Abdullah, *Agama, Perubahan Sosial dan Sublimasi Identitas*, hal. 25

berbeda yang selanjutnya berdampak pada berubahnya segala tatacara yang berlaku pada lembaga-lembaga kemasyarakatannya.

Adapun menurut Emile Durkheim, perubahan sosial ditinjau dalam konteks keteraturan sosial yang menjamin terciptanya keseimbangan sosial. Karena perubahan selalu menciptakan kegagapan transisional yang mengandung potensi ketidakstabilan, maka perubahan sosial dipandang sebagai suatu penyimpangan dan bentuk pelanggaran kesepakatan hidup bersama. Bagi Durkheim, secara internal perubahan sosial berdampak pada terganggunya kelancaran aktifitas organ-organ dalam sistem sosial.⁹

Ringkasnya, teori Karl Marx merumuskan perubahan sosial dan budaya sebagai produk dari sebuah produksi (materialism), sedangkan Max Weber sebagai sistem gagasan, sistem pengetahuan, dan sistem kepercayaan yang justru menjadi sebab perubahan.

William F. Ogburn dalam Soekanto menyatakan bahwa ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik yang material ataupun yang bukan material. Unsur-unsur material itu berpengaruh besar atas bukan-material. Sementara Kingsley Davis berpendapat bahwa perubahan sosial ialah perubahan dalam struktur dan fungsi masyarakat. Mengutip pendapat sosiolog Indonesia, pengertian perubahan sosial adalah modifikasi-modifikasi pada pola-pola kehidupan, yang merupakan pendapat Samuel Hoening. Adapun Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, sedangkan

⁹ Agus Salim, *Perubahan Sosial....*, 75-80

Hendro Puspito menerangkannya sebagai segala sesuatu yang terjadi dalam satuan waktu tertentu.¹⁰

Dalam penelitian ini, faktor perubahan sosial merujuk kepada teori yang diajukan Weber dan dalam lingkup definisi Samuel Koeing.

Dalam hubungannya dengan agama, perubahan sosial dipahami berbeda dalam hal apakah agama menghambat atau mendorong perubahan. Pendapat yang menyatakan menghambat menemukan dasar teorinya pada Karl Marx. Agama merupakan candu sehingga agama membuat masyarakat menerima saja nasib buruk mereka dan tidak tergerak untuk berbuat sesuatu guna memperbaiki keadaan. Ahli sosiologi lain seperti Marx Weber menentang pendapat ini dan menjadi referensi bagi pendapat bahwa agama dapat menjadi kekuatan revolusioner yang memimpin gerakan sosial untuk mengubah masyarakat. Weber mencontohkan berkembangnya semangat kapitalisme terkait dengan berkembangnya etika Kekristenan. Contoh lainnya sangat banyak, misalnya perlawanan kaum ulama melawan penjajahan Belanda, kepeloporan para rohaniawan Katolik dalam menghadapi diktator dan rezim militer di berbagai negara Amerika Selatan, perlawanan para rohaniawan Katolik di Polandia terhadap rezim komunis, dan gerakan para Ayatollah yang berhasil menjatuhkan rezim Shah Iran.

Akan tetapi, pendapat Weber hanya akan diikuti sebatas telaahnya yang mempertimbangkan akal budi atau rasionalitas dalam tindakan manusia serta peran ide-ide, termasuk ide-ide budaya dan

¹⁰ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jokjakarta : UI Yogyakarta, 1974), hal. 5

pengetahuan-pengetahuan dalam membentuk sikap sosial yang menghantar pada perubahan sosial. Sampai di sini, penelitian ini selanjutnya akan mengasumsikan bahwa ide-ide termasuk ide-ide agama tidaklah steril dari pengaruh sejarah. Fakta sosial memperlihatkan bahwa agama juga berinteraksi dengan realitas empiris kemasyarakatan dan tidak bisa menolak untuk diterjemahkan menurut logika sejarah dan sesuai kondisi serta kebutuhan kehidupan manusia. Dalam situasi ini, wacana yang muncul adalah bahwa agama harus inovatif untuk merespon kenyataan struktur sosial, bahkan dinyatakan bahwa agama harus adaptif. Jelasnya, agama berubah mengikuti arus kondisi interaksi manusia. Di pihak lain, ada juga yang tetap mempertahankan pendapat bahwa kondisi hari inilah yang harus dirubah menyesuaikan teks-teks agama.

Pendapat pertama di atas menempatkan agama sebagai suprastruktur sosial. Agama bukanlah sebuah entitas otonom yang vakum dari interaksi sosial di luarnya. Bahkan entitas 'luar agama' itu bisa jadi mendikte perubahan (penafsiran) agama. Agama terus berubah mengikuti pergeseran struktur ekonomi dan struktur budaya. Robert N. Bellah (1964) misalnya mengemukakan bahwa dalam agama secara bertahap berlangsung evolusi ke arah diferensiasi, komprehensifitas, dan rasionalitas yang lebih besar. Ini bukan mengikuti teori Karl Marx yang meletakkan agama tak bernyawa di hadapan kemauan sejarah, di mana sejarah ditentukan oleh kehendak dan kebutuhan material manusia. Dari kalangan Muslim sarjana Muslim sendiri, pengaruh lingkungan fisik terhadap berbagai aspek

kehidupan manusia sebenarnya telah dicetuskan jauh melampaui masa kelahiran Karl Marx, yaitu oleh Ibn Khaldun (1332–1406). Khaldun meneliti pengaruh lingkungan fisik terhadap bentuk-bentuk organisasi sosial primitif dan modern, hubungan antar kelompok dan berbagai fenomena kultural (kesenian, kerajinan, ilmu pengetahuan, solidaritas atau kohesi sosial).¹¹ Dengan melakukan ini Ibn Khaldun telah mengelaborasi paradigma empirisisme dan metodologi induktif yang juga inheren dalam al-Qur'an.

Seperti dikatakan Sutrisno Abdullah, posisi idealisme Weber buntu untuk memahami pergeseran struktur kognisi masyarakat di mana kebenaran agama dipandang tidak lagi bersifat personal dan tunggal. Maksudnya, sekarang masyarakat menyandarkan agama pada otoritas ilmu bukan pada lembaga atau institusi, dan ini membuka pintu pluralitas penafsiran dan relativitas pemahaman. Agama berinteraksi dengan logika kebenaran multidimensional dan plural. Artinya, perubahan sosial dapat pula mempengaruhi perubahan pada format penafsiran agama sesuai dengan perbedaan pengalaman empiris manusianya.

¹¹ Lihat Ibnu Khaldun, *The Mukadimah: An Introduction to History*, terj. Franz Rosenthal, ed. N.J. Dawood (Princeton : Princeton University Press, 1967). Akan tetapi, seperti diterangkan Sutrisno Abdullah, dalam sejarah khazanah intelektual islam, tesis semacam ini dipersoalkan sebagai sebuah masalah teologis, bukan persoalan keilmuan yang positif dalam matra epistemologi atau metodologi. Hal ini sehingga aktifitas keilmuan yang bertumpu pada metode induktif di kalangan muslim terhenti. Perlu diteliti struktur sosial bagaimana yang muncul sehingga aktifitas keilmuan Muslim beralih kepada metodologi deduktif-spekulatif.

Dimensi esoterik dari suatu agama atau kepercayaan pada dasarnya berkaitan dengan dimensi lain di luar dirinya, yaitu selain dibentuk oleh substansi ajarannya, dimensi ini juga dipengaruhi oleh struktur sosial dimana suatu keyakinan dimanifestasikan oleh para pemeluknya. Hal ini sehingga agama selain dapat berfungsi sebagai alat legitimasi dari proses perubahan yang terjadi di sekitar kehidupan para pemeluknya, ia dapat pula beradaptasi.¹²

Terkait dengan penelitian ini, maka fenomena mainstreaming gender akan secara langsung mempengaruhi format penafsiran agama dan pola keberagamaan umat Muslim.

Perubahan Prilaku Sosial Keagamaan

Benjamin Bloom¹³, seorang psikolog pendidikan, membedakan adanya tiga bidang perilaku, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dari sini dikembangkan bahwa domain prilaku yang diklasifikasikan oleh Bloom, terbagi kepada tiga tingkat :

= Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap obyek melalui indera yang dimilikinya.

= Sikap (*attitude*)

Sikap merupakan respons tertutup seseorang terhadap stimulus atau objek tertentu, yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan.

¹² Dr. H. Dadang Kahmad, M.Si, *Sosiologi Agama* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 54

¹³ Dolores Albarracín dkk, *The Handbook of Attitude* (-----: Routledge, 2005), hal. 74-78

= Tindakan atau praktik (*practice*)

Tindakan ini merujuk pada perilaku yang diekspresikan dalam bentuk tindakan, yang merupakan bentuk nyata dari pengetahuan dan sikap yang telah dimiliki.

Perubahan perilaku sosial keagamaan pada diri seseorang dapat dilihat dari segi efeknya yang bersifat positif-negatif, dari segi kualitasnya meningkat atau menurun, dan dari segi kuantitasnya sedikit, banyak atau menyeluruh. Perubahan tersebut merupakan gejala yang direfleksikan oleh kekuatan dari dalam dan luar. Yaitu kondisi iman, psikis/pikir, kultur masyarakat dan keadaan lingkungan.

Faktor yang mempengaruhi perilaku sosial keagamaan adalah :

- 1). Faktor genetika. Yaitu sesuatu yang dibawa sejak lahir dan merupakan warisan sifat dari kedua orang tua. Artinya, dari dalam diri manusia ada potensi dan kemauan untuk mengubah dirinya; 2) Faktor pendidikan. Yaitu segala usaha sistematis yang berlangsung seumur hidup dalam rangka mengalihkan pengetahuan oleh seseorang kepada orang lain, baik formal maupun non formal; 3) Faktor tingkat usia. Yaitu kenyataan perbedaan perilaku sosial keagamaan pada tingkat usia yang berbeda; 4) Faktor pengalaman. Yaitu keseluruhan pelajaran dan penghayatan yang dipetik oleh seseorang dari peristiwa-peristiwa yang dilalui dalam perjalanan hidupnya; 5) Faktor lingkungan. Yaitu situasi dan kondisi yang dihadapi oleh seseorang dalam rumah dan dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu masyarakatnya.¹⁴

¹⁴<http://id.shvoong.com/social-sciences/counseling/2207714-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-perilaku>.

Bagaimana kondisi masyarakat menghadapi perubahan sosial ? Hal ini dapat dipolakan kepada tiga : Adjustment, Mal-Adjustment, Disintegrasi, dan Reintegrasi. Adjustment adalah keadaan dimana masyarakat mampu menyerap perubahan-perubahan. Mal-Adjustment adalah keadaan di mana suatu masyarakat tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Disintegrasi merupakan suatu keadaan yang menggambarkan adanya ketidaksesuaian dan ketidakselarasan di antara unsur-unsur dan elemen-elemen tertentu sehingga menimbulkan tercerai-berainya sistem yang ada. Adapun Reintegrasi adalah proses pembentukan norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan.

Selain pola di atas, ada pula gambaran keadaan sosial dalam menghadapi ide-ide dan situasi baru yaitu Anomie, Culture Shock, dan Culture Lag. Anomie adalah keadaan di mana seseorang sudah tidak mempunyai pegangan dan nilai apapun sebagai sandaran dalam menjalani kehidupan. Nilai-nilai yang sebelumnya sudah dipegang mulai luntur bahkan hilang sama sekali tetapi tidak atau belum menemukan nilai baru. Culture Shock adalah keadaan dimana seseorang atau masyarakat tidak siap menerima kebudayaan baru yang sifatnya asing dan datang tiba-tiba. Culture Lag adalah kegoncangan budaya yang terjadi disebabkan satu komponen budaya tidak bisa menyesuaikan atau beradaptasi dengan komponen budaya lainnya yang telah mengalami perubahan terlebih dahulu.

Selanjutnya, berkenaan dengan penerimaan dan sikap selektif di pihak masyarakat terhadap perubahan, mereka terbagi kepada kelompok yaitu kelompok Konservatif, Progressif, dan Moderat. Kelompok konservatif skeptis menerima perubahan dan mengagungkan ide-ide dan nilai-nilai lama dan melakukan pembaharuan dengan sangat hati-hati dan statis, sampai memunculkan sikap etnosentrisme. Kelompok konservatif menjaga dan membentengi kepunahan nilai-nilai dan pemahaman nenek moyang, pendahulu dan termasuk dalam hal ini pendapat ulama-ulama klasik. Kelompok progresif didasari filsafat bahwa nilai terus berkembang karena pengalaman-pengalaman baru. Karena itu, golongan ini sangat proaktif terhadap perubahan dan golongan ini menjadi *agent of change* dalam masyarakat. Kelompok ini memiliki visi dan berorientasi ke masa sekarang dan ke depan dan bukan ke masa lalu. Kelompok moderat bersifat selektif terhadap perubahan. Kelompok ini berusaha menjalankan tradisi-tradisi lama dengan menyesuaikan dan mengadaptasikannya dengan keadaan riil di masyarakat.

Yang Penjelasan di atas menerangkan perubahan perilaku dalam perspektif sosiologis. Berikut ini menyajikan perubahan perilaku ditinjau dari perspektif psikologis. Secara psikologis, perilaku manusia merupakan resultan dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor determinan perilaku manusia luas, namun beberapa ahli mencoba merumuskan teori terbentuknya perilaku manusia. Misalnya teori perilaku ABC, REASON-ACTION, dan

PRECED-PROCEED.¹⁵ Teori ABC menyatakan bahwa perilaku manusia adalah proses sekaligus hasil interaksi antara : Antecedent – Behavior – Consequences. Antecedent adalah trigger atau pendorong bisa alamiah atau man-made. Behavior merupakan reaksi terhadap Antecedent. Consequences adalah hasil, bisa positif yaitu menerima atau negatif yaitu menolak. Teori REACTION-ACTION menekankan pentingnya “intention/niat” sebagai faktor penentu. Niat itu sendiri ditentukan oleh sikap dan norma subjektif pengendalian perilaku. Misalnya, seorang ibu yang hendak mengimunisasikan anaknya harus didasarkan niat, dan niat ini ditentukan oleh sikap ibu yang setuju dengan imunisasi. Teori PRECED-PROCEED adalah perilaku yang ditentukan oleh (1) *Predisposing Factors*, terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, dan nilai. (2) *Enabling Factors*, tersedianya atau tidak tersedianya fasilitas. (3). *Reinforcing Factors*, terwujud dalam wewenang yang dimiliki. Teori BEHAVIOR INTENTION terdiri dari : 1. Behavior intention 2. Social support 3. Accessibility to information 4. Personal autonomy 5. Action situation. Yang lainnya adalah teori THOUGHT AND FEELING. Menurut teori ini perilaku seseorang ditentukan oleh : 1. Thoughts and feeling 2. Personal reference 3. Resources 4. dan Culture.

Kalau di atas adalah teori terbentuknya perilaku, maka para ahli juga merumuskan teori perubahan perilaku (*behavior change*).

¹⁵ Lihat masing-masing, Teori ABC dalam Sulzer, Azaroff, Mayer : 1977; Teori REACTION-ACTION dalam Feisben&Ajzen, 1980; Teori PRECED-PROCEED dalam Lawrence Green : 1999; Teori Behavior Intention dalam Snehendu Kar : 1980; Teori Thought and Feeling dikeluarkan oleh WHO:1984.

Teori ini penting untuk tujuan – 1. mengubah perilaku negatif menjadi perilaku positif, - 2. pembentukan atau pengembangan perilaku baru - 3. memelihara perilaku yang sudah positif. Salah satunya teori DISSONANCE. Maksudnya, ada satu keadaan *cognitif dissonance* yang merupakan ketidak-seimbangan psikologis, diliputi oleh ketegangan diri yang berusaha untuk mencapai keseimbangan kembali. Dissonance terjadi karena dalam diri individu terdapat elemen kognisi yang bertentangan, yaitu pengetahuan, pendapat atau keyakinan. Apabila terjadi penyesuaian secara kognitif, akan ada perubahan sikap yang berujung perubahan perilaku. Selain itu, ada teori FUNGSI. Menurut teori ini perilaku mempunyai fungsi: 1. Instrumental, 2. *defence mechanism*, 3. penerima objek dan pemberi arti, dan 4. nilai ekspresif. Perubahan perilaku individu tergantung kebutuhan. Stimulus yang dapat memberi perubahan perilaku individu adalah stimulus yang dapat dimengerti dalam konteks kebutuhan orang tersebut. Yang lainnya, teori KURT LEWIN (1970). Menurut Kurt Lewin, perilaku manusia adalah suatu keadaan seimbang antara *driving forces* (kekuatan-kekuatan pendorong) dan *restraining forces* (kekuatan-kekuatan penahan). Perilaku dapat berubah apabila terjadi ketidakseimbangan antara kedua kekuatan tersebut.¹⁶

Adapun strategi melakukan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik dan sehat menurut WHO adalah (1). Menggunakan kekuatan (Enforcement) 2. Menggunakan kekuatan peraturan atau hukum (Regulation) 3. Melalui pendidikan (Education)

¹⁶ FESTINGER :1957; Katz : 1960; KURT LEWIN :1970.

Dalam masalah tarik menarik antara kekuatan ide-ide Jender dan pemahaman agama tradisional dihadapkan dengan perubahan perilaku sosial keagamaan sensitif jender, dapat dilihat teori saling pengaruh antara dua kebudayaan. Berjumpanya dua kebudayaan, dalam hal ini dua pemikiran yang berbeda, akan menghasilkan perubahan. Jika pengaruh suatu kebudayaan dapat diterima tanpa paksaan, maka disebut *demonstration effect*. Jika pengaruh suatu kebudayaan saling menolak, maka disebut *cultural animosity*. Adapun proses penerimaan pengaruh kebudayaan asing ini disebut dengan *akulturasi*. Jika suatu kebudayaan mempunyai taraf yang lebih tinggi dari kebudayaan lain, maka akan muncul proses imitasi yang lambat laun unsur-unsur kebudayaan asli dapat bergeser atau diganti oleh unsur-unsur kebudayaan baru tersebut.

Perubahan perilaku individual selanjutnya akan menghasilkan suatu perilaku sosial yang menjadi kondisi perubahan sosial. Ini akan melalui tiga tahapan, yaitu (1) Penemuan (*invention*), (2). Difusi (*diffusion*), dan (3) Konsekuensi (*consequences*). Penemuan adalah proses dimana ide/gagasan baru diciptakan atau dikembangkan. Penemuan ini juga terdiri dari tiga fase yaitu fase Discovery, Invention dan Inovasi. Difusi adalah proses dimana ide/gagasan baru dikomunikasikan kepada anggota sistem sosial, sedangkan konsekuensi adalah suatu perubahan dalam sistem sosial sebagai hasil dari adopsi atau penolakan inovasi. Inovasi ini dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, bidang pengembangan masyarakat termasuk kebudayaan rohaniah atau ideologi. Penemuan baru dalam hal

kebudayaan rohaniah (ideologi, kepercayaan, sistem hukum, dsb) berpengaruh terhadap lembaga kemasyarakatan, adat istiadat, maupun pola perilaku sosial. Sistem sosial ini dapat berupa individu, kelompok informal, organisasi sampai kepada pemerintah.

Untuk dapat tersebar dan tercerap menjadi praktik sosial, inovasi harus melalui difusi. Inovasi adalah suatu gagasan, praktek, atau benda yang dianggap/dirasa baru oleh individu atau kelompok masyarakat. Ungkapan dianggap/dirasa baru terhadap suatu ide, praktek atau benda berbeda bagi masing-masing orang. Kesemuanya tergantung apa yang dirasakan oleh individu atau kelompok terhadap ide, praktek atau benda tersebut. Dari kedua padanan kata di atas, maka difusi inovasi adalah suatu proses penyebar serapan ide-ide atau hal-hal yang baru dalam upaya untuk merubah suatu masyarakat yang terjadi secara terus menerus dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari suatu kurun waktu ke kurun waktu yang berikut, dari suatu bidang tertentu ke bidang yang lainnya kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Tujuan utama dari difusi inovasi adalah diadopsinya suatu inovasi (ilmu pengetahuan, teknologi, bidang pengembangan masyarakat) oleh anggota sistem sosial tertentu.¹⁷

Dalam proses 'difusi inovasi' terdapat empat elemen pokok, yaitu: 1). suatu inovasi, dikomunikasikan melalui saluran komunikasi

¹⁷ Munculnya Teori Difusi Inovasi dimulai pada awal abad ke-20, tepatnya tahun 1903, ketika seorang sosiolog Perancis, Gabriel Tarde, memperkenalkan Kurva Difusi berbentuk S (S-shaped Diffusion Curve). Kurva ini pada dasarnya menggambarkan bagaimana suatu inovasi diadopsi seseorang atau sekelompok orang dilihat dari dimensi waktu. Pada kurva ini ada dua sumbu dimana sumbu yang satu menggambarkan tingkat adopsi dan sumbu yang lainnya menggambarkan dimensi waktu. Rogers (1983)

tertentu, dalam jangka waktu dan terjadi diantara anggota-anggota suatu sistem sosial. 2). Saluran komunikasi, adalah alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada khalayak yang banyak dan tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih tepat, cepat dan efisien, adalah media massa. Tetapi jika komunikasi dimaksudkan untuk mengubah sikap atau perilaku penerima secara personal, maka saluran komunikasi yang paling tepat adalah saluran interpersonal. 3. Jangka waktu, yakni proses keputusan inovasi dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya. Dalam upaya perubahan seseorang untuk mengadopsi suatu perilaku yang baru, terjadi berbagai tahapan pada seseorang tersebut, yaitu: 1. Tahap Awareness (Kesadaran), yaitu tahap seseorang tahu dan sadar ada terdapat suatu inovasi sehingga muncul adanya suatu kesadaran terhadap hal tersebut. 2. Tahap Interest (Keinginan), yaitu tahap seseorang mempertimbangkan atau sedang membentuk sikap terhadap inovasi yang telah diketahuinya tersebut sehingga ia mulai tertarik pada hal tersebut. 3. Tahap Evaluation (Evaluasi), yaitu tahap seseorang membuat putusan apakah ia menolak atau menerima inovasi yang ditawarkan sehingga saat itu ia mulai mengevaluasi. 4. Tahap Trial (Mencoba), yaitu tahap seseorang melaksanakan keputusan yang telah dibuatnya sehingga ia mulai mencoba suatu perilaku yang baru. 5. Tahap Adoption (Adopsi), yaitu tahap seseorang memastikan atau mengkonfirmasi putusan yang diambilnya sehingga ia mulai

mengadopsi perilaku baru tersebut. Dari pengalaman di lapangan ternyata proses adopsi tidak berhenti segera setelah suatu inovasi diterima atau ditolak. Kondisi ini akan berubah, karenanya pemilik teori ini yaitu Rogers (1983) merevisi kembali teorinya tentang keputusan terhadap inovasi yaitu: Knowledge (pengetahuan), Persuasion (persuasi), Decision (keputusan), Implementation (pelaksanaan), dan Confirmation (konfirmasi).¹⁸

Dalam proses mengubah perilaku di atas terdapat berbagai hambatan. Dua diantaranya yang bersifat non fisik adalah - Hambatan yang bersifat ideologis, dan - Hambatan Adat dan Tradisi. Hambatan ideologis biasanya terjadi pada adanya usaha-usaha untuk merubah unsur-unsur kebudayaan rohaniah. Hal ini karena akan diartikan sebagai usaha yang bertentangan dengan ideologi masyarakat yang telah menjadi dasar yang kokoh bagi masyarakat tersebut. Hambatan adat atau kebiasaan disebabkan pola perilaku tertentu dipertahankan oleh masyarakat dan dipandang menjadi warisan dari pendahulu-pendahulu dan telah memberikan kebaikan kepada mereka sehingga walaupun sebenarnya sudah tidak dapat digunakan atau sudah tidak cocok sulit sekali merubahnya.

¹⁸ Teori ini dapat diakses dalam sumber-sumber berikut. Abdillah Hanafi, *Memasyarakatkan Ide-Ide Baru* (Surabaya: Penerbit Usaha Nasional, 1987); Everett M. Rogers, *Diffusion of Innovations* (London: The Free Press, 1983); Onong E. Uhyana, *Komunikasi dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1980); Robert H. Launer, *Perspektif tentang Perubahan Sosial* (Jakarta: Bina Akasara, 1989) Sorjono Soekanto, *Sosiologi* (Jakarta: Balai Aksara, 1983); http://ssbelajar.blogspot.com/2012/07/faktor-penyebab-perubahan-sosial_30.

Agama dan Perspektif Jender

Keterlibatan agama, begitu juga agama Islam, dalam hiruk pikuk gerakan feminisme dan fenomena program jender di seluruh dunia sudah terjadi sejak semula dan awal. Bagaimana keduanya berhubungan dan bagaimana kedudukan satu dengan lainnya perlu dipahami agar dapat menggunakannya sebagai kerangka analisis dalam permasalahan penelitian ini.

Feminisme adalah, salah satu penjelasan sederhananya, suatu ideologi, kesadaran dan gerakan yang memiliki asumsi bahwa kaum perempuan telah mengalami diskriminasi dan karenanya harus dikerahkan usaha untuk menghentikan diskriminasi tersebut. Dalam pengertian longgar ini maka sesungguhnya seorang feminis tidak harus seorang perempuan dan boleh jadi seorang Muslim dan Muslimat. Persoalan muncul ketika memberikan jawaban terhadap pertanyaan apa yang menyebabkan kaum perempuan didiskriminasi dan diperlakukan tidak adil?¹⁹

Di sini harus digarisbawahi perbedaan antara feminisme dan studi jender. Feminisme hanyalah penekanan impartial dari studi jender. Studi jender memberi perhatian pada kedua species perempuan dan laki-laki. Walaupun, sampai sekarang ini studi jender masih saja berat fokusnya pada perempuan dikarenakan perempuan hampir tidak

¹⁹ Dr. Mansour Fakih, "Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam : Tinjauan dari Analisis Gender," dalam *Membincang Feminisme : Diskursus Gender Dalam Perspektif Gender* (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), hal. 38.

terdengar suaranya begitu lama.²⁰ Studi jender mencakup studi femininitas dan maskulinitas, feminisme dan maskulinisme. Alice Schlegel (1990, h.23) menerangkan bahwa jender adalah 'cara masing-masing anggota dua jenis kelamin manusia dipersepsi, dikonsepsi, dinilai, dan diharapkan untuk bersikap dan bertindak.' Jender adalah konstruksi atau konsep yang dibangun masyarakat terhadap dua pihak jenis kelamin tersebut. Untuk lebih menjelaskan, Alice membedakan jender dan sex. Sex mengacu kepada perbedaan jenis kelamin biologis antara laki-laki dan perempuan sedangkan jender mengacu kepada makna-makna, peran, dan tanggungjawab yang dibangun secara sosial, sejarah dan budaya terhadap jenis kelamin tersebut. Ada yang menyatakan keduanya, antara kelamin biologis dan kelamin budaya, terpisah dan ada yang berpendapat sangat erat terkait.²¹

Pembahasan agama dan perspektif jender salah satunya adalah meneliti dimensi-dimensi jender dari fenomena keagamaan. Studi jender telah memberikan satu metode pembacaan agama yang baru. Asumsinya agama juga turut memberikan peran dalam memformasikan hubungan jender dan bentuk-bentuk peran jender. Hal-hal yang sudah disumbangkan studi jender terhadap pembacaan agama antara lain merekonstruksi sejarah untuk menemukan suara atau pendapat, pengalaman, dan kontribusi perempuan dalam sejarah

²⁰ Ursula King (ed.), "Introduction : Gender and the Study of Religion" dalam *Religion and Gender* (Oxford: Blackwell, 1995), hal. 1

²¹ Ursula King (ed.), "Introduction : Gender and the Study of Religion", hal. 5

agama dan kehidupan umat manusia. Selain itu, dengan analisis jender dapat juga dikembangkan penjelasan-penjelasan keimanan berdasarkan apa yang dirasakan dan melalui pengalaman spiritual perempuan. Selanjutnya, studi jender dan agama telah melewati fase-fase (1). Dekonstruksi kesalahan pemahaman yang bias jender (2). Rekonstruksi realita dari perspektif feminist (3). Fokus kepada konstruksi teori-teori umum dan mencoba merumuskan kerangka yang menyatukan keseluruhan studi jender hingga menjadi suatu sistem atau perspektif jender yang inklusif.²² Jadi pemahaman keagamaan perempuan dan atau studi-studi kedudukan perempuan dalam agama bukan lagi untuk menciptakan suatu pengetahuan atau disiplin khusus agama perempuan atau Tuhan perempuan melainkan untuk menciptakan konsepsi agama yang komprehensif dan inklusif.

Karya-karya yang mengkaji agama dalam perspektif jender dapat diklasifikasi ke dalam tiga pengkajian yaitu Rereading, Reconceiving, dan Reconstructing.²³ Rereading adalah menguji materi-materi ajaran dan hukum-hukum agama dan praktik-praktik agama dengan kacamata yang melihat dipertimbangkan tidaknya keberadaan perempuan, ada tidaknya suara perempuan, diakui tidaknya eksistensi perempuan. Reconceiving termasuk melakukan pencarian, penemuan dan penyelamatan tafsiran-tafsiran agama maupun pendapat-pendapat akurat dan sah tetapi terpinggirkan atau

²² Ursula King (ed.), "Introduction : Gender and the Study of Religion", hal. 13

²³ Ursula King (ed.), "Introduction : Gender and the Study of Religion", hal. 15

dibuang. Hal ini dikatakan juga sebagai memperkuat warisan penafsiran perempuan. Dalam studi rekonstruksi akan melakukan tugas pertama, membangun ulang masa lalu melalui materi-materi informasi baru dan penggunaan imajinasi sejarah dan kedua, mengaplikasikan paradigma berpikir baru, cara pandang, pemahaman dan penilaian yang baru.

Pembahasan dan pengkajian isu-isu dalam studi jender tidak lagi bersifat teoritis saja. Sebaliknya, perspektif studi wanita, feminisme, dan pengkajian jender telah menjadi bagian integral untuk perjuangan perubahan dan transformasi sosial dan individu anggota masyarakat. Tujuan studi agama dengan perspektif jender telah melampaui pembahasan diskriminasi dan polarisasi perempuan menuju upaya pembangunan dunia baru dan kehidupan spiritualitas yang mensejahterakan kehidupan dunia.

Berkenaan dengan agama Islam, maka studi dan perspektif jender menempati kedudukan untuk mengetahui dan membongkar serta merumuskan kembali pemahaman-pemahaman Islam yang didasarkan pada ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang tereksresi dalam masalah berikut :²⁴

- *Marginalisasi* : pemiskinan ekonomi terhadap perempuan. Tentu saja tidak semua pemiskinan ekonomi terhadap perempuan disebabkan ketidakadilan jender, namun yang dicari adalah hal-hal yang terkait dengan perbedaan jender. Misalnya, banyak perempuan desa tersingkirkan dan menjadi

²⁴ Mansour Fakih, "Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam...", hal. 46-49

miskin akibat program pertanian misalnya kredit tani yang khusus untuk laki-laki, atau pelatihan pertanian yang hanya diberikan kepada petani laki-laki saja. Atau, pemberian upah kepada buruh perempuan lebih rendah ketimbang buruh laki-laki.

- **Subordinasi** : perendahan kedudukan salah satu jenis seks, yang umumnya oleh laki-laki terhadap perempuan baik di lingkungan rumah tangga, masyarakat atau negara. Misalnya, kebijakan-kebijakan negara yang tidak memperhitungkan kepentingan ataupun keuntungannya terhadap perempuan. Dalam masyarakat, perempuan tidak diberikan jabatan manajer atau pemimpin atau cukup jadi bawahan saja karena dipandang tidak kuat akalnya, emosional atau malah aib berada di depan umum.
- **Streotype** : pelabelan negatif terhadap jenis kelamin tertentu. Akibat streotype tersebut terjadi berbagai ketidakadilan dan diskriminasi. Dalam masyarakat banyak sekali streotype yang dilabelkan kepada kaum perempuan yang akibatnya membatasi, menyulitkan, memiskinkan dan merugikan kaum perempuan. Misalnya, karena adanya keyakinan bahwa laki-laki adalah pencari nafkah (*bread winner*) maka pekerjaan perempuan dibayar lebih rendah. Akhirnya, pekerjaan supir dibayar lebih mahal dari pembantu rumah tangga meskipun tidak ada jaminan bahwa pekerjaan supir lebih berat dan sulit dibanding memasak dan mencuci.

- *Violence* : yaitu permisifitas kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu. Hal ini juga umumnya dialami perempuan. Kekerasan mulai dari kekerasan fisik seperti perkosaan dan pemukulan, kekerasan ekonomi seperti pengambilan tanpa izin dan dasar harta istri, kekerasan seksual seperti pelecehan seksual dan penciptaan ketergantungan, atau kekerasan psikologis seperti penghinaan, penyiksaan batin, pembodohan, dan lainnya. Banyak perkosaan terjadi bukan karena unsur kecantikan tetapi karena kekuasaan dan karena ingin menyiksa perempuan.
- *Double Burden* : Beban ganda dalam rumah tangga juga dipandang sebagai ekspresi ketimpangan relasi gender. Walaupun si istri telah bekerja mencari penghasilan, dia tetap diserahkan tanggungjawab penuh seluruh pekerjaan domestik (rumah tangga) dikarenakan anggapan bahwa peran gender perempuan adalah mengurus pekerjaan rumah tangga. Bagi perempuan yang memiliki kemampuan ekonomi, maka dia membebaskan pekerjaan tersebut kepada pembantu rumah tangga. Tetapi, ini tetap tidak melepaskannya dari kekerasan beban ganda tersebut. Hal ini karena walaupun dia telah memindahkan pekerjaan itu kepada pembantu tetapi dia tetap menjadi penanggung jawab. Lebih rumit lagi, terkadang beban ganda tersebut mengambil korban baru yaitu pembantu rumah tangga itu sendiri, yang seringkali harus menerima semua perintah majikannya tanpa kalkulasi waktu dan biaya yang

akuntable ditambah lagi dengan beban pekerjaan rumah tangganya sendiri.

Bagaimana mengatasi berbagai ekspresi ketimpangan hubungan dua jenis makhluk Tuhan tersebut sangat ditentukan oleh pandangan apa yang menyebabkan ekspresi ketidakadilan dan diskriminasi itu terjadi. Sejauh ini terdapat beberapa aliran termasuk di dalamnya aliran dan pandangan Islam yang melihat masalah ini secara berbeda.²⁵

1. Golongan Feminis Liberal. Menurut pandangan mereka bahwa perempuan menjadi terbelakang adalah karena salah mereka sendiri karena tidak bisa bersaing dengan laki-laki. Mereka mempertahankan bahwa perempuan adalah makhluk rasional yang sama persis dengan laki-laki. Mereka tidak mengkambinghitamkan struktur sosial ekonomi dan politik yang patriarkis melainkan pada kebodohan perempuan untuk bertahan dengan irrasionalitas dan tradisionalitasnya. Jadi golongan ini menghendaki perempuan bangkit, tampil, mempersiapkan diri dengan intelektualitas dan rasionalitas dan jangan terperangkap dengan isu-isu kekuatan fisik biologis laki-laki bahkan selalu menyalahkan laki-laki.

2. Kelompok Feminis Radikal. Bagi mereka, dasar penindasan perempuan sejak awal adalah dominasi laki-laki. Meminjam ideologi Karl Marx, mereka ini memandang masalah dengan analisis konflik dan pertentangan antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki dapat menguasai secara fisik dan materil perempuan. Mereka

²⁵ Mansour Fakih, "Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam...", hal. 38-45

menjelaskan penindasan dengan pendekatan *a-historis* dan melihat sistem patriarkis sebagai masalah universal dan mendahului segala bentuk penindasan. Mereka mereduksi hubungan jender pada perbedaan natural dan biologi saja. Penindasan perempuan adalah urusan subjektif individual perempuan. Bagi kelompok ini, revolusi terjadi hanya pada perempuan yang mengambil aksi untuk mengubah gaya hidup.

3. Kelompok Feminis Marxis. Kelompok ini menolak gagasan kaum radikal bahwa 'biologi' sebagai dasar pembedaan. Bagi mereka, penindasan perempuan adalah bagian dari eksploitasi kelas dalam relasi produksi ? Isu perempuan selalu diletakkan dalam kerangka kritik terhadap kapitalisme. Walaupun, mereka mengakui modus penindasan perempuan telah lama sebelum zaman Kapitalisme. Dalam Kapitalisme, produk perdagangan dikontrol oleh laki-laki, maka mereka mendominasi hubungan sosial dan politik masyarakat, dan akhirnya perempuan direduksi menjadi bagian dari properti. Bentuk penindasan menurut kelompok Feminis Marxis, salah satunya eksploitasi pulang ke rumah. Dengan menempatkan perempuan di rumah, laki-laki bisa keluar rumah dan mendapatkan gaji. Jadi, kapitalisme diuntungkan oleh eksploitasi perempuan di rumah tangga. Bentuk lainnya, walaupun menjadi buruh, perempuan dihargai dengan murah sehingga kapitalisme tidak mengeluarkan banyak modal untuk harga tenaga kerja. Bentuk ketiga, masuknya perempuan ke dunia kerja menciptakan limpahan buruh cadangan, yang akhirnya juga memperkuat posisi tawar kaum kapitalis.

Ringkasnya, menurut feminisme Marxisme penyebab penindasan perempuan adalah bersifat struktural, maka diperlukan revolusi untuk menghapus sistem kelas dan semua perempuan sama dengan laki-laki harus terlibat dalam produksi, kelanjutannya pekerjaan domestik dilepas dari predikat perempuan atau ditransformasi menjadi industri sosial.

4. Kelompok Feminis Sosialis : Pendapat kelompok ini adalah sintesa antara teori kelas dari Marxisme dan prinsip *the personel is political* dari radikal feminis. Bagi kelompok ini, penindasan ada di kelas mana saja, tidak mesti dalam bentuk eksploitasi ekonomi. Bagi kelompok ini terjadi tarik menarik antara “kebutuhan kesadaran feminis” di satu pihak dan “kebutuhan menjaga integritas materialisme Marxisme”. Artinya, analisa patriarki perlu ditambahkan dalam analisa *mode of production*. Mereka menolak asumsi bahwa ada hubungan partisipasi perempuan dalam produksi terhadap status perempuan. Bagi mereka, partisipasi ekonomi dan pemilikan sumber daya memang perlu tetapi tidak selalu menaikkan status perempuan. Hal ini karena faktanya banyak perempuan yang dijadikan budak. Kesimpulan kelompok ini meningkatnya partisipasi perempuan dalam ekonomi lebih membawa pada antagonisme seksual ketimbang menaikkan status mereka. Kegagalan mentransformasi posisi kaum perempuan di eks Uni Sovyet, Cina dan Rusia membuktikan bahwa revolusi tidak serta merta membebaskan perempuan. Kelompok ini memakai teori sintesa Zillah Eisenstein, yaitu dialektika struktur kelas

dengan struktur hirarki seksual. Bagi Eisenstein, ketidakadilan tidaklah semata akibat perbedaan biologis, tetapi lebih karena penilaian dan anggapan (*social construction*) terhadap perbedaan ini.

5. Aliran Ekofemisme : Menurut teori ini, seluruh pemikiran gerakan feminisme di atas yang bertujuan mengakhiri penindasan terhadap perempuan menggunakan ideologi, epistemologi, dan teori yang berdasar pada 'prinsip maskulinitas', yang tidak saja anti feminis namun juga anti ekologis. Dengan demikian, semua secara tidak sadar ikut menyingkirkan prinsip 'feminitas'. Yakni, satu pandangan dan ideologi yang ramah sesama manusia dan melindungi lingkungan. Menurut kelompok ini, kaum feminis lainnya masih menyimpan ideologi *oppressor* (penindas).

Feminis liberal yang bersandar pada paham developmentalisme serta dengan pendekatan positivistik, dikritik telah menimbulkan masalah baru ketimbang solusi. Feminisme radikal dikritiknya telah mengaplikasikan prinsip maskulinitas, yakni persaingan untuk mengatasi kaum laki-laki. Adapun Feminisme Marxis juga memiliki pendekatan rasional dan cenderung positivistik, dan telah merendahkan dan mendevaluasi prinsip feminitas dan mengagungkan maskulinitas karena mengganti tugas-tugas domestik dengan proses industrialisasi.

Setelah mengkritik kecenderungan rasionalitas, maskulinitas dan positivistik dari semua aliran feminis di atas, aliran ekofeminisme menawarkan pendekatan dan prinsip feminin dalam gerakannya.

Menurut mereka, prinsip maskulinitas dan rasionalitas selain akan menciptakan kekerasan dan pemiskinan terhadap perempuan juga akan mengakibatkan hal yang sama terhadap alam dan lingkungan. Lain halnya dengan ekofeminisme, aliran ini didasarkan pada gagasan yang berakar pada kepedulian akan kehancuran ekologi dan tersingkirnya prinsip femininitas. Menurut aliran ini memperjuangkan kesetaraan dan kesamaan mutlak dengan laki-laki tidak akan meruntuhkan sistem patriarkis pada dunia maskulin, melainkan hanya akan merubah komposisi para aktornya saja. Para perempuan akhirnya terjebak masuk dan menciptakan sistem patriarkis dan menjadi *male done* (tiruan laki-laki) di dunia maskulin, di mana mereka mengadopsi praktik-praktik kompetisi, dominasi, ambisi, kebutuhan.

Kemunculan aliran ekofeminisme ini diyakini cepat merebak dikarenakan fakta-fakta kegagalan-kegagalan di lapangan dan efek samping dari gerakan-gerakan feminis yang ada. Masa-masa di tahun 1980-an adalah masa titik balik bagi gerakan feminisme dengan maraknya kritik dan berita-berita tentang keterpurukan perempuan di berbagai negara. Angka perceraian yang meningkat drastis, perempuan dibiarkan dan tidak mendapat perhatian atau bantuan karena dianggap sudah setara dan mandiri, laki-laki seperti balas dendam tidak menikahi wanita, angka perkawinan rendah, perpecahan keluarga, angka kumpul kebo tinggi, laki-laki tidak bertanggungjawab, single-parent dan anak-anak tanpa bapak, dan yang paling mengesankan adalah jumlah anak-anak yang terlantar dan ditelantarkan keluarga terus meningkat. Semua keadaan ini menjadi

kondisi yang membuat banyak perempuan mempertanyakan kembali kebebasan yang telah diperoleh. Dan lagi, menjadi kontribusi berbaliknya arah perkembangan pemikiran feminisme pasca 1980-an. Di atas semua itu, menjadi latar belakang dari kemunculan ideologi femininitas aliran ekofemisme.

Aliran ekofeminisme mulai mempertimbangkan kualitas feminin perempuan sendiri untuk perempuan dapat meningkatkan harkat martabatnya. Mereka mulai cenderung menerima perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Mereka percaya bahwa perbedaan jender bukan semata-mata, seluruhnya konstruksi budaya melainkan ada aspek *intrinsic*. Hal ini yang ditentang oleh feminis marxis dengan berbagai variannya bahwa sikap feminin perempuan adalah akibat sosialisasi bukan karena fitrah. Seorang ahli teori feminis di AS meramalkan bahwa gerakan perjuangan perempuan pasca 1990-an akan diwarnai dan diilhami oleh teori dan prinsip ekofeminisme.

Berkenaan dengan agama dan perspektif jender, interaksi antara keduanya telah ada sejalan dengan berkembangnya paham teologi pembebasan yang memakai paradigma Marxisme. Teologi feminis adalah gerakan reformis dan revolusioner untuk mendekonstruksi ideologi atau pemahaman keagamaan yang bias lelaki. Dekonstruksi ini bertujuan untuk menghapus patriarki, dan mencari landasan teologis akan persamaan antara laki-laki dan perempuan. Teologi feminis pada intinya sama dengan feminisme sosialis, radikal, dan liberal, yaitu ingin menghilangkan segala stereotip jender sehingga perempuan dapat menyamai laki-laki dalam pelbagai

aspek kehidupan. Perbedaannya adalah teologi feminis memakai agama untuk mencapai tujuannya. Di Indonesia ide teologi feminis sudah merebak dengan diadakannya simposium di suatu perguruan tinggi yang menggugat pendapat-pendapat fikih dan memunculkan fikih baru. Beberapa rumusan fikih yang dihasilkan adalah perempuan boleh menjadi imam salat di depan laki-laki, menjadi khatib, menjadi muazzin, dan melakukan akad nikah meskipun tanpa wali.

Kalau diatas adalah teologi feminis dengan paradigma pembebasan dan dekonstruksi, maka dengan munculnya aliran ekofeminisme memunculkan pula perubahan pada interaksi antara agama dan perspektif gender. Teologi feminis sebelumnya menyentuh aspek material dan legalistik agama, sementara aliran ekofeminisme bersinggungan dengan agama dalam aspek spiritual, internal, dan substansial. Nama untuk ini adalah Spiritualitas Ekofeminis. Spiritualitas ekofeminis mengajak manusia untuk mentransformasi spiritual manusia guna mewujudkan masyarakat yang lebih baik, bukan dengan mengadakan transformasi eksternal yang sudah dianggap gagal. Transformasi internal ini dalah menumbuhkan kesadaran akan saling keterkaitan bukan saja antara manusia tetapi juga antara manusia dan alam semesta. Pendekatan internal atau *esoteric* lebih melihat inti kesamaan dari segala yang termanifestasi walaupun berbeda-beda. Sedangkan, pendekatan eksternal lebih menitikberatkan pada masalah perbedaan dari segala wujud yang tampak dan termanifestasi.

Menurut spiritualitas ekofeminisme, dalam sejarahnya manusia condong dengan pemujaan 'Tuhan Maskulin' dan lalu menginternalisasi dirinya sebagai kuasa, aktif, jauh, pemberi aturan, dominan – mungkin bisa dianalogi dengan Sifat Tuhan Jalal—dan kurang pada 'Tuhan Feminin'. Imajinasi bahwa Tuhan feminin, dalam konsepsi ekofeminisme, membuat manusia menginternalisasi sifat-sifat feminin yaitu pengasih, pemelihara, bersatu, penerima, dan lainnya. Kualitas-kualitas feminin ini akan menjadikan manusia sadar bahwa elemen-elemen dalam diri manusia, antar manusia, bumi, langit, seluruh kosmos, pada esensinya adalah adalah satu, yang berasal dari 'The Mother God'.

Perspektif jender baru ini yang pada basisnya mengikuskertakan unsur spiritualitas dan ide-ide kebersatu-paduan makhluk –laki-laki dan perempuan, manusia dan alam semesta—akan dapat membuka alternatif baru analisis jender terhadap agama, khususnya agama Islam.

6. Alternatif Analisis Jender Islam

Disamping prospek yang ditawarkannya tentang aspek-aspek spiritual, ekofeminisme masih menyisakan ketimpangan dan inkomprehensifitas –missing link– karena menolak patriarki sebagai simbol "the Father God", padahal mereka mempercayai bahwa hakikatnya segala sesuatu adalah satu.

Islam dapat memberikan jawaban untuk menyempurnakan celah dan merangkai missing link tersebut. Bahwa dua kualitas Tuhan

tersebut harus diakui dan keduanya dapat berjalan dengan saling melengkapi membentuk satu kesempurnaan. Islam melegitimasi ide patriarki dalam kerangka dan sepanjang menutupi kebutuhan sokongan dan perlindungan terhadap kualitas feminin. Inilah ide yang dikandung ayat-ayat tentang ketundukan kepada Yang Maha Kuasa, aturan-aturan akhlak untuk patuh pada pemimpin, pada yang lebih tua, pada suami, dst. Tafsir ini yang harus diberlakukan terhadap nas-nas tersebut. Bukan penafsiran yang dikerangkeng oleh kedangkalan pemahaman eksternal dan tujuan-tujuan material dan hedonistik si penafsir. Pemahaman nas-nas tentang eksistensi patriarki harus mengikutsertakan penafsiran batin dan internal. Sachiko Murata mengajukan cara pendekatan internal eksternal dan maskulin feminin terhadap nas-nas agama Islam dan menyatakan bahwa dunia Islam *mainstream* terlalu berat mengacu pada pendekatan syariat dan hukum, dan kurang memakai pendekatan hakikat atau ma'rifat dalam melihat suatu permasalahan.²⁶

Maka, Islam dapat memunculkan paradigma dan cara pandang kesatuan dalam menganalisis relasi jender antara laki-laki dan perempuan. Walaupun sekarang masih banyak yang tidak ideal pengaplikasiannya, tetapi Islam memiliki modal teologi dan teori sistematis tentang keseimbangan antara sifat Tuhan JALAL (kualitas maskulin) dan JAMAL (kualitas feminin). Kalau dalam ekofeminis aspek patriarki adalah negatif maka dalam Islam ia adalah aspek gandingan dari matriarki. Idenya bahwa Islam mengakui dan

²⁶ Sachiko Murata, *The Tao of Islam: A Sourcebook on Gender Relationship in Islamic Thought* (Cambridge : Harvard University Press, 1992).

menyatakan bahwa segala sesuatu segala eksistensi ada pasangannya, gandengannya, penutupnya, dan kebalikannya. Dualitas ini selalu ada baik dalam tataran Ilahiah, tataran kosmos, maupun tataran manusia, yang masing-masing berperan sesuai perannya.²⁷

Hal lainnya yang ditawarkan Islam menurut Saciko adalah tentang ide Patriarki positif dan Matriarki Positif. Menurutnya, apa yang terlihat dan terjadi seringkali merupakan ekspresi patriarki negatif atau matriarki negatif. Kedua sifat ini dimiliki oleh manusia baik laki-laki dan perempuan. Untuk mencapai jiwa yang *mutmainnah* dan menjadi insan kamil maka setiap manusia harus mentransformasikan batinnya untuk memanifestasikan matriarki positif ataupun patriarki positif. Inilah yang tidak dipahami oleh semua aliran feminisme sekuler bahwa laki-laki yang menindas dalam struktur patriarki adalah mereka yang mempunyai sifat maskulinitas negatif, dan juga memiliki sifat matriarkis negatif karena tidak mampu melawan hawa nafsu keduniaan. Sementara apa yang digariskan dalam ajaran Islam bahwa laki-laki adalah pemimpin kaum wanita adalah untuk mengekspresikan patriarki positif kepada matriarki positif. Hasilnya adalah perlindungan bukan penindasan, dan respons serta kilas baliknya bukan penantangan tetapi pengembangan potensi dan kesempurnaan.

Dengan konsepsi patriarki negatif dan tandingannya patriarki negatif, atau dengan matriarki positif dengan tandingannya patriarki negatif, maka perlu didengar apa yang ditawarkan oleh Islam, seperti

²⁷ Sachiko Murata, *The Tao of Islam...*, hal. 225

yang dikemukakan oleh Murata bahwa, “Permasalahan kita hari ini bukanlah problem nilai bahwa laki-laki dan perempuan tidak setara dan tidak sejajar, akan tetapi di dunia ini sudah sulit untuk ditemukan laki-laki baik yang menjadi sosok patriarki positif dan perempuan baik yang memanifestasikan matriarki positif.”²⁸

F. Pembatasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan guna penyatuan ide, maka perlu dijelaskan pemakaian istilah-istilah dalam judul penelitian ini.

a. PRILAKU

Benjamin Bloom²⁹, seorang psikolog pendidikan, membedakan adanya tiga bidang perilaku, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Akan tetapi, dalam penelitian ini domain “Prilaku” akan dibatasi dalam lingkup sikap (afektif) dan tindakan (psikomotorik).

b. PERUBAHAN PRILAKU

Perubahan perilaku didasarkan pada teori bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan genetika, serta lainnya. Perubahan tersebut merupakan gejala yang direfleksikan oleh kekuatan dari dalam dan luar diri. Jadi, “Perubahan Prilaku” dalam penelitian ini adalah perbedaan sikap dan tindakan yang sensitif gender yang dilakukan oleh anggota-anggota

²⁸ Sachiko Murata, *The Tao of Islam...*, hal. 236

²⁹ Dolores Albarracín dkk, *The Handbook of Attitude* (England : Routledge, 2005), hal. 74-78

masyarakat Muslim dari anggapan dan tindakan umum yang berlaku atau pernah berlaku dan berjalan dalam masyarakatnya.

c. PRILAKU SOSIAL KEAGAMAAN

Prilaku Sosial oleh Max Weber dikatakan sebagai tindakan individu yang penuh arti berupa tindakan-tindakan nyata yang diarahkan kepada orang lain. Sebaliknya, dikatakan prilaku sosial juga berupa tindakan subjektif atau yang terjadi karena pengaruh atau tarikan dari situasi sosial tertentu. Mengikut kepada makna ini maka "Prilaku Sosial Keagamaan" dalam penelitian ini adalah prilaku seseorang yang mengarah kepada orang lain maupun tindakan subjektif yang dilakukan dalam konteks kepentingan hubungan orang-perorang dalam kesatuan komunitas, yang dilakukan atas dasar alasan keagamaan.

Adapun keagamaan dimaksudkan berbeda dengan keberagamaan. Maknanya disesuaikan dengan bentukan kata tersebut yang merupakan kata keterangan berbeda dengan keberagamaan. Keberagamaan Keagamaan merupakan kata sifat atau kata keterangan

d. MAINSTREAMING JENDER

"Mainstreaming Jender" adalah suatu program pemerintah yang bertujuan untuk merealisasikan ide dan paradigma kesetaraan dan keadilan jender dalam seluruh kebijakan pembangunan di berbagai level dan bidang sehingga tercipta kesejahteraan yang menyentuh keseluruhan unsur dan anggota masyarakat. Dalam bahasa

nasionalnya Mainstreaming Gender tersebut adalah 'Pengarusutamaan Gender'.

e. PROFESIONAL

'Profesional' dalam penelitian ini adalah bekerja dengan bidang keahlian tertentu. Kalangan profesional artinya anggota masyarakat yang bekerja dalam bidang keahlian tertentu. Keahlian tersebut diukur dengan kualifikasi tingkat pendidikan, yaitu dalam hal ini tingkat sarjana S1. Maka responden penelitian ini adalah anggota masyarakat yang berpendidikan minimal S1 yang bekerja di bidang keahlian Akademik, Pengusaha/Wiraswasta, Ulama dan Penceramah Agama, di Pemerintahan (legislatif/yudikatif/eksekutif), dan di Organisasi Kemasyarakatan/LSM/Partai Politik. Pertimbangan untuk memilih responden dari bidang keahlian ini adalah dengan asumsi bahwa kalangan profesional tersebut bersentuhan dengan ide-ide dan perspektif gender dan di lain pihak menjadi target atau, paling tidak, sangat terbuka peluang mengalami transformasi kehidupan, memiliki orientasi perubahan dan perbaikan kehidupan, dan terutama sekali perhatian kepada rasionalitas dan alasan-alasan prinsipal dari tindakan-tindakan dan perbuatan yang ia lakukan.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan

Penelitian tentang PERUBAHAN PRILAKU KEAGAMAAN UMAT MUSLIM DI TENGAH GERAKAN MAINSTREAMING GENDER ini dilakukan dengan metode kualitatif. Paradigma

penelitian kualitatif adalah berusaha memahami perilaku manusia dari segi kerangka berpikir maupun bertindak orang-orang yang dibayangkan atau dipikirkan orang-orang itu sendiri. Secara umum paradigma kualitatif berbeda dari segi pencariannya yang bersifat kontekstualisasi, interpretasi, dan memahami perspektif subjek penelitian, sementara paradigma kuantitatif adalah pencarian generalisasi, prediktif dan penjelasan kausal.³⁰

Pendekatan ini akan terefleksi dalam keseluruhan proses penelitian, yaitu penyusunan rancangan, penetapan informan, pengumpulan data, analisis dan teknik penjaminan keabsahan data, dan disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu menggali informasi tentang implementasi perilaku-prilaku keagamaan terkait relasi jender.

Secara spesifik, pendekatan fenomenologi akan digunakan dalam penggalian data dan penulisan laporan. Akan tetapi, prinsip etik dan emik secara bersamaan akan mendasari formulasi pertanyaan dan mekanisme wawancara.

2. Setting dan Waktu

Penelitian ini akan dilakukan di kota Medan dalam kedudukannya sebagai ibu kotamadya yang biasanya menjadi sasaran pertama dan akses utama dalam hal informasi dan pemikiran-pemikiran baru di berbagai bidang. Penelusuran tentang perilaku-prilaku keagamaan berwawasan jender di wilayah perkotaan tentu akan memberikan suatu gambaran mengenai kemauan dan kemampuan masyarakat untuk memahami ulang tafsir dan

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2009), lihat. Hal. 153-155

pemahaman keagamaannya, selain juga memperlihatkan arah dari perubahan sosial yang sedang berlangsung dan dikehendaki dalam masyarakat di daerah tersebut.

Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah bulan Juli – Oktober 2013. Laporan final akan diserahkan pada akhir Oktober 2013.

3. Subjek dan Informan

Subjek penelitian ini sesuai dengan data yang dibutuhkan terkait penerimaan ide-ide jender dan implementasi perilaku jender. Hal ini relatif ditemukan pada masyarakat urban dan di kalangan profesional. Karena itu, penelitian ini akan mengambil informannya dari masyarakat kota Medan dan dari kalangan profesional. Kalangan profesional dimaksud berasal dari kelompok akademik dan pengajar, kelompok pengusaha/wiraswasta, kelompok aktifis partai/LSM, dan kelompok birokrat, serta ulama/penceramah agama. Diarahkannya penelitian ini kepada kalangan profesional didasarkan pada pemikiran bahwa

Dengan kata lain, informan penelitian mencakup beberapa elemen masyarakat yang diyakini mendapat akses informasi tentang ide-ide jender, dalam lingkungan penyebaran ide-ide jender, atau menjadi target dalam program setara jender. Keluarga subyek, sahabat, dan pihak yang terlibat dalam tindakan subjek akan dijadikan informan penelitian juga.

Penelusuran dan penetapan subyek dan informan akan dilakukan dengan tehnik purposive sample.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini yaitu :

a. Wawancara

Dibekali kisi-kisi pertanyaan, peneliti akan mewawancarai subjek dan informan tentang pandangan, pemahaman atau sikap serta tindakan terkait ide-ide jender dan bagaimana mereka mempraktikkannya serta menegosiasi penafsiran agama tradisional yang mereka ketahui sebelumnya. Dengan teknik wawancara semi terstruktur seperti ini, subjek dan informan akan lebih mungkin mengungkapkan informasi detil, dan peneliti pun dapat mengembangkan pertanyaan secara fleksibel sehingga perbincangan dengan subjek dan informan bisa berjalan lebih rileks dan tidak kaku. Atas izin subjek dan informan, wawancara akan direkam dengan alat perekam digital, dan peneliti akan membuat transkrip penuh isi rekaman tersebut untuk memudahkan proses analisa data dan penulisan laporan.

b. Angket

Untuk mendapatkan informasi yang lebih tegas tentang bentuk-bentuk dan pola-pola perilaku keagamaan berwawasan jender, selain wawancara penelitian ini juga akan menggunakan angket. Pertanyaan dalam angket akan disusun secara terbuka dalam bentuk essay dan juga dalam bentuk pilihan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendapatkan ketepatan jawaban.

c. Dokumentasi.

Peneliti akan mengumpulkan foto-foto yang berisi informasi tentang pandangan, sikap dan tindakan informan terkait perilaku keagamaan mereka.

Teknik-teknik lainnya yang bisa mendeskripsikan data secara kualitatif juga akan digunakan ketika diperlukan, seperti pengamatan dan catatan lapangan.

5. Analisa Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data dari hasil wawancara, angket, catatan lapangan, dan dokumentasi. Kemudian data tersebut diseleksi, dirangkum dan direduksi dengan melakukan abstraksi untuk melihat pola-pola yang muncul. Setelah itu, data-data tersebut disatukan dan juga dipilah menurut satuannya untuk dapat dikategorisasi (*koding*). Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan keabsahan data dan terakhir interpretasi dan penarikan kesimpulan.

6. Penjaminan Keabsahan Data

Triangulasi sumber dan metode akan menjadi alat utama penjaminan keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian ini. Data yang diperoleh akan dicek ulang dengan sumber berbeda (informan, catatan observasi dan dokumen) dan dengan metode berbeda (wawancara dan pengamatan).

BAB II

KAJIAN TEORITIS

Bab kajian teoritis ini akan menguraikan kajian-kajian, karya-karya tulisan dan penelitian yang menginformasikan dan menganalisis sikap dan perilaku jender dalam masyarakat Muslim dan yang mengkritisi norma-norma agama yang diaplikasikan dalam melegitimasi perilaku jender tersebut. Hal ini akan memperlihatkan bagaimana masyarakat menafsirkan ajaran Islam sesuai dengan problem sosial mereka.

A. Permasalahan Jender Dalam Prilaku Sosial Budaya Masyarakat Muslim

Mansour Fakih menguraikan dalam tulisannya bahwa dalam masyarakat Muslim tidak bisa dipungkiri didapati juga bentuk-bentuk ketimpangan hubungan relasi jender dalam berbagai ekspresinya. Dalam kerangka kesimpulannya bahwa Islam menganut prinsip dasar Keadilan, Mansour membahas 'ketidakadilan jender dalam masyarakat Islam' dalam berbagai bentuknya sebagai berikut :¹

Pertama, subordinasi. Sejarah Islam mencatat masa-masa di mana perempuan dipandang lebih rendah dari laki-laki, lalu perempuan diharuskan mengabdikan kepada suaminya sebagai bagian dari tugasnya. Ini selalu didasarkan pada ayat, utamanya, *al-Rijalu Qawwamuna ala al-Nisa'*. (al-Nisa 34). Pemahaman akan ayat ini menghasilkan suatu

¹ Dr. Mansour Fakih, "Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam : Tinjauan dari Analisis Gender," dalam *Membincang Feminisme : Diskursus Gender Dalam Perspektif Gender* (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), hal. 55-63

peran gender (gender role) yang sesungguhnya merupakan konstruksi sosial.

Para penafsir Muslim memperjuangkan makna ayat tersebut bukan sebagai perendahan posisi perempuan. Ali Engineer menyatakan bahwa ayat tersebut bukan sebagai penetapan atau norma ajaran yang harus dipraktikkan melainkan merupakan deskripsi keadaan struktur dan norma sosial masyarakat pada saat itu. Ayat itu menerangkan bahwa saat itu laki-laki adalah manajer rumah tangga, bukan menyatakan bahwa kaum laki-laki harus menguasai perempuan atau suami menguasai istri. Jadi, kata *qawwam* diartikan berbeda dari masa ke masa mengikuti semakin meningkatnya kesadaran hak kaum perempuan. Saat ayat itu diturunkan memang belum ada kesadaran tentang persamaan itu. Setelah argumen ini, para penafsir lalu menyatakan bahwa banyak ayat-ayat al-Qur'an yang menegaskan kedudukan suami istri adalah sejajar. Masih terkait dengan pemaknaan *qawwam* ini, lalu dipersoalkan tentang kebolehan perempuan menjadi kepala negara atau pemimpin lembaga atau bahkan pemimpin rumah tangga. Untuk ini diajukan juga hadis dari Abu Bakar yang menyatakan bahwa kepemimpinan wanita tidak sah. Pendapat yang menolak larangan kepemimpinan wanita ini mengajukan alasan bahwa tidak ayat yang tegas yang melarangnya. Bahwa hadis Abu Bakar tersebut adalah hadis ahad, dan bahwa dalam sejarah Islam 'Aisyah r.a. mempraktikkan secara nyata dirinya mengomandoi suatu perang.

Bagi Mansour Fakih, upaya untuk menyingkirkan ketidakadilan jender dalam bentuk 'subordinasi' kaum perempuan ini

diharapkan akan memungkinkan bagi kaum perempuan yang mampu untuk memimpin rumah tangga, memimpin peribadatan, memimpin organisasi, bahkan memimpin negara. Persoalan di sini bukan apakah laki-laki atau perempuan yang memimpin, namun siapa yang memimpin lebih adil dan demokratis.

Kedua, *Violence* ; Kekerasan adalah suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan gender adalah kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu disebabkan oleh anggapan bahwa itu pantas dilakukan, disebut *gender-related violence*. Pemukulan terhadap istri adalah satu tindakan yang dipersoalkan apakah termasuk kekerasan atau tidak. Bagi mereka yang menyetujui tindakan tersebut dan itu bukan kekerasan menyandarkan pada dalil agama (QS. Al-Nisa:4) bahwa suami boleh memukul istrinya yang memberontak (*nusyuz*). Dari sini meluas keyakinan bahwa suami berhak memukul istrinya manakala dia merasa perlu, bahkan kapan dia mau. Selain pemukulan, hal yang digugat oleh paham feminis adalah praktik mengkhitan perempuan. Dikatakan bahwa khitan adalah penyiksaan terhadap organ alat kelamin perempuan dan dilakukan dengan dasar anggapan bias bahwa perempuan adalah binal dan karenanya harus dikendalikan. Begitu juga dengan tindakan pemaksaan sterilisasi untuk keperluan keluarga berencana. Perempuan dijadikan penanggungjawab untuk program kelahiran anak padahal masalah ini tidak mungkin kalau tidak melibatkan kedua pihak suami dan istri. Hal yang termasuk baru dan modern adalah tindakan pelecehan seksual. Gugatan ini ditujukan

kepada tindakan dan perbuatan laki-laki yang mengganggu sensitifitas perempuan sebagai perempuan. Tatapan bernaafsu laki-laki terhadap perempuan.²

Penafsiran yang diberikan terhadap ayat di atas antara lain bahwa Umar r.a sendiri menolak pandangan dan tindakan ini. Dari Nabi diriwayatkan bahwa Sa'ad bin Rabi' menampar istrinya, Habibah bin Zaid. Lalu Habibah tidak menerima dan mengadu kepada Nabi melalui ayahnya, Nabi lalu memutuskan untuk meminta Habibah membalas tamparan itu. Keputusan itu menghebohkan laki-laki pada saat itu dan menuai protes. Lalu turunlah ayat 35 surat al-Nisa' tentang mengangkat hakim dalam menyelesaikan perselisihan suami istri. Jadi, hukum untuk mendatangkan hakam adalah upaya untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan.

Ketiga : *Streotype*, merupakan pelabelan terhadap suatu kelompok tertentu yang menimbulkan kerugian dan ketidakadilan. Tindakan yang terjadi antara lain pelabelan bahwa perempuan adalah penggoda. Dikarenakan perempuan secara naluri bersolek dan senang menghias diri, maka insiden-insiden pelecehan seksual dan perkosaan selalu diarahkan kepada kesalahan perempuan. Dalam hal ini perempuan mendapat penderitaan berlapis yaitu derita sebagai korban dan sebagai kambing hitam. Lainnya, bahwa kaum perempuan memiliki tugas melayani suami, mengurus rumah (tangga), dan mengasuh anak. Akibatnya, diskriminasi terhadap pendidikan kaum perempuan. Pandangan ini pernah bahkan sebagian masih menghinggapi

² Mansour Fakih, "Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam...", hal. 55-56.

masyarakat Muslim bahwa perempuan tidak perlu disekolahkan setinggi mungkin. Pandangan bahwa perempuan kotor sebagai pengaruh dari keadaan wanita yang memiliki haid.

Streotype perempuan di dunia Muslim Timur Tengah di zamannya digambarkan oleh syekh Nefzawi antara lain :

....perempuan yang ideal adalah yang jarang bicara atau tertawa. Dia tidak pernah meninggalkan rumah, walaupun untuk menjenguk tetangganya atau sahabatnya. Dia tidak memiliki teman, tidak percaya pada siapapun kecuali suaminya....dia tidak boleh banyak menuntut atau bersedih. Tidak boleh tertawa selagi suami bersedih dan harus berusaha untuk menghiburnya....perempuan seperti itu akan dihormati oleh semua orang.”³

Streotype-streotype seperti ini dibantah oleh para feminis Muslim dengan argumen sebagai berikut. Bahwa Islam adalah agama yang memberdayakan kaum perempuan. Islam menghargai hak-hak reproduksi perempuan yang tercakup hak-hak keselamatan/kesehatan, hak kehidupan yang layak, hak memutuskan tindakan berkenaan reproduksi, hak memilih pasangan serta hak menikmati hubungan seksual. Jadi sumber-sumber yang menyatakan bahwa kehendak seksual istri tidak diakui dan terletak pada keridaan suami harus dipahami ulang hingga tidak mengarah kepada makna yang menindas.

Keempat : *Marginalisasi*, maksudnya adalah tindakan peminggiran secara ekonomi. Tentu saja terdapat berbagai proses dalam masyarakat dan negara yang membuat miskin kaum laki-laki dan

³ Dikutip oleh Dr. Mansour Fakih dari Ashgar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam*, yang mengutipnya dari Syeikh Nefzawi, *The Perfumed Garden* (New York: 1964), hal. 97.

perempuan, akan tetapi kondisi yang dimaksudkan di sini adalah pemiskinan akibat pertimbangan jenis kelamin. Hal ini tidak saja terjadi di tempat kerja tetapi juga di rumah tangga, di masyarakat, di budaya, di hukum dan negara. Di masyarakat Muslim, hukum waris memberi setengah kepada perempuan dipandang tidak adil. Di berbagai aturan adat menyatakan bahwa perempuan tidak mendapat waris.

Mengenai pembagian perempuan yang mendapat setengah, Mansour Fakih mengemukakan argumen dengan perspektif jender bahwa ayat tersebut dapat ditafsir ulang. Ayat itu harus dipahami konteks ketika turunnya dan sistem serta struktur sosial kepada siapa ayat itu berbicara. Menerapkan ayat tersebut pada masyarakat yang memiliki sistem dan struktur berbeda akan berdampak terhadap marginalisasi kaum Muslimat.⁴

Kelima : *Beban Kerja Ganda*, merupakan bentuk diskriminasi lanjutan akibat stereotipe tertentu. Misal, bahwa perempuan tidak cocok bekerja di luar, bahwa sifat perempuan rajin dan pembersih. Hasilnya, perempuan ditugaskan secara budaya untuk mengurus semua pekerjaan domestik. Pekerjaan domestik tersebut tidak mengenal waktu dan tidak ada berhentinya. Dari mulai bangun pagi menyiapkan sarapan, mengurus keberangkatan anak-anak dan suami, merapikan rumah, mencuci pakaian sekeluarga, kemudian menyiapkan makan siang, membersihkan dapur, dan kemudian bersiap menyiapkan makan malam lagi, dan seterusnya. Pekerjaan ini

⁴ Mansour Fakih, "Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam...", hal. 61.

sama sekali tidak dihargai secara ekonomis dan perempuan yang tidak bekerja akan disubordinasi atau direndahkan karena tidak menghasilkan ekonomi. Tetapi, bila si perempuan bekerja di luar rumah maka dia akan terkena beban berlipat karena semua pekerjaan rumah tetap tidak dilepaskan dari dirinya.

Dalam masyarakat Muslim, praktik beban ganda dan pelestariannya diacu kepada ayat al-Qur'an (QS. 2:223) yang dipahami bahwa laki-laki dan perempuan berbeda dalam peran, di mana laki-laki adalah pencari nafkah sedang perempuan berkewajiban mengurus peran domestik. Dalam ayat tersebut tidak diisyaratkan bahwa peran produksi (mencari nafkah) lebih bernilai dibanding peran domestik dan reproduksi, namun kenyataannya terjadi diskriminasi penghargaan dan penilaian di antara kedua peran tersebut. Lebih jelas sekali terlihat pada perempuan-perempuan pekerja pembantu. Mereka ini yang menjadi korban beban ganda paling sadis sebab kerja mereka dihargai sangat rendah dan mereka didudukkan dengan status budak dan menjadi tempat tumpahan nafsu dan instink dominasi seorang majikan. Dalam masyarakat Muslim, dalil agama dilapis budaya feodalistik menghasilkan banyak tragedi penyiksaan dan menjadi catatan kelam negara-negara Muslim dalam hal perlakuan mereka terhadap pembantu.

Sebagai negara Muslim yang terbanyak penduduknya di dunia, Indonesia juga menghadapi persoalan ketimpangan gender yang cukup marak dan beragama. Bahkan sampai sekarang ini persoalan belum menunjukkan perubahan signifikan. Terlepas dari kenyataan bahwa

hubungan yang sub-ordinasi memang telah berlangsung di seluruh dunia, tidak saja dalam masyarakat berkembang seperti Indonesia melainkan dalam masyarakat negara-negara maju seperti Amerika dan di seluruh agama, namun penanganan serius masalah jender di Indonesia akan memberikan efek domino yang sangat besar bagi dunia Muslim sekaligus akan mengangkat bangsa Indonesia dalam kemampuannya mengembangkan tafsiran baru Islam yang sensitif jender.

Seperti dilaporkan satu penelitian yang dilakukan pada tingkat provinsi di Jokja,⁵ didapati bahwa sikap bias jender masih melekat di masyarakat, dan ini sangat terkait dengan pengaruh pemahaman agama. Terbukti, ketika identitas agama dikemukakan terlihat peningkatan kecenderungan bias jender yang berbeda hasilnya dengan data di identitas lain seperti pendidikan, jenis kelamin, tempat tinggal dan seterusnya. Dan ini terjadi sama pada seluruh agama di Indonesia kecuali agama Budha yang skalanya agak rendah yaitu 28 %, berbeda dengan seluruh agama yang mencapai antara 50-60 %. Jadi masyarakat agama masih bersikap stereotipe bahwa tugas perempuan adalah sebagai ibu rumah tangga, masih subordinat karena merasa sangat penting dan terus berusaha memiliki anak laki-laki sangat penting, walaupun ketika ditanya tentang pendidikan mereka memberi

⁵ Penelitian "Sikap Keagamaan yang Berkeadilan dan Berkesetaraan Gender Dalam Keluarga di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta," yang dilakukan oleh Pusat Studi Islam UII bekerjasama dengan Cordaid tahun 2007. Penelitian ini mengambil 9 variabel identitas yaitu agama, pendidikan, jenis kelamin, tempat tinggal, umur, status pernikahan, warganegara, profesi, status dalam keluarga. Tim Periset dikordinatori oleh YUSDANI M.Ag. [Http://www.cordaid.nl](http://www.cordaid.nl).

kesempatan yang sama bagi keduanya. Hal ini mungkin dikarenakan karena masyarakat telah sadar bahwa faktor kecerdasan ternyata tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Apalagi kenyataan dan fakta memperlihatkan bahwa perempuan justru lebih banyak yang mendapatkan rapor prestasi dan keunggulan lebih tinggi di sekolah.

Data juga menunjukkan bahwa masyarakat agama juga setuju dan memandang pantas bahwa perempuan mendapat warisan setengah dari laki-laki, dalam Islam sesuai dengan aturan literal ayat al-Qur'an. Begitu juga bahwa masyarakat masih menyerahkan kekuasaan pengambil keputusan kepada Bapak termasuk dalam sikap berlaku adil terhadap keluarga. Akan tetapi, ketika permasalahan menyentuh kehidupan sosial publik dan persoalan asmara suami, terlihat alur perubahan dalam sikap masyarakat agama. Mereka misalnya setuju dan memandang tidak masalah perempuan jadi gubernur, mereka setuju tindak kekerasan dalam rumah tangga dilaporkan kepada yang berwajib. Begitupun, mereka tidak setuju dengan acara pergunjungan rumah tangga di acara infotainment televisi. Sama halnya, masyarakat agama mulai menganggap poligami dan kawin siri sebagai suatu kekerasan, yaitu kekerasan psikologi. Sehingga, mereka menilai buruk dan berbahaya tindakan poligami, kawin siri dan juga membeli media porno tetapi mereka tetap memandang hina perbuatan membakar tempat pelacuran dan tidak setuju dilakukan kekerasan anarkis terhadap mereka.

Dari penelitian di atas dapat dilihat bahwa gambaran sikap pada kondisi-kondisi ketidakadilan gender dalam keluarga dan

kehidupan sosial umumnya masih menyisakan bias, walaupun dalam sejumlah kasus tertentu mulai disikapi dengan pro-jender-equality. Penelitian tersebut berangkat dari asumsi bahwa agama-agama yang dinyatakan dalam teks suci masing-masing adalah adil dan setara jender. Namun ketika sudah berada pada wilayah pemahaman, penyikapan, apalagi praktik kerap kali ajaran itu terdistorsi, tentunya dikarenakan pola-pikir patriarki telah mengakar kuat dan tertanam dalam nilai-norma dan tradisi agama mereka.

Analisis ketimpangan jender di Indonesia juga bisa didapat dari satu kajian terhadap buku panduan/petunjuk tentang hak-hak perempuan dan perannya sebagai istri yang digunakan di pesantren-pesantren di seluruh Indonesia selama turun temurun hampir memasuki satu abad. Buku tersebut adalah Kitab 'Uqud al-Lujjain karangan seorang syekh Makkah berbangsa Indonesia, digelar 'Sayyid Ulama al-Hijaz', yaitu Syekh Nawawi al-Banteni yang berasal dari Serang. Mengingat popularitas buku ini di kalangan pesantren, terutama di pesantren-pesantren Jawa, dan mengingat usia penggunaannya yang begitu lama dapat diterima kalau buku tersebut telah mempengaruhi persepsi, sikap dan perilaku masyarakat agama Islam di Indonesia. Penggunaan buku-buku ini di pesantren di hampir seluruh pulau Jawa disebabkan pimpinan-pimpinan dan pendiri pesantren-pesantren utama di Pulau Jawa tersebut adalah murid-murid setia dan terkenal dari Syekh Nawawi tersebut.

Ketimpangan jender dalam kitab tersebut terungkap dan menjadi perhatian setelah dilakukan suatu kajian ilmiah kritis dan

kemudian diterbitkan oleh Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) di bawah monitor ibu Sinta Nuriyah Wahid. Dengan pendekatan konstruktif untuk melengkapi data dan memberikan pemahaman komprehensif tentang ajaran Islam, demi tegaknya keadilan dan kemaslahatan kehidupan rumah tangga, forum ini melakukan tambahan berupa *takhrij* (telaah) terhadap hadis-hadis yang ada dalam kitab, *ta'liq* (komentar) atas beberapa pandangan tentang suatu masalah dan catatan-catatan yang berkaitan dengan nama, tempat atau kata kunci tertentu yang dianggap penting.⁶

Apa yang akan dikemukakan dalam hubungan penelitian ini adalah tentang bentuk-bentuk ketimpangan jender yang disajikan dalam buku tersebut. Bentuk-bentuk ketimpangan jender tersebut dapat dikelompokkan ke dalam lima isu yaitu 1. Kewajiban suami terhadap istri, 2. Kewajiban istri terhadap suami, 3. Keutamaan salat di rumah bagi wanita, 4. Larangan melihat lawan jenis, 5. Tingkah laku wanita. Dalam bab 'kewajiban suami terhadap istri' secara umum terlihat kalau pengarang sudah berwawasan jender. Pengarang menyajikan hadis-hadis, atsar dan juga hikayat yang menuntut suami untuk berkata lemah lembut kepada istri, menafkahi istri, bersabar atas kekurangan istri dan memberi bekal kepada keluarga dengan mengajari mereka dan mencukupi kebutuhan mereka sedaya mampunya. Walaupun, di antara hadis-hadis tersebut ditemukan tim pentahqiq terdapat 5 buah yang *maudu'* dan hampir seluruhnya hasan,

⁶ Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid dkk., *Wajah Baru Relasi Suami Istri-Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjain* (Jakarta: FK3 & LKIS-Ford Foundation, 2001), hal. xv. Hasil telaah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan judul *Ta'liq wa takhrij ala Syarh 'Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq al-Zaujain*.

baik hasan ligairihi dan hasan sahih. Tetapi yang jelas, pengarang dengan tegas menyampaikan pendiriannya dengan mengajukan hadis sahih tentang wasiat Nabi pada haji wada' dalam hal perlakuan terhadap perempuan. Begitu juga hadisnya, *sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap istri, aku adalah orang yang paling baik di antara kamu terhadap istrinya*. Begitupun, pengarang tidak bisa menghindar dari situasi dan kondisi sosial yang melingkunginya. Dalam hal ini, teks-teks dan tafsiran tentang memukul istri masih didapati dalam uraiannya. Pengarang menguraikan pendapatnya sendiri tentang kondisi-kondisi yang membolehkan suami memukul istri. Kondisi-kondisi ini sangat ringan dan mudah disalahgunakan. Misalnya, jika istri menolak berhias atau bersolek di hadapan suami, memukul anak kecil mereka yang sedang menangis, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti kata 'bodoh' kepada suami walaupun dalam kondisi suaminya sudah mencacinya terlebih dahulu, dan seterusnya. Dalam hal ini tim pengkaji mengomentari bahwa kondisi-kondisi yang disebutkan pengarang tidak bersumber dan bahwa nabi SAW sendiri tidak pernah memukul istrinya. Terlepas dari pendapatnya itu, pengarang syekh al-Nawawi menuliskan bahwa pukulan itu adalah 'pukulan tidak berbahaya' dan bahwa suami 'tidak memukul istri di wajahnya.'⁷

Selain catatan di atas, pengarang mengartikan perkataan Nabi 'awanin sebagai tahanan dan tawanan. Jadi, istri adalah tahanan suami. Hal ini tentu membawa kemungkinan perendahan kepada istri.

⁷ Sinta Nuriyah dkk., *Wajah Baru Relasi Suami Istri...*, hal. 12-39

Lalu, tim pengkaji mengomentari bahwa tidak ada ulama yang mengartikannya tawanan melainkan 'seperti tawanan' (*ka al-asra*). Maksud penjelasan Nabi, kondisi zaman dulu isteri selalu dizalimi dan tidak dapat menolong dirinya, maka suami diharapkan untuk menolongnya.⁸

Dalam bab dua yang membahas 'kewajiban istri terhadap suami', pembaca dengan rasionalitas kuat mungkin dapat menangkap orientasi pro-jender dalam uraian pengarang. Akan tetapi, bagi pembaca yang masih seumuran sekolah pesantren, kemudian diajarkan dalam lingkungan desa tradisional yang kental patriarki, ditambah oleh pengajar-pengajar yang tidak berwawasan jender, maka teks-teks syekh Nawawi ini cukup dapat membuat orang membentuk sikap stereotipe, diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan. Lihat saja dari halaman pertama di mana pengarang memulai penjelasannya tentang poin-poin yang membuat Allah melebihkan laki-laki seperti dalam kalimat surat al-Nisa 34. Dikatakannya bahwa kelebihan laki-laki dilihat dari dua segi : Pertama, dari segi hakiki dan kedua, dari segi syar'i.

Dari segi hakiki atau kenyataan, antara lain kelebihan dalam kecerdasan, kesanggupan melakukan pekerjaan berat dengan tabah, kemampuan menulis, banyak yang menjadi ulama dan pemimpin, pergi berperang, mengumandangkan aza,n, membaca khutbah, melakukan salat jum'at, melakukan i'tikaf, menjadi saksi, memperoleh warisan dan asabah lebih banyak, mempunyai hak untuk

⁸ Sinta Nuriyah dkk., *Wajah Baru Relasi Suami Istri...*, hal. 12

berpoligami dan memegang nasab keturunan. Adapun dari segi syar'i yaitu seperti kelebihan memberikan mahar dan nafkah kepada istri.⁹ Poin-poin ini jelas-jelas tidak rasional dan argumennya bersifat sirkular. Artinya, masyarakat secara bias sudah menghalangi perempuan untuk mencapai derajat itu, sekarang setelah laki-laki mendapatkannya dikatakan itu sebagai bukti hebatnya laki-laki. Lagipula, uraian-uraian ini membuat para laki-laki pembaca menetapkan konsep dirinya sebagaimana uraian tersebut, dan membuat perempuan seakan terhalang untuk mencapai kualitas itu.

Begitu juga teks yang ditawarkan pengarang tentang masalah *nusyuz*. Pengarang sebenarnya telah cukup hati-hati dalam menetapkan pelaksanaan hukuman *nusyuz* dan kriteria *nusyuz* kepada isteri. Beliau berulang menerangkan bahwa suami tidak boleh langsung memukul isterinya, melainkan harus menasihatinya dan memberikan isyarat marah seperti pisah ranjang. Beliau memberikan alternatif pendapat Imam Rafi'i bahwa memukul hanya dibolehkan bila kesalahan itu telah berulang kali dilakukan, bila berfaedah dan tidak membahayakan isteri. Akan tetapi, hadis-hadis yang diajukan pengarang yang dikatakannya harus disampaikan suami untuk menakut-nakuti isteri yang *nusyuz* kenyataannya dapat membentuk pemahaman bias jender pada masyarakat. Padahal hadis-hadis itu dapat dijelaskan lebih lanjut dan ditafsirkan dengan perspektif setara jender. Sementara sebagian hadisnya juga tidak sahih malah ada yang berpendapat daif.

⁹ Sinta Nuriyah dkk., *Wajah Baru Relasi Suami Istri...*, hal. 45-46.

Seperti halnya hadis, *Jika seorang istri menghabiskan malam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, maka para malaikat mengutuknya sampai pagi*. Walaupun hadis ini sahihain, menurut tim pengkaji harus dipahami lebih dalam agar tidak berat sebelah hanya menghakimi pihak istri. Kata *La'anatuha* arti dasarnya adalah dihindarkan atau dijauhkan dari kebaikan. Laknat yang datangnya dari makhluk berarti celaan dan mendoakan keburukan. Kalau Allah melaknat berarti ia menjauhkan dari kebaikan. Bila makhluk yang melaknat makhluk lainnya, itu artinya ia berdoa kepada Allah agar menjauhkannya dari kebaikan. Menurut tim pengkaji, laknat dalam konteks kehidupan sosial adalah hilangnya kebaikan, kedamaian dan kasih sayang dalam kehidupan. Dalam rumah tangga misalnya, maka laknat adalah rumah tangga yang kehilangan kasih sayang dan kedamaian, artinya kebencian dan pertengkaran. Dengan makna ini maka hadis itu tidak terkesan penghakiman di akhirat dan mudah diterima bahwa isteri yang tidak mengikuti kemauan suami tentu akan mengundang kebencian suami. Begitu juga sebaliknya, suami yang tidak menyenangkan hati isteri juga akan terkena laknat, yaitu mengundang kebencian dan menghilangkan kedamaian rumah tangga.¹⁰ Jadi, kata mengutuk bukan merupakan hukuman untuk wanita saja dan hadis ini mengandung tunjukan kepada kedua pihak suami istri.

Sebaliknya, gambaran subordinasi juga perempuan akan terbentuk dari uraian pengarang tentang kualitas amal perempuan. Di

¹⁰ Sinta Nuriyah dkk., *Wajah Baru Relasi Suami Istri...*, hal. 49-50

sini pengarang mengajukan hadis-hadis tentang janji pahala besar bagi istri yang patuh dan taat kepada suami. Teks-teks ini dapat membentuk *mindset* perempuan bangsa Indonesia bahwa keselamatan dan nasib istri di hari akhirat tergantung kepada apa yang dia lakukan kepada suami yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh para suami yang tidak bertanggung jawab. Hadis tersebut misalnya, *sampaikan pesanku ini kepada kaum wanita yang kamu jumpai bahwa kepatuhan kepada suami dan menunaikan haknya adalah sebanding dengan pahala jihad*.¹¹ Oleh tim pengkaji lalu ditunjukkan bahwa hadis tersebut adalah daif. Selain itu, fakta menginformasikan bahwa pada zaman Nabi, tidak ada halangan ideologis dan kultural untuk perempuan ikut dalam peperangan. Tim pengkaji lalu mencatatkan beberapa nama dalam sejarah perempuan yang ikut serta di medan perang seperti Ummu 'Athiyah al-Ansariyyah, al-Rabi' bint Mu'awwiz, Ummu Sulaim dan Nusaibah bint Ka'ab.¹²

Konsep diri perempuan yang telah dibentuk pengarang selanjutnya dapat dilihat dalam teks-teks berikut ini :

Para wanita sebaiknya tahu kalau dirinya seperti budak yang dinikahi tuannya dan tawanan yang lemah tak berdaya dalam kekuasaan seseorang. Maka wanita tidak boleh membelanjakan harta suaminya untuk apa saja kecuali dengan izinnya. Bahkan, mayoritas ulama mengatakan bahwa istri tidak boleh membelanjakan hartanya sendiri kecuali dengan izin suaminya....Istri wajib merasa malu terhadap suami, tidak boleh menentang, harus menundukkan muka dan

¹¹ Sinta Nuriyah dkk., *Wajah Baru Relasi Suami Istri...*, hal. 55

¹² Sinta Nuriyah dkk., *Wajah Baru Relasi Suami Istri...*, hal. 55

pandangannya di hadapan suami, taat terhadap apa saja yang diperintah suami ketika diperintah apa saja selain maksiat. Harus diam ketika suami berbicara, berdiri ketika suami datang dan mendekatinya, menampakkan kegembiraan ketika suami melihatnya, menyenangkan suami ketika akan tidur, mengenakan harum-haruman...membersihkan pakaian, membiasakan berhias diri di hadapan suami dan tidak boleh berhias bila ditinggal suami.¹³

“Andaikata seorang wanita menjadikan waktu malamnya seluruh hidupnya untuk salat, dan seluruh siangya untuk berpuasa, lalu suatu hari suaminya memanggilnya ke tempat tidur sedangkan istrinya menundanya sesaat, maka kelak pada hari kiamat ia akan diseret dengan rantai dan belenggu, berkumpul dengan setan-setan hingga sampai di tempat yang serendah-rendahnya.

“Perkara yang pertama kali ditanyakan kepada wanita pada hari kiamat adalah salat dan kepatuhan kepada suaminya.”

“Di antara haknya (suami) adalah andaikata di antara dua hidung suami mengalir darah atau nanah lalu istrinya menjilati dengan lidahnya, ia belum memenuhi hak suaminya....”Andaikata dari kepala suami sampai kedua telapak kakinya terdapat nanah, lalu istrinya menjilatinya, ia tetap belum dapat memenuhi rasa syukur terhadap suaminya”

“Bahwasanya wanita itu tidak dapat memenuhi hak Allah sebelum memenuhi hak-hak suaminya. Seumpama suami ‘meminta’ pada istrinya sedangkan si istri sedang berada di atas punggung unta, maka ia tidak boleh menolak istrinya.”

Teks yang paling awal adalah kalimat pengarang, sementara dua teks berikutnya dicantumkan sebagai hadis. Oleh tim pengkaji ditelaah sebagai hadis *maudu'*. Adapun dua teks terakhir adalah hadis dan ditemukan sanad hadis ini sahih. Akan tetapi dari segi matan hadis

¹³ Sinta Nuriyah dkk., *Wajah Baru Relasi Suami Istri...*, hal. 61

ini tidak manusiawi. Hadis tentang menjilat nanah bila dilaksanakan secara literal akan memanifestasikan pelanggaran hak azasi manusia, sedangkan hadis tentang mendatangi istri bila tidak dicari penafsiran alternatif akan memanifestasikan kekerasan seksual.¹⁴

Berkeenaan ruang publik wanita, norma yang telah ditanamkan pengarang kepada pengguna bukunya ini menempatkan ruang wanita sangat terbatas dan memposisikan keberadaan perempuan penuh kecurigaan, malah seperti sosok penggoda dan menjerumuskan laki-laki. Lihat misalnya teks-teks berikut :¹⁵

-Diriwayatkan bahwa Nabi Dawud as.berkata kepada anaknya Nabi Sulaiman as. "Hai anakku! berjalanlah di belakang macan dan hewan hitam tetapi jangan berjalan di belakang wanita....Mujahid berkata, "jika seorang wanita berhadapan dengan laki-laki, maka iblis akan duduk di kepala wanita tersebut dan menggoda laki-laki yang memandangnya. Jika ia membelakangi laki-laki maka iblis duduk di pinggul wanita tersebut dan memikat laki-laki yang memandangnya....al-Fudhail berkata, "Iblis pernah berkata bahwa memandang wanita itu adalah busurku yang kuat dan anak panahku yang tidak akan luput dari sasarannya."

-Wanita yang beriman tidak boleh menampakkan dirinya kepada orang lain yang bukan suami, bukan mahram sebab keturunan, susuan, atau pernikahan. Lelaki tidak boleh memandang wanita dan wanita pun tidak boleh memandang laki-laki. Sebagaimana laki-laki wajib menahan pandangannya dari wanita, maka wanitapun wajib menjaga pandangannya dari laki-laki.

¹⁴ Sinta Nuriyah dkk., *Wajah Baru Relasi Suami Istri...*, lihat masing-masing kutipan asli hadis-hadis dalam teks di atas berurutan dari awal, hal. 65, 56, 94, 96.

¹⁵ Merupakan teks-teks kitab Syekh Nawawi Banten yang telah membentuk masyarakat pesantren khususnya di Pulau Jawa sejak turun temurun, dikutip dari Sinta Nuriyah, *Wajah Baru Relasi Suami Istri...*, lihat halaman halaman berikut sesuai urutan teks, 144, 147-148, 147, 153, 154, 150, 157.

-Laki-laki dan perempuan tidak boleh berjabat tangan dan saling menyentuh antara keduanya baik dibarengi dengan keluarnya sperma atau tidak. Karena, yang haram dipandang itu tentunya lebih haram lagi untuk disentuh. Yang demikian itu disebabkan karena menyentuh itu lebih nikmat rasanya dibanding melihat. Dengan alasan itu kalau lelaki menyentuh wanita lalu mengeluarkan sperma maka batallah puasanya. Tetapi kalau memandang lalu mengeluarkan sperma maka puasanya tidak batal.

-Semoga Allah melaknat orang yang memandang dan yang dipandang (hadis)

-Tertusuknya kepalamu dengan jarum dari besi, itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal bagimu....Demi Allah seandainya seorang laki-laki berdesakan dengan babi yang berlumuran lumpur atau lempung hitam yang busuk adalah lebih baik baginya daripada jika ia harus berdesakan dengan pundak wanita.(hadis)

- Wanita adalah perangkap setan, andaikata tidak terdapat syahwat niscaya wanita tidak akan dapat menguasai laki-laki.(hadis)

-"Takutlah kamu semua akan fitnah dunia, dan fitnah wanita. Karena permulaan timbulnya fitnah Bani Israil disebabkan karena wanita...Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih membahayakan lelaki daripada wanita."

-"Nabi bertanya kepada puterinya Fatimah, "Apa sebaiknya yang dilakukan wanita?" Fatimah r.a. menjawab, "Hendaknya ia tidak dilihat dan melihat laki-laki lain."

-Para sahabat Rasulullah saw. Menutup jendela dan lubang-lubang tembok (dinding) rumahnya agar para wanita tidak mengintai kaum laki-laki. Pernah suatu ketika Mu'az melihat isterinya sedang mengintai lewat jendela, maka ia pun memukulnya.

Dalam teks pertama, dikritisi oleh tim kajian bahwa perkataan Fudail dan Mujahid adalah pendapat pribadi yang bukan merupakan norma atau hukum. Dalam teks selanjutnya tentang memandang, tim pengkaji FK3 memahami bahwa tunjukkan aturan tersebut adalah khusus kepada isteri nabi dan tidak bersifat umum kepada seluruh manusia wanita di muka bumi. Adapun hadis tentang memandang ditemukan merupakan hadis *maudu'*. Selanjutnya, hukum tentang menyentuh yang kemudian melebar kepada berjabat tangan, bagi penulis makna menyentuh adalah bersetubuh, bukan sekedar menyentuh. Jadi, walaupun hadis tentang menyentuh itu sahih, ia tidak bisa dijadikan dalil tentang berjabat tangan. Tim pengkaji melengkapi uraiannya dengan melacak sumber-sumber teks pengarang, kemudian diberikan pendapat al-Qaradawi yang tidak menyetujui keharaman berjabat tangan. Selain itu diberikan juga informasi bahwa Nabi sendiri pernah berjabat tangan dengan seorang wanita yaitu wanita budak, yang bertujuan untuk penghargaan dan tidak menyakiti hati wanita serta keluhuran budi Rasulullah. Berikutnya, semua hadis yang dikutip selanjutnya adalah hadis *da'if* kecuali hadis tentang fitnah. Adapun hadis tentang fitnah, walaupun diakui sebagai hadis hasan akan tetapi tim pengkaji menguraikan secara kritis makna dan penafsiran dari kata 'fitnah' dalam hadis tersebut hingga tidak memunculkan mindset yang bias jender.

Diuraikan oleh tim pentelaah bahwa fitnah dalam bahasa Arab adalah cobaan dan ujian. Kata ini tidak selalu mengandung arti negatif

karena cobaan bisa berkaitan dengan hal-hal buruk dan hal-hal baik. Seperti firman Allah :

"...Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah (cobaan) dan kepada Kami lah kamu akan kembali (QS. 21:35).

Begitu juga kata fitnah bisa digunakan secara timbal balik, dalam al-Qur'an disebutkan Rasul merupakan fitnah umatnya dan umatnya merupakan fitnah bagi rasul. (QS. Al-Dukhkhan 17). Orang-orang mukmin adalah juga fitnah bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir adalah fitnah bagi orang-orang mukmin (QS.al-Mumtahanah : 5).¹⁶ Kesimpulannya, segala sesuatu yang ada di bumi ini, baik harta, anak, kekasih, suami, istri, orang tua, tetangga, semuanya bisa menjadi fitnah satu bagi yang lain. Yang hendak digarisbawahi adalah bahwa latar belakang dan kepentingan patriarkis terlibat dalam membaca satu teks bahwa perempuan dapat menjadi fitnah bagi suami, hingga memunculkan formulasi stereotipe tertentu. Seharusnya teks hadis itu dibaca dalam *mindset* kesetaraan bahwa perempuan bisa menjadi fitnah bagi suami sebagaimana suami juga akan menjadi fitnah bagi istri bila kedua suami istri tidak bisa menjaga hubungan baik dan menjalin komunikasi yang efektif.

B. Permasalahan Keadilan Jender Dalam Norma Islam

Bagaimana persoalan gender dalam perspektif Islam yang merupakan norma ideal Islam dan menjadi nilai dasar Islam yang sebenarnya tentang hubungan relasi laki-laki dan perempuan dalam

¹⁶ Sinta Nuriyah dkk., *Wajah Baru Relasi Suami Istri...*, hal. 151

konteks kehidupan rumah tangga, sosial, publik di berbagai bidangnya.

Seperti dikemukakan oleh Ruhayatin, ketika isu feminisme menguasai tidak ada satu pun bagian sistem kehidupan masyarakat yang tidak tersentuh untuk dibongkar atau didekonstruksikan.¹⁷ Begitu juga agama. Bahkan, tidak ada agama yang lolos dari problem jender, yang dapat dilihat di hampir seluruh belahan dunia, mulai dari negara yang dipandang terbelakang sampai negara yang merasa paling maju dan modern dan berpendidikan. Tidak terkecuali Islam dan Islam di Indonesia.

Secara prinsipil dan normatif Islam menghargai dan memberdayakan kaum perempuan. Namun, seperti dideskripsikan pada bagian awal bab ini, dalam masyarakat terjadi konstruksi jender yang mengakibatkan perempuan didiskriminasi. Untuk itu perlu upaya menegakkan keadilan jender dengan merekonstruksi hubungan gender yang adil dan memberdayakan. Menurut Mansour Fakihi¹⁸ ada dua agenda yang mendesak dilakukan pertama, melawan hegemoni yang merendahkan perempuan dengan melakukan dekonstruksi terhadap tafsiran agama yang merendahkan kaum perempuan yang justru seringkali menggunakan dalil-dalil agama. Ini berarti mempertanyakan segala bentuk ketidakadilan terhadap perempuan dari tingkat keluarga hingga tingkat negara. Termasuk dalam gerakan ini adalah memberikan critical education atau kegiatan apa saja yang

¹⁷ Siti Ruhayani Zuhayatin M.A., "Gender Dalam Perspektif Islam-studi terhadap hal-hal yang menguatkan dan melemahkan Gender dalam Islam" dalam *Membicang Feminisme*, (ed.). Mansour Fakihi (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 235.

¹⁸ Mansour Fakihi, "Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam....", hal. 64-65

akan membantu perempuan untuk memahami pengalaman mereka dan menolak ideologi yang dipaksakan kepada mereka. Kedua, diperlukan kajian kritis untuk mengakhiri bias dan dominasi laki-laki dalam penafsiran agama. Hal ini harus dalam suatu proses kolektif yang mengkombinasikan studi, investigasi, analisa sosial, pendidikan serta aksi advokasi untuk membahas isu perempuan.

Berikut beberapa analisa teoritis yang berasal dari beberapa sarjana yang diarahkan kepada upaya kedua di atas merumuskan nilai Islam tentang kedudukan perempuan dan laki-laki dengan perspektif keadilan gender.

Dalam uraian Achmad Satori, minimal ada 8 jurus yang dilakukan Islam untuk mengangkat harkat perempuan :¹⁹

Pertama, Al-Qur'an menegaskan kemanusiaan perempuan dan kesejajarannya dengan kemanusiaan laki-laki. Untuk ini beliau mengajukan Qur'an surat al-Hujurat 13.

Kedua, Kesejajaran dengan laki-laki dari segi unsur penciptaan tanah dan dari jiwa yang satu (QS. al-A'raf 189)

Ketiga, Kesejajaran dengan laki-laki dari segi proses penciptaan dan fase pembentukan janin (QS. al-Qiyamah 37-39)

Keempat, Kesejajaran dengan laki-laki dalam hal mendapat balasan kebahagiaan dengan syarat yang sama yaitu pengabdian dan kesalehan (QS. al-Nahl 97)

Kelima, Kesejajaran dalam nilai amal (QS. Ali Imran 195)

¹⁹ Dr. Ahmad Satori Ismail, "Fiqh Perempuan dan Feminisme" dalam *Membicang Feminisme*, (ed.). Mansour Fakh (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 235.

Keenam, Ditempatkan sebagai partner yang sebanding dengan laki-laki dalam perjalanan hidup (QS. al-Nisa 124)

Ketujuh, Pengakuan akan eksistensi kesatuannya dengan laki-laki dan ditempatkan dalam posisi satu, yang termanifestasi dalam sejumlah kata al-Qur'an yang di dalamnya mencakup laki-laki dan perempuan. Misalnya Ya ayyuhannas, Ya bani Adam, Ya ayyuhallzina amanuu.

Kedelapan, Rasulullah saw. memberikan perhatian lebih banyak kepada anak perempuan.

Dengan pesan yang sama tetapi redaksi yang berbeda, Chuzaemah Tango juga mengajukan ide dasar Islam tentang persamaan derajat laki-laki dan perempuan. Chuzaemah menyebut poin 1 dan 4 di atas dengan persamaan dari segi pengabdian (QS. al-Hujurat dan al-Nahl 97). Chuzaemah menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak masuk surga, sama diperbolehkan berpartisipasi dan berlomba melakukan kebajikan, mengabdikan kepada masyarakat. Chuzaemah menambahkan kesamaan perempuan dan laki-laki dalam pengujian dan mendapat godaan. (QS. al-A'raf 20). Jadi bukan perempuan yang digoda dan diperalat setan, yang menyebabkan Adam terusir dari surga. Konsekuensinya, tidak benar tuduhan bahwa perempuanlah sebagai sumber dari segala bencana. Malah dalam surat Taha ayat 120 diterangkan bahwa setan membisikkan pikiran jahat kepada Adam. Bukti kesetaraan lainnya adalah dari segi kepengurusan dan kepemilikan harta (al-Nisa 32), dari segi sama-sama mendapat warisan (al-Nisa 7), dan persamaan hukum dalam perceraian (al-Maidah 38). Ajaran kesetaraan ini harus pula

dipahami dari ayat tentang perzinahan (QS. al-Nur 2), tentang olok-olok (QS. al-Hujurat 11), tentang pergaulan suami istri (QS. al-Baqarah 187), dan tentang menahan pandangan (QS. al-Nur 30-31).²⁰ Jadi secara prinsipal, tuntunan al-Qur'an terhadap perempuan pada dasarnya sama dengan tuntutan terhadap laki-laki. Ayat-ayat yang secara redaksional tertuju kepada laki-laki pada hakikatnya tertuju juga kepada perempuan, kecuali jika ada indikator yang menunjukkan hal tersebut tertuju kepada laki-laki.²¹

Adapun hak-hak perempuan dalam uraian Chuzemah adalah :

- Hak untuk menerima mahar (QS. al-Nisa: 4). Mahar ini adalah pemberian wajib dalam arti tidak disertai dengan harapan menerima imbalan apa pun atau mengharapkannya kembali, kecuali dalam keadaan diberikan sukarela oleh si istri. Mahar ini adalah pemberian sebagai bukti cinta dan ikatan kekerabatan dan kasih sayang. Artinya, chuzaemah hendak menyatakan bahwa mahar bukan pemberian sebagai harga dari diri perempuan dan menjadi penebus dirinya untuk dikuasai suami. Jadi, tidak ada indikasi apapun bahwa mahar adalah untuk merendahkan perempuan dan meletakkan perempuan menjadi di bawah suami.
- Hak perempuan mendapat nafkah (QS. al-Baqarah 233). Adalah kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Tentu saja kewajiban itu sesuai kemampuan

²⁰ Chuzamamah T. Yanggo, "Pandangan Islam Tentang Gender" dalam *Membicang Feminisme*, (ed.). Mansour Fakh (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 152-158

²¹ Chuzamamah T. Yanggo, "Pandangan Islam Tentang Gender", hal. 158

suami. Walaupun nafkah rumah tangga dibebankan kepada suami tetapi Islam tidak melarang istri untuk membantu suami dalam mencari nafkah dengan izin suaminya dan tidak mengganggu pelaksanaan kewajibannya sebagai seorang ibu serta tidak mendatangkan hal yang negatif bagi diri, keluarga, masyarakat dan agamanya.²²

Keterangan Chuzaemah ini sepertinya menjadi isyarat bagi beban ganda. Akan tetapi harus dipahami logikanya bahwa dikarenakan bukan merupakan kewajiban maka bekerja mencari nafkah oleh istri adalah dengan kondisi tidak mengganggu sistem operasional kehidupan keluarga. Maka, bila bantuan istri untuk menghidupi ekonomi keluarga mutlak dibutuhkan suami, tentunya harus ada tinjauan ulang dalam hal pembagian kerja dalam keluarga. Tentunya, hal ini sangat tergantung dari kesepakatan kedua pihak, kelapangan hati mencari solusi dan kemampuan manajemen dari keduanya.

Dijelaskannya lebih lanjut bahwa kebolehan menafkahi suami ini dianalogikan kepada kebolehan memakan sebagian mahar atas kerelaan istri (QS. al-Nisa: 4). Selain itu, masalah ini bisa diacu kepada nilai tolong menolong dan bantu membantu untuk mengerjakan kebaikan (QS. al-Maidah: 2). Kalau suami istri dapat saling mewarisi setelah meninggal, mengapa pula si suami tidak harus dibantu untuk mendapatkan kenyamanan hidup bersama, apalagi kalau suami susah mendapat penghasilan. Karenanya, menafkahi keluarga

²² Chuzaemah T. Yanggo, "Pandangan Islam Tentang Gender", hal. 160

tidak bertentangan dengan ajaran al-Quran. Dapat disimpulkan bahwa Islam sama sekali tidak menghendaki beban ganda di pihak istri. Karena nilai dasarnya adalah bahwa pekerjaannya tersebut untuk menolong. Kaidah dasar hukum Islam adalah sesuatu yang baik tidak bisa dilakukan dengan cara tidak baik yaitu menyusahkan diri si istri sendiri.

- Hak perempuan mendapat perlakuan baik dan memutuskan perkawinan. Dalam pergaulan hidup berumah tangga, istri berhak mendapat perlakuan yang baik dari suaminya (QS. al-Nisa 19). Perlakuan yang baik tersebut meliputi tingkah laku, tindakan, sopan santun. Istri juga boleh menuntut pembatalan akad nikah dengan jalan *khulu'* bila istri tidak mampu untuk bertahan dengan keburukan suami. Ini merupakan pintu independensi dan kebebasan perempuan untuk berkehendak.
- Hak Perempuan akibat Putusnya Perkawinan. Istri yang diceraikan masih berhak mendapat nafkah selama ia dalam masa 'iddah talak raj'iy atau iddah talak ba'in kalau ia hamil. Juga hak tempat tinggal (QS. al-Talaq 6). Perempuan yang berpisah karena kematian, maka ia berhak mendapat warisan. Adapun perempuan yang ditalak sebelum dicampuri yaitu tidak mempunyai masa iddah, maka berhak mendapat *mut'ah* (pemberian) (QS. al-Baqarah 236, al-Ahzab 49).²³ Menurut pendapat Chuzaemah, warisan istri yang ditinggal mati suami adalah separuh dari bagian suami karena suami yang memberi

²³ Chuzaemah T. Yanggo, "Pandangan Islam Tentang Gender", hal. 163

nafkah (QS. al-Nisa 34). Tetapi, kalau suami istri sama-sama bekerja maka harta perkawinan itu dianggap sebagai harta bersama dan harus dibagi dua.

- Hak perempuan mendapat pengajaran. Perintah untuk menjadi orang yang menggunakan akal, yang menyuruh berpikir, dan menjadi orang yang berilmu tidak hanya ditujukan al-Qur'an kepada laki-laki saja. Di samping itu, al-Qur'an dan hadis sangat menghargai orang yang berilmu dan meleyakkan pengetahuan pada tingkat yang tinggi. Hadis Nabi sangat tegas bahwa *menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim*. Hadis ini sahih, dan kata Muslim di situ mencakup juga Muslimat sesuai kaidah bahasa Arab. Islam tidak melarang pula kaum perempuan memberi pengajaran. Di zaman permulaan Islam, banyak kaum perempuan yang terkenal alim, pandai dan cerdas. Mereka tidak hanya menjabat sebagai guru tetapi juga berkedudukan setaraf mufti dalam urusan keagamaan dan hukum-hukum khususnya hukum terkait perempuan. Para istri Nabi saw dan para sahabat perempuan sepeninggal Nabi saw banyak yang memberikan pengajaran kepada kaum Muslim.²⁴

Akhirnya, nilai dan prinsip dasar Islam, jangankan melarang, melainkan mewajibkan mereka untuk menuntut segala cabang ilmu dan memberikan kebebasan untuk mengajarkan ilmu yang telah dikuasainya.

²⁴ Chuaemah T. Yunggo, "Pandangan Islam Tentang Gender", hal. 164.

Kualitas yang dicita-citakan seorang Muslimat adalah menjadi seorang wanita yang salihat. Kata 'salihat' ini tertera dalam sebuah hadis dan digambarkan Nabi sebagai sesuatu yang berharga yang harus didapatkan oleh seorang laki-laki. Jadi, 'salihat' adalah kata kunci bagi wanita ideal dalam Islam. Akan tetapi hadis tersebut hanya menerangkan konsepsi wanita salihat dalam konteks menjadi istri. Bagaimana sebenarnya wanita salihat secara utuh dalam berbagai dimensi, yang menjadi skema dan sosok seorang Muslimat yang seharusnya. A.M Saefuddin menerangkan karakteristik golongan wanita salihat yaitu dengan menjalankan lima kewajiban yaitu : 1). Kewajiban terhadap *dien* nya (*wajibat al-diniyyah*), 2). Kewajiban terhadap pribadinya (*wajibat syakhsiyyah*), 3). Kewajiban terhadap rumah tangganya (*wajibat baitiyyah*), 4). Kewajiban terhadap masyarakatnya (*wajibat ijtima'iyyah*), 5). Kewajiban terhadap negaranya (*wajibat wataniyyah*).²⁵

1. Kewajiban terhadap agamanya

Kewajiban diniyyah adalah kewajiban yang membuktikan ketinggian Islam. Setidaknya ada tiga hal yang harus ditempuh yaitu memiliki akhlak karimah (karakter mulia), meningkatkan ilmu dan kecerdasan, memperbanyak amal, gerak, dan perjuangan yang baik. Sebab dengan amal saleh itulah seseorang dihormati.

²⁵ Dr. Ir. A. M. Saefuddin, "Kiprah dan Perjuangan Perempuan Salihat", dalam *Membicang Feminisme*, (ed.). Mansour Fakih (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 70-76.

2. Kewajiban terhadap pribadinya

Kewajiban yang harus dipenuhi terhadap diri sendiri agar kualitas pribadinya semakin baik. Hal ini menyangkut aspek jasmani dan rohani. Kewajiban terhadap jasmani antara lain menjaga kebersihan diri, badan, pakaian dan lingkungan. Menjaga kesehatan sebab tugas Muslimat sangat banyak mengasuh anak dan juga aktifitasnya di masyarakat. Kewajiban terhadap ruhani antara lain memiliki akidah yang salimah, membersihkan hati dari sifat-sifat tercela seperti 'ujub, takabur, ghibah, dan menggantinya dengan yang baik-baik yaitu menutup aurat, berbicara yang baik, istiqamah, dan lainnya.

3. Kewajiban terhadap rumah tangganya

Kewajiban ini dilaksanakan dalam fungsi utamanya sebagai istri, ibu dan anggota keluarga besarnya. Sebagai ibu ia harus cerdas manajemen asupan makanan anaknya, mengatur waktu agar anak-anaknya bisa sekolah dengan baik, dan memiliki pengetahuan memadai untuk mengajari anak-anaknya ataupun berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Demikian juga halnya dengan suaminya. Perempuan juga harus memiliki keahlian manajemen emosinya agar ia dapat mengatur suasana rumah yang baik, nyaman, dan tenteram. Tanpa keahlian ini semua perempuan tidak dapat memenuhi perannya sehingga seringkali pembantu mengambil alih perannya. Dengan keahlian itu semua maka roda rumah tangga berputar secara normal dan lancar.

4. Kewajiban terhadap masyarakatnya

Seorang perempuan juga memiliki kewajiban terhadap masyarakatnya. Tidak tepat kalau ada seorang perempuan mengurung diri dalam rumahnya dan tidak mau bermasyarakat dan berperan di dalamnya untuk berbuat kebajikan. Masyarakat membutuhkan perempuan sebagai guru untuk menghasilkan generasi yang salih dan salihat. Begitu juga, masyarakat membutuhkan perempuan menjadi dokter dan bidan untuk memberi pelayanan kesehatan terutama kepada Muslimat yang membutuhkan. Ringkasnya, menurut Saefuddin, kewajiban terhadap masyarakat adalah peran positif yang dimainkan perempuan dalam masyarakat yang bersinergi dengan perannya sebagai ibu dan istri, bukan saling menafikan apalagi saling bertolak belakang. Ayat yang diajukan oleh Saefuddin sebagai dalilnya adalah tentang nilai tolong-menolong dan upaya mencapai rahmat (QS. al-Taubah 71).

5. Kewajiban terhadap negara/tanah air

Sama dengan laki-laki, perempuan juga adalah makhluk manusia yang tentunya hidup di suatu tempat yang dinamakan negara. Saefuddin menerangkan bahwa sejak masa nabi Muhammad saw. perempuan banyak berperan dalam perjuangan mewujudkan negeri yang Islami, pada masa dahulu dalam bentuk peperangan terhadap orang kafir. Tercatat nama-nama seperti Asma' bint Abu Bakar yang membantu Nabi saat perjuangan hijrah ke Madinah. Juga dikenal nama Nusaibah yang terjun ke laga peperangan setelah melihat umat Muslim terdesak ketika berperang waktu itu.

Norma-norma dasar Islam di atas dapat dipastikan kesahihannya dengan merujuk kepada kenyataan visi Islam untuk berpaling meninggalkan, menumbangkan dan mentransformasi masyarakat dan sistem hidup jahiliyyah di seluruh bidangnya. Kasus relasi jender dan kedudukan perempuan termasuk salah satu dobrakan yang dilakukan Islam terhadap situasi jahiliyyah di lingkungan mana Islam ditumbuhkan.²⁶ Beberapa tradisi jahiliyyah yang dilenyapkan Islam dengan cita-cita sosial yang tinggi dan revolusioner antara lain tradisi membunuh dan mengubur anak perempuan. Islam secara frontal menentang tradisi ini dan bermaksud menghancurkan pemikiran yang mendasarinya yaitu bahwa melahirkan bayi perempuan adalah aib dan memalukan.²⁷ Tradisi lain adalah mewarisi perempuan yang merupakan istri-istri ayah atau istri anak, yang mencerminkan persepsi bahwa perempuan adalah benda tak berkehendak atau bahwa perempuan diharuskan tunduk mutlak kepada laki-laki. Dengan kedudukannya sebagai benda dan dapat dimiliki maka kepemilikan dirinya praktis juga adalah kepemilikan hartanya. Islam lalu dengan tegas mengharamkan praktik ini dan selanjutnya membentengi anak-anak yatim yang sebelumnya selalu menjadi incaran untuk dikuasai hartanya melalui penguasaan diri mereka melalui perkawinan.²⁸ Al-Qur'an melarang untuk memakan

²⁶ Syu'bah Asa, "Perempuan : Di Dalam dan di Luar Fikih" dalam *Membicang Feminisme*, (ed.). Mansour Fakihi (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 103

²⁷ QS. 81:8, 9:16, 58:59

²⁸ QS. 4:19, 4:2,3

harta anak yatim dan melarang suami menganggap harta anak yatim yang mereka kawini sebagai harta mereka.

Revolusi lainnya yang ditampilkan Islam adalah memberikan perempuan hak untuk mewarisi, sesuatu yang tidak pernah dimiliki perempuan Arab sebelumnya bahkan perempuan di berbagai belahan dunia Eropa (QS. 4:7). Islam memainkan perannya untuk tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam prinsip hak waris.²⁹ Selanjutnya, al-Qur'an menggeser urusan perkawinan dari semata-mata urusan orangtua atau walinya menjadi urusan si pengantin sendiri. Perempuan diberikan mahar dan itu menjadi milik pribadinya yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapa saja dan tidak boleh diminta kembali oleh suami. Bahkan, walaupun perempuan calon pengantin tersebut seorang budak. Sebelumnya, mahar adalah dalam kekuasaan wali sebegitu rupa hingga memungkinkan munculnya tradisi perkawinan *syigar*.³⁰

Kalau Islam pada masa belasan abad lalu telah disiapkan untuk mengangkat perempuan dari lumpur kehinaan ke tempat terhormat, apa dan bagaimana persepsi yang telah tertanam dalam masyarakat sehingga perempuan di zaman secanggih dan secerdas ini kembali menghunjamkan dirinya ke dalam lumpur dengan praktik-praktik "mengkaryakan" istri untuk memperoleh harta atau menyuruh istri tidur bersama seorang tokoh untuk memperoleh bibit unggul, yang juga terjadi dalam masyarakat di negeri ini.

²⁹ Syu'bah Asa, "Perempuan : Di Dalam dan di Luar Fikih", hal. 105

³⁰ Syu'bah Asa, "Perempuan : Di Dalam dan di Luar Fikih", hal. 105-106

Untuk merangkum nilai dan norma Islam berkenaan dengan kedudukan perempuan dan relasi jender perempuan dan laki-laki, akan dikemukakan sendi-sendi dari syariat Islam yaitu :³¹

- (1). Mengangkat kesulitan. Allah Yang Maha Rahman dan Maha Rahim menghendaki kemudahan bagi manusia. Pesan ini tercermin dalam seluruh aturan hukum beribadat, muamalat, dan uqubat
- (2). Menciptakan maslahat seluruh manusia secara merata, bukan untuk laki-laki saja. Al-Qur'an diturunkan sebagai *rahmatan lil 'alamin* dan Rasulullah diutus untuk seluruh manusia. Al-Qaradawi menyebut sendi ini dengan 'al-insaniyyah al-'amaliyyah'.
- (3). Menciptakan keadilan bagi seluruh manusia. Islam menjelaskan hak-hak individu dan sosial, serta berusaha untuk melindungi hak-hak tersebut pada pemiliknya sehingga semua manusia merasa aman, jiwa, harta, dan semua haknya.
- (4). Syariat Islam menggabungkan antara orisinalitas dan elastisitas. Syariat Islam dalam hal-hal pokok dan sasaran tetap dan tidak berubah, sedangkan dalam hal-hal cabang dan wasilah bersifat elastis. Dengan elastisitas inilah syariat Islam mampu diaplikasikan kapan dan di mana saja.

Dengan rumusan norma Islam dan sendi syariat di atas, seharusnya Islam akan terjauh dari hiruk pikuk problem penindasan, ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Nilai Islam dalam masalah relasi jender adalah egaliter dan aktualisasi diri. Hukum-hukum Islam yang terkristal dalam fikih, yang dihasilkan dari

³¹ Dr. Yusuf al-Qaradawi, *Syari'at al-Islam* (Kairo : Dar Shafwah, 1985), 19-30.

syariat egaliter, pada hakikatnya adalah hukum-hukum yang melindungi, mensejahterakan, memberi keadilan dan membawa kebahagiaan bagi semua makhluk. Misalnya tentang perkawinan saja, dalam konsep fikih bukan suatu perpaduan dua insan 'menjadi satu' – karena itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Perkawinan adalah hubungan cinta yang diikat oleh kontrak, masing-masing dari suami istri itu memiliki dirinya sendiri-sendiri dan merupakan kesatuan yang tutup menutupi sepanjang kontrak masih berlaku. Dalam rumah tangga seperti itu, seorang istri adalah otonom dan sekaligus dilindungi, minimal dalam arti segala biaya hidupnya. Aturan bahwa hak suami dan istri diakui secara mandiri hingga memungkinkan keduanya untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan harta masing-masing adalah merupakan pemikiran yang aktual dan modern.³² Demikian fakta revolusi yang dilakukan Islam terkait nasib perempuan.

Lantas, bagaimana pendapat-pendapat yang dihasilkan para ulama, yang terkristal dalam fikih, menempatkan perempuan, merespons keberadaan dan eksistensi perempuan, dan menjawab kebutuhan perlindungan dan aktualisasi diri perempuan serta mengatur kehidupan keberagamaan dan sosial kaum perempuan.

Berikut adalah gambaran perempuan dan relasi gender dalam pendapat-pendapat fikih ulama mazhab, yang dipermasalahkan kelompok feminis.

1. Makhluk Domestik

³² Syu'bah Asa, "Perempuan : Di Dalam dan di Luar Fikih", hal. 109-110

Pendapat fikih umumnya memang tidak punya gambaran tentang seorang perempuan bekerja. Fikih juga tidak memperkenankan seorang istri pergi kemana pun tanpa izin suami, termasuk untuk salat jamaah di mesjid. Dan bila akhirnya harus keluar, ia mesti disertai seorang *mahram*. Pelanggaran atas kewajiban izin dapat dipandang sebagai *nusyuz* (tidak taat). Sementara *nusyuz* dapat mengakibatkan hilang hak nafkah.³³

Setelah itu, para ulama membincang kondisi-kondisi yang membolehkan istri keluar rumah tanpa izin suami. Artinya kondisi ini adalah suatu pengecualian atau sebagai kondisi darurat dan bukan hukum dasar. Misalnya, jika nyawanya akan terancam seperti keadaan rumahnya akan roboh, terancam penjahat atau maling yang masuk ke rumahnya, mengurus haknya di peradilan, belajar ilmu-ilmu fardu 'ain untuk *istifta'* karena suaminya bodoh, atau berdagang untuk keperluan hidupnya karena suami tidak menafkahi.³⁴ Selain untuk keperluan pribadi, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa istri boleh keluar rumah untuk keperluan kifayah, seperti seorang bidan yang akan menolong orang, atau untuk memandikan mayat.³⁵ Tapi secara umum, para ulama selalu mengkaitkan dengan pemenuhan nafkah oleh suami sebagai alasan untuk keluar rumah. Begitu fundamentalnya kondisi

³³ Syu'bah Asa, "Perempuan : Di Dalam dan di Luar Fikih", hal. 110-112; KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan – Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, pengantar KH. MA. Sahal Mahfud (Jokjakarta : LkiS dan Rahima, 2002), hal. 127-128.

³⁴ KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hal. 128. Lihat juga Abu Bakar Syatha, *I' anat al-Talibin*, juz IV, hal. 80-81.

³⁵ Muhammad Abu Zahrah, *al-Akhwat al-Syakhsiyyah* (Beirut: Dar al-Fikri, tt), hal. 239

ini, sebagian ulama malah membolehkannya sebagai dasar *fasakh* (pembatalan) perkawinan.³⁶

Pertanyaan yang telah diajukan dalam persoalan ini untuk mencari pemikiran dan rumusan kesimpulan alternatif adalah tentang apa sebenarnya dasar pertimbangan yang membuat laki-laki menjadi pemimpin, apa kualifikasi laki-laki hingga diangkat sebagai pemimpin, kenapa laki-laki yang wajib dan diwajibkan memberi nafkah.

2. Batas Aurat Perempuan

Kata *aurat* dalam al-Qur'an dapat bermakna pertama, celah yang terbuka terhadap musuh atau celah yang memungkinkan orang mengambil kesempatan untuk menyerang (QS. 33:13). Kedua, sesuatu dari anggota tubuh manusia yang membuat malu bila dipandang atau dipandang buruk bila diperlihatkan (QS. 24: 31,58). Yang dimaksud di sini adalah makna kedua dan khusus kepada tubuh perempuan. Makna buruk termasuk buruk majazi yaitu bisa menimbulkan fitnah seksual. Dalam fikih, semua imam mazhab berpendapat bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Bahkan, seluruh tubuh tanpa kecuali termasuk muka, tapak tangan dan juga telapak kaki bagi mazhab Hambali.

Semua pendapat fikih tentang aurat perempuan merujuk kepada ayat 31 surat al-Nur. Mereka hanya berbeda pendapat tentang kata *illa ma zahara minha*. Kalimat ini sangat terbuka untuk dipahami secara berbeda. Ada beberapa hadis yang kemudian dipakai untuk

³⁶ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, juz VII, hal. 573

memahami, menjelaskan lebih lanjut, atau dipandang mengecualikan kalimat ayat di atas. Permasalahannya, hadis-hadis tersebut sangat beragam penilaian kesahihannya. Bahkan, hadis dimana Nabi tampaknya tegas menerangkan bahwa yang boleh nampak adalah ini dan ini (muka dan telapak tangan), ternyata juga ada yang menilai sebagai hadis mursal dan salah seorang perawinya tidak diketahui. Jadi, yang perlu diputuskan oleh ulama adalah apa sebenarnya ide dasar dari perintah ini.

Hal yang menarik lagi untuk dijadikan wacana pendapat alternatif adalah bahwa ulama fikih mengembangkan dua hukum untuk batas aurat ini dan membaginya kepada perempuan merdeka dan tidak merdeka. Batas aurat yang diberikan kepada kelompok kedua lebih terbuka dan luas. Pertimbangannya, karena mereka banyak mengerjakan pekerjaan yang menuntut untuk lincah dan sigap dan keluar masuk pasar sehingga akan 'merepotkan. Jadi, jelas sekali ada pertimbangan terkait status sosial dan fungsi sosial perempuan dalam masyarakat dalam menetapkan batas aurat. Begitu juga, illat-illat seperti 'yang biasa tampak', 'yang memalukan', 'aib' dan keadaan 'sopan dan wajar' adalah bukan terminologi agama, melainkan terminologi sosial budaya yang dapat dan relatif berbeda dari satu tempat ke tempat lain.³⁷

³⁷ KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hal. 60-64

3. Masalah Kepemimpinan Dalam Ibadah

• Salat

Fikih juga tidak memberi ruang untuk perempuan menjadi imam. Bahkan, sebagian pendapat, untuk menjadi makmum dalam jamaah laki-laki terutama bagi para wanita muda. Bahkan, juga sebagian pendapat, untuk menjadi imam bagi jamaah perempuan.³⁸ Bagaimanapun mayoritas, dalam fikih selalu ada pendapat yang berbeda. Dan ternyata, untuk kasus imam salat beberapa ulama mujtahid dan terpercaya justru membedakan diri. Mereka ini seperti Abu Tsaur, Ibn Jarir al-Tabari, Imam Muzani menyatakan keabsahan perempuan menjadi imam salat tanpa mengkualifikasi apakah makmumnya laki-laki atau perempuan. Wahbah Zuhaili me-record ulang pendapat ulama-ulama fikih klasik tentang kemutlakan tidak bolehnya perempuan menjadi imam.³⁹ Sementara al-San'ani menjadi referensi mutakhir pendapat klasik bahwa perempuan boleh menjadi imam salat bagi laki-laki tetapi laki-laki yang sudah tua atau laki-laki muda tetapi berstatus hamba sahaya.⁴⁰

Ketentuan fikih ini memiliki dampak dan substansi persoalan jender yang luas dan dalam. Pertanyaan yang bisa diajukan adalah apa alasan paling mendasar bagi pendapat yang tidak membolehkan perempuan jadi imam. Bahwa adanya pendapat yang berbeda,

³⁸ Imam al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, juz IV (Jeddah : Maktabah al-Irsyad, tt), hal. 125-126

³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz II (Damaskus : Dar al-Fikr, 1997), hal. 1194

⁴⁰ Muhammad bin Isma'il ash-Shan'ani, *Subul as-Salam*, juz II (Beirut : Dar Ihya, al-Turats al-'Arabi, 1379), hal. 28

bagaimanapun itu minornya, membuka argumentasi kemungkinan pendapat ini untuk dipertanyakan keabsahan dalilnya, lalu kebenaran kesimpulan, dan paling akhir rasionalitasnya. Penelusuran sumber membuktikan bahwa dalil pendapat yang membolehkan perempuan menjadi imam lebih kuat dan lebih sahih sanadnya dari pada yang tidak membolehkan. Adapun hadis yang sangat populer (*jangan sekali-kali perempuan menjadi imam bagi laki-laki, orang Arab Badui bagi orang muhajir, orang jahat bagi orang mukmin*. HR. Ibn Majah)⁴¹ ternyata ditelusuri adalah hadis *daif*.

Alternatif pendapat bisa juga muncul dengan mempertanyakan apa alasan /pesan paling hakiki di balik hadis larangan tersebut. Tentu saja, ada kelompok yang tidak setuju untuk mempertanyakan alasan-alasan dibalik hukum sesuatu. Apalagi terkait hukum ibadah yang menurut mereka harus diterima secara ta'abbudi. Namun, pendapat ini mungkin untuk dibantah karena banyak hukum-hukum ibadah dalam al-Qur'an yang memiliki penjelasan maksud-maksud rasionalnya. Dari penelusuran mendalam teks-teks para ulama akan diketahui bahwa alasan utama pelarangan tersebut adalah dikarenakan kekhawatiran akan fitnah. Kalau memang ketakutan akan fitnah yang menjadi pertimbangan, tentunya terbuka pula kemungkinan-kemungkinan untuk mencari alternatif solusi, sehingga bila keadaan atau kondisi yang menjadi 'illat hukum berubah maka hukumnya juga akan berubah, sesuai kaidah *al-hukm yaduru ma'a 'illatihi*.

⁴¹ KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hal. 32-33

4. Kepemimpinan Sosial Politik

Dalam pengertian yang umum untuk tugas *amar ma'ruf nahi munkar*, para ahli fikih tidak mengingkari tugas ini wajib kepada perempuan dan laki-laki. Akan tetapi, untuk hal-hal yang bersifat partikular, untuk kedudukan tertentu, apalagi untuk posisi mengambil keputusan yang mengikat (*al-wilayah al-mulzimah*) atau kekuasaan besar yang bersifat publik (*al-wilayah al-uzma*), perempuan tidak sama dengan laki-laki. Sebagai simpul dari semua diskusi dan perdebatan yang berabad-abad tentang kebolehan perempuan menjadi pemimpin dalam urusan publik salah satunya adalah fatwa yang dikeluarkan universitas al-Azhar.

"Syariat Islam melarang kaum perempuan menduduki jabatan-jabatanyang meliputi kekuasaan-kekuasaan umum (publik). Yang dimaksud kekuasaan umum dalam fatwa di atas adalah kekuasaan memutuskan/memaksa (*al-sultah al-mulzimah*) dalam urusan kemasyarakatan (*al-Jama'ah*), seperti kekuasaan membuat Undang-Undang (legislatif), kekuasaan kehakiman (yudikatif), dan kekuasaan melaksanakan Undang-Undang (eksekutif)."⁴²

Artinya, ranah fikih masih belum berubah sejak zaman awal, malah dapat dikatakan lebih ketat, tentang kepemimpinan perempuan, apalagi untuk jabatan presiden. Hal ini bisa dilihat dari skema berikut

43

⁴² Lajnat al-Fatwa bi al-Azhar, "Hukum al-Syariah al-Islamiyah fi Isytirak al-Mar'ah fi al-Intikhab li al-Barlaman", dalam *al-Harakah an-Nisa'iyah wa Shilatuha bi al-Isti'mar* (Kairo: ----, 1952) hal. 101

⁴³ Dirangkum dari KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hal 141-144; dan Hartono A. Jaiz, *blogsala fi*/posted 12/2007/kepemimpinan perempuan.

THE SCHOLARS	KEKUASAAN KEHAKIMAN (JUDICATURE POWER) (WILAYAT AL-QADA)
1. Malik bin Anas, al-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, al-Mawardi	A man is a must, women is totally excluded.
2. Ulama Mazhab Hanafi dan Ibn Hazm al-Zahiri	A man is not absolute requirement, women has chances. However, the jurisdiction doesn't go that far to big crimes. (<i>hudud and qisash</i>).
3. Ibn Jarir al-Tabari, Hasan al-Basri	Women deliberately can function as Judge in all kinds of cases, private and public. Since women is allowed to be a legal expert (mufti), she has right to be a judge (qadi)

THE SCHOLARS	KEKUASAAN LEGISLATIF (LEGISLATIVE POWER) + EXECUTIVE
1. Mazhab Syafi'i, al-Mawardi, Abu Ya'la al-Farra, al-Maududi.	Even to be prime minister and minister, women is excluded, not to say to be a president or the body above it.
2. Sa'id Ramadan al-Buthi	Women can be allowed to be the member of Parliament. This is because Parliament is an assembly to reach consensus concerning people affairs (body of syura). It can be analogized with the body of mufti in the sense it is dealing with conveying opinion regarding community affairs
3. All fuqaha and Qur'anic Commentator in classical era; Syah Waliyullah al-Dihlawi, Fakhruddin al-Razi, Zamakhsari, At-Tabathaba'i, al-Qurtubi, Ibn Katsir, Muhammad 'Abduh, M. Tahir bin 'Asyur, al-Hijazi.	Women cannot become a President (<i>imam al-uzma</i>) and Governor (<i>wilayah al-balad</i>). This task and function demand a competency related to the intellectual capability and emotional maturity. Men is exceed women in intellect and emotion.

Sampai hari ini, belum ada diketahui pendapat ahli fikih terkemuka yang membenarkan perempuan menjabat sebagai kepala negara. Syah Waliyullah al-Dihlawi menyatakan bahwa syarat-syarat seorang khalifah berakal, baligh, merdeka, laki-laki, pemberani, cerdas, dst, semua ini telah disepakati oleh seluruh umat manusia di mana pun dan sampai kapan pun.⁴⁴

Bagaimana celah alternatif pendapat dapat diajukan adalah dengan mempertanyakan referensi dalil dari semua pendapat tersebut. Membaca teks-teks tentang persoalan ini akan diketahui bahwa argumen para ahli fikih pertama-tama dan yang paling akurat adalah mengacu kepada ayat al-Qur'an surat al-Nisa 34, bahwa laki-laki adalah *qawwam* atas perempuan. Logika yang diberikan selanjutnya adalah bahwa yang menempatkan laki-laki sebagai *qawwam* adalah dikarenakan keunggulan akal dan fisiknya. Tidak hanya itu, mereka menetapkan bahwa kelebihan ini kelebihan-kelebihan ini merupakan pemberian Tuhan, sesuatu yang fitri, alami dan kodrati.

Argumen yang diberikan tentunya adalah argumen realitas karena hukum Islam juga sangat tegas mempertimbangkan kenyataan dan realitas kemaslahatan. Tafsiran para ahli fikih umumnya telah terbantahkan oleh fakta-fakta sejumlah perempuan yang lebih cerdas dan dapat memimpin suatu negara. Dalam kondisi ini maka yang benar adalah memahami ayat tersebut dalam kerangka sosiologis dan kontekstual. Penempatan perempuan secara subordinate dan menolak bahkan menafikan perempuan dari profesi pemimpin publik sungguh

⁴⁴ Syah Waliyullah al-Dihlawi, *Hujjat al-Balighah* (Beirut : Dar al-Ma'rifah, tt), juz II, hal. 149

hasil dari bangunan masyarakat dan produk peradaban yang dikuasai laki-laki. Adapun al-Qur'an, ayat-ayatnya yang kasuistik dan individual tidak akan bisa mengalahkan esensi ajaran dan misi substansialnya, terutama yang menyangkut aspek kemasyarakatan dan publik, yaitu kemaslahatan. Dalam kepemimpinan publik, untuk situasi dan konteks masyarakat era teknologi informasi dan globalisasi ini, unsur kemaslahatannya adalah intelektualitas dan elektabilitas. Dengan illat ini maka hukum yang harus muncul adalah yang lahir dari dialektika empiris dan menyahuti kebutuhan realitas, sesuai kaidah fikih *al-hukm yaduru ma'a 'illatihi wujudan wa adaman; la yunkaru tagayyur al-ahkam bi tagayyur al-ahwal wa al-azminah*.⁴⁵

5. Mu'asyarah bi al-Ma'ruf

Ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan soal perkawinan dan hal-hal yang berhubungan dengannya, seperti relasi seksual, pemberian nafkah, penyusuan, perceraian, dan sebagainya selalu dikaitkan dengan kalimat *al-ma'ruf*. Kedua kata ini dipergunakan untuk menunjuk pergaulan antara dua pihak, suami dan istri, dalam rumah tangga, wa *'asyiruhunna bil ma'ruf* (QS. al-Nisa' 19). *al-Ma'ruf* artinya hal-hal yang oleh dalil-dalil agama dikenal sebagai sesuatu yang baik, apakah yang terjadi dalam adat istiadat atau budaya maupun lainnya. Maka, *mu'asyarah bil Ma'ruf* dalam perkawinan adalah pergaulan, pertemanan, perkerabatan yang dibangun secara bersama-sama dengan cara-cara yang baik yang sesuai tradisi dan

⁴⁵ KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hal. 150-151.

situasi masyarakatnya masing-masing, tetapi tidak bertentangan dengan norma-norma agama, akal sehat, dan fitrah manusia.⁴⁶

Mu'asyarah bil-Ma'ruf dalam perkawinan berarti perkawinan itu adalah yang terpenuhi hak-hak dan kewajiban satu dengan lainnya tetapi dengan cara-cara pemenuhan yang penuh kerelaan dan keridaan dari satu pihak terhadap yang lainnya. Hak-Hak dan Kewajiban ini dapat dikategorikan kepada dua yaitu bidang ekonomi dan non-ekonomi. Hak dan Kewajiban ekonomi yaitu Mahar dan Nafkah, yang non-ekonomi yaitu relasi seksual dan relasi kemanusiaan. Tentang mahar, pandangan fikih justru telah mengisyaratkan bahwa mahar bukanlah sebagai harga tukar perempuan. Para fuqaha umumnya sepakat bahwa mahar yang baik adalah yang mudah dan ringan, dan melarang pemberian mahar yang berlebihan, walaupun tentunya mereka menolak peremehan dan penafian harga mahar, hingga beberapa ulama menetapkan harga minimal dari mahar. Begitu juga dengan nafkah, para imam mazhab dan fuqaha telah memiliki panduan yang jelas bahwa nafkah adalah menurut kemampuan suami. Perdebatan mungkin terjadi ketika ada kesenjangan mencolok antara keadaan dan gaya hidup suami dan istri.⁴⁷ Tetapi, pesannya sangat jelas bahwa ajaran pemberian mahar dan nafkah tidak mengarah sedikitpun kepada konsekuensi penguasaan istri, karena semua dilakukan dengan pertimbangan realitas kemampuan suami, kerelaan istri dan aspek-aspek non materi.

⁴⁶ KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hal. 107

⁴⁷ KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hal. 106-111

Begitu juga pergaulan dalam aspek relasi seksual. Norma yang digariskan adalah saling memberi dan menerima, pertimbangan kebutuhan kedua belah pihak, tidak saling menyakiti dan tidak mengabaikan aturan agama. Adapun dalam relasi kemanusiaan antara suami istri, maka normanya adalah masing-masing harus berlaku sopan, saling menyenangkan, tidak menyakiti perasaan dan tidak memperlihatkan kebencian.⁴⁸ Tindakan-tindakan ini bisa lebih panjang dan lebih detail, akan tetapi prinsipnya adalah kesepakatan untuk saling berbuat baik dan pengakuan akan kesetaraan dan tidak merendahkan. Dengan kerangka *mu'asyarah bil ma'ruf* maka akan tertutup celah-celah terjadinya tindakan kekerasan rumah tangga dalam berbagai jenisnya yang diajukan para feminis, apakah kekerasan ekonomi, seksual, fisik, atau psikologis.

Indikator perilaku yaitu:

1. Isiri Belajar/keluar rumah
2. Suami Pengambil Keputusan Rumah Tangga
3. Harta Gono-Gono
4. Poligami
5. Perlakuan Terhadap Anak Laki dan Perempuan
6. Waris/Perempuan setengah bagian laki-laki
7. Kepentingan Politik Perempuan

⁴⁸ KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hal. 114-115.

BAB III

TEMUAN PENELITIAN

Data penelitian ini dikumpul melalui angket dan wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperdalam dan memperluas informasi terutama berkenaan alasan-alasan dan dalil keagamaan dari prilaku responden. Adapun angket selain sebagai sumber utama untuk informasi ketersebaran prilaku sensitif jender tertentu, juga untuk mempertegas dan memberikan pola tentang kecenderungan prilaku sensitif jender umat Muslim kota Medan.

Angket terdiri dari 12 indikator dengan 40 pertanyaan. Adapun responden adalah dari kalangan umat Muslim yang berpendidikan minimal S1 dan diidentifikasi melalui jenis karir/profesinya, yaitu terdiri dari kalangan AKADEMIK (DOSEN/MHSW DOKTORAL), PENGUSAHA/WIRASWASTA, PEGAWAI PEMERINTAHAN, (eksekutif, yudikatif, legislatif), PARTAI POLITIK/NGO, ULAMA/PENCERAMAH.

Indikator prilaku yaitu :

1. Istri Bekerja/keluar rumah
2. Suami Pengambil Keputusan Rumah Tangga
3. Harta Gono-Gini
4. Poligami
5. Perlakuan Terhadap Anak Laki dan Perempuan
6. Waris/Perempuan setengah bagian laki-laki
7. Kepemimpinan Politik Perempuan.;;
8. Keadilan Hukum

9. Keadilan Dalam Dunia Kerja

10. Anggaran Publik Pemerintah

11. Atribut Nama Suami

12. Gambaran Diri Laki dan Perempuan

13. Melaporkan kekerasan rumah tangga

Pengumpulan data dilakukan dengan metode publik survei dengan observasi tak langsung. Dengan menggunakan teknik sampling Purposive, penelitian ini menjangkau 500 responden angket, yaitu 100 responden untuk setiap jenis profesi dan 10 orang responden interview. Pencarian data dilakukan selama satu bulan dari tanggal 20 September-20 Oktober 2013. Penelitian ini mengukur perilaku pada tingkat melakukan atau tidak melakukan. Akan tetapi dalam menggali dan mengeksplorasi informasi, pertanyaan-pertanyaan juga dimulai dan menyentuh sisi-sisi pemahaman dan sikap responden. Karena itu penelitian ini juga mengaplikasikan teori pengukuran makna kata dan teknik beda semantik menurut OSGOOD, SUCI, dan TANNENBAUM.¹ Teknik ini telah dipakai dalam sejumlah riset yang kredibel lainnya karena dianggap mampu mengeksplorasi sikap keagamaan responden terhadap tema riset.² Pasangan kata sifat yang dipilih adalah baik-buruk, pantas-tidak pantas, terpuji-terhina, pasti-tidak pasti, menyenangkan-tidak menyenangkan. Untuk menyatakan kelakuan dan tindakan responden digunakan ekspresi pengakuan, ya –

¹ Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1995), edisi 2, lihat halaman 168-175 untuk skala diferensi semantik.

² Penelitian "Sikap Keagamaan yang Berkeadilan dan Berkesetaraan Gender Dalam Keluarga di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta," yang dilakukan oleh Pusat Studi Islam UII bekerjasama dengan Cordaid tahun 2007. [Http://www.cordaid.nl](http://www.cordaid.nl).

tidak. Tetapi dalam mengeksplorasi bentuk perilaku responden, digunakan kata kerja berbeda sesuai dengan jenis tindakan atau pekerjaan. Misalnya, untuk indikator istri bekerja di luar rumah digunakan kata kerja *mengizinkan/tidak mengizinkan*. Atau, untuk indikator kedudukan anak laki-laki digunakan, *terus mengusahakan/tidak terus mengusahakan*. Demikian seterusnya. Adapun dalam menganalisis pola dan kecenderungan sensitifitas jender pada perilaku responden digunakan kategori penilaian perilaku dengan analisis jender yang diajukan para ahli jender. Hal ini dapat dikelompokkan kepada 1. Subordinasi, 2. Marginalisasi, 3. Stereotipe, 4. Violence, 5. Beban Ganda.³ Jawaban yang tidak bisa dikategori secara tegas kepada kecenderungan yang lima tersebut dikelompokkan kepada perilaku ragu-ragu.

Setelah melakukan pengolahan dan analisis data terhadap seluruh angket dan wawancara, dapat dideskripsikan perilaku keagamaan yang berkeadilan dan berkesadaran jender di kalangan profesional di Kota Medan. Hasil penelitian meliputi persentase, penilaian, dan kecenderungan perilaku responden terhadap 13 indikator yang diajukan.

³ Lihat misalnya, Dr. Mansour Fakih, "Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam : Tinjauan dari Analisis Gender," dalam *Membincang Feminisme : Diskursus Gender Dalam Perspektif Gender* (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), hal. 37-65; Ratna Megawangi, "Perkembangan Teori Feminisme Masa Kini dan Mendatang serta Kaitannya dengan Feminisme Keislaman", *Membincang Feminisme - Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), hal. 209-229.

A. Rangkuman kecenderungan perilaku sensitif gender pada masing-masing profesi

dengan 13 indikator dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Rangkuman kecenderungan perilaku sosial keagamaan sensitif gender pada semua profesi

NO	Indikator	Akademisi/ Mhsu Doktoral	Ulama/ Pencera- mah	Peme- Rintahan	Partai/ Ormas/ LSM	Wiraswas ta/ Pengusa- ha
1.	Perem- puan/Istri bekerja	Mengizin kan/ Tdk <u>margina- lisasi</u>	Tdk Jelas	Tidak mengizinkan dalam keadaan apapun/ <u>Marginalisasi</u>	Mengizinkan dengan syarat tertentu/ <u>ragu-ragu</u>	Mengizin - kan/ Tdk <u>margina- lisasi</u>
2.	Harus punya anak laki2	Tidak Trs Berusaha / <u>Tdk Streotype</u>	Tidak Trs Berusaha / <u>Tdk Streotype</u>	Tidak Trs Berusaha / <u>Tdk Streotype</u>	Trs Berusaha / <u>Streotype</u>	Trs Berusaha / <u>Streotype</u>
3.	Utama kan pendi dikan anak laki- laki	Menguta- maKan/ <u>Subordi- nate</u>	Mengutama Kan/ <u>Subordi- nate</u>	Mengutama Kan/ <u>Subordinate</u>	Mengutama Kan/ <u>Subordinate</u>	Menguta- ma Kan/ <u>Subordi- nate</u>
4.	Suami pengam- bil kepu- tusan dalam keluarga	Tidak Memak sakan/ <u>Menolak Kekerasan</u>	Tidak Jelas	Memaksakan dalam bidang tertentu/ <u>Ragu-ragu</u>	Memaksa Walaupun tanggung jwb keuangan di tangan istri/ <u>Kekerasan</u>	Tidak Memaksa kan/ <u>Menolak Kekera- san</u>
5.	Harta gono-gini	Membe- Rikan Dalam Semua Keadaan/ <u>Tdk Margi- nalisasi</u>	Memberika n Dalam Semua Keadaan/ <u>Tdk Marginali- sasi</u>	Memberikan Dalam Semua Keadaan/ <u>Tdk Marginalisasi</u>	Memberikan Dalam semua Keadaan/ <u>Tdk Marginalisasi</u>	Memberi- kan Dalam Semua Keadaan/ <u>Tdk Margi- nali- sasi</u>

6.	Kepemimpinan perempuan	Tidak Memilih/ Subordinate	Tidak Memilih/ Subordinate	Memilih Utk jenjang ttt / Ragu-ragu	Tidak Memilih/ Subordinate	Tidak Memilih/ Subordinate
7.	Poligami	Tdk Melakukan dengan Pengecualian / Menolak Kekerasan	Tdk Melakukan dengan Pengecualian/ Menolak Kekerasan	Melakukan Dengan Syarat ttt tetapi laki2 wajar berpikir/ Ragu-ragu	Melakukan dengan Pengecualian ttt tp laki2 wajar berpikir/ Ragu-Ragu	Tdk Melakukan dengan Pengecualian / Menolak Kekerasan
8.	Upah pekerja laki2 lebih tinggi	Melebihkan = Menyamakan Marginalisasi + = Tdk Marginalisasi	Menyamakan/ Tdk Marginalisasi	Menyamakan/ Tdk Marginalisasi	Menyamakan/ Tdk Marginalisasi	Menyamakan/ Tdk Marginalisasi
9.	Keadilan hukum perspektif jender	Menuntut Keadilan/ Menolak Kekerasan	Menuntut Keadilan/ Menolak Kekerasan	Menuntut Keadilan/ Menolak Kekerasan	Menuntut Keadilan/ Menolak Kekerasan	Menuntut Keadilan/ Menolak Kekerasan
10.	Kecantikan/ Ketampilan modal sukses	Tdk Mendukung/ Tdk Streotipe	Tdk Mendukung/ Tdk Streotipe	Tdk Mendukung/ Tdk Streotipe	Tdk Mendukung/ Tdk Streotipe	Tdk Mendukung/ Tdk Streotipe
11.	Atribusi Diri Pada Nama Suami	Tdk meminta mengatribusi + tdk menyarankan memakai nama sendiri/ Ragu-Ragu	Tidak Jelas	Meminta mengatribusi/ Subordinate	Tdk meminta mengatribusi+ tdk menyarankan/ Ragu-Ragu	Tdk meminta Mengatribusi + Tdk menyarankan/ Ragu-Ragu
12.	Bagian Waris + Wasiat Perempuan	Memberikan setengah secara mutlak/	Memberikan setengah secara mutlak/	Memberikan setengah secara mutlak/ Subordinate	Mengkalkulasi keadaan ekonomi anak/ Tdk Subordinate	Memberikan setengah secara mutlak/

	Setengah	Subordi- nate	Subordi- nate			Subordi- nate
13	Melapork an tindak kekerasan kpd yang berwe nang	Tidak Melaporkan/ <u>Kekerasan</u>	Tidak Melapor kan/ <u>Kekerasan</u>	Tidak Melaporkan/ <u>Kekerasan</u>	Tidak Melaporkan/ <u>Kekerasan</u>	Melapor kan/ <u>Menolak</u> <u>Kekera</u> <u>san</u>

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dengan menggunakan 13 indikator, diketahui profesi akademisi dan wiraswasta/pengusaha lebih dapat menentukan sikap yang cenderung tegas dalam melakoni perilaku sosial keagamaan sensitif jender. Berbeda dengan kelompok profesi ulama/penceramah, pemerintahan, politisi dan tokoh ormas dalam beberapa masalah masih sering menampilkan sikap ragu-ragu untuk menentukan tindakan mana yang akan dilakukannya.

Bahkan untuk kelompok profesi ulama dalam kajian isu jender yang lebih berkait dengan peran dirinya sendiri cenderung sulit untuk menentukan sikap yang tegas. Misalnya ketika dihadapkan pada perilaku mengizinkan atau tidak ketika isteri ingin bekerja di luar rumah; juga dalam konteks mengenai perannya sebagai pengambil keputusan dalam keluarga terlihat mereka cenderung tidak memberikan tanggapan atau komentar. Hal ini diduga karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan menyudutkan mereka dalam situasi sulit secara psikologis; di satu sisi menginginkan isteri selalu berada di rumah tapi di sisi lain ternyata kebutuhan hidup tak tertangani jika harus bekerja sendirian.

Pada kelompok profesi politisi sikap ragu-ragu sangat menonjol ketika dihadapkan pada pilihan apakah seorang wanita bisa

Seberapa sangat	Seberapa sangat	Seberapa sangat	Seberapa sangat	Seberapa sangat	Seberapa sangat
Seberapa sangat	Seberapa sangat	Seberapa sangat	Seberapa sangat	Seberapa sangat	Seberapa sangat
Seberapa sangat	Seberapa sangat	Seberapa sangat	Seberapa sangat	Seberapa sangat	Seberapa sangat
Seberapa sangat	Seberapa sangat	Seberapa sangat	Seberapa sangat	Seberapa sangat	Seberapa sangat
Seberapa sangat	Seberapa sangat	Seberapa sangat	Seberapa sangat	Seberapa sangat	Seberapa sangat
Seberapa sangat	Seberapa sangat	Seberapa sangat	Seberapa sangat	Seberapa sangat	Seberapa sangat
Seberapa sangat	Seberapa sangat	Seberapa sangat	Seberapa sangat	Seberapa sangat	Seberapa sangat
Seberapa sangat	Seberapa sangat	Seberapa sangat	Seberapa sangat	Seberapa sangat	Seberapa sangat
Seberapa sangat	Seberapa sangat	Seberapa sangat	Seberapa sangat	Seberapa sangat	Seberapa sangat
Seberapa sangat	Seberapa sangat	Seberapa sangat	Seberapa sangat	Seberapa sangat	Seberapa sangat

dijadikan pemimpin, suami sebagai pengambil keputusan utama dalam keluarga, dan poligami. Pertanyaan-pertanyaan tersebut cenderung mengancam ego sebagai laki-laki, di mana mereka biasa berada dalam ranah yang memainkan kekuasaan terhadap orang banyak. Jadi, wajar jika mereka juga tegas dalam memainkan kekuasaannya dalam rumah tangganya. Secara psikologis, gejala ini malah bisa menginformasikan sebaliknya di mana mereka mengembangkan mekanisme pertahanan diri dengan mengambil sikap ragu-ragu untuk menutupi kekurangannya.

Pada kelompok profesi tokoh ormas/LSM sikap ragu-ragu ditampilkan ketika dihadapkan pada suatu pilihan apakah mengizinkan istrinya untuk bekerja dan aktif di luar rumah, atau sebagai ibu rumah tangga. Hal ini terjadi diduga karena konsekuensi kesibukan sebagai tokoh ormas dengan jam kerja yang tidak terbatas membuat ketakutan pada masalah urusan pemeliharaan rumah tangga. Kalau isterinya bekerja di luar rumah maka yang mengurus kebutuhan rumahtangganya menjadi terganggu.

Bila dilihat dari tinjauan indikator, maka diperoleh data bahwa hanya tiga indikator di mana semua profesi tanpa pengaruh jenis memberikan jawaban yang sama, yaitu menunjukkan kecenderungan perilaku sensitif jender atau pro-setara jender. Indikator tersebut yaitu 'memberikan harta gono-gini', 'peningkatan keadilan hukum pada kebijakan publik pemerintah', dan 'ketampanan/kecantikan bukan modal utama kesuksesan'. Sebaliknya, pada semua status profesi ditemui perilaku bias jender yang sama pada indikator perlakuan

terhadap 'pendidikan anak laki-laki dan perempuan', pada 'bagian waris perempuan setengah, dan pada 'ranah publik dan ranah privat rumah tangga'. Semua kalangan profesional yang diasumsikan sudah cukup bersikap rasional ternyata, dalam kondisi harus memilih, tetap mendahulukan pertimbangan kelompok jenis kelamin dalam memberikan kesempatan pendidikan. Mereka memilih untuk memberikan kesempatan menyelesaikan pendidikan kepada anak laki-laki dan bukan anak perempuan kalau biaya pendidikan mereka hanya mampu membiayai satu saja. Mereka tidak menyandarkan kepada kemampuan intelektualitas dan kecerdasan atau potensi ataupun bakat si anak.

Dalam 8 indikator lainnya, terdapat kecenderungan yang cukup beragam pada setiap profesi. Begitupun, ada 5 indikator di mana dapat digambarkan pola kecenderungan mayoritas, yaitu hanya satu golongan profesi yang membedakan diri. Yaitu, indikator warisan, upah, kepemimpinan perempuan, poligami dan istri sebagai ibu rumah tangga. Dalam hal warisan, semua profesi kecuali kelompok politisi/LSM akan memberikan setengah bagian bagi perempuan dan memandangnya sebagai harga keadilan. Kelompok politisi ini masih memandang kemungkinan hukum warisan ini ditafsirkan. Sebaliknya, terlihat tidak konsisten ketika kelompok politisi pula yang ragu-ragu dalam memilih perempuan sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan dan juga dalam menyetujui poligami. Begitu juga cukup mengherankan, kelompok pemerintahan dan politik ini adalah kelompok yang menerima istri berbedudukan

dan berfungsi sebagai ibu rumah tangga. Sementara itu, menarik pula dan di luar prakiraan umum masyarakat, justru kelompok akademisi yang mengakui akan memberikan upah kerja perempuan lebih rendah dari pekerja laki-laki. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut, mungkin dari sisi pernyataan dan pertanyaan yang kurang jelas atau mungkin juga dari sisi informasi dan sosialisasi jenis-jenis pekerjaan bagi perempuan dan laki-laki, di mana perempuan akan pantas dan patut dibayar setara bila dibidang akademik. Kemudian, ternyata upaya untuk mensosialisasikan kesetaraan di bidang kepemimpinan publik masih harus melewati jalan yang panjang untuk perempuan bisa diterima di ranah kepemimpinan publik. Menariknya, temuan pendapat ini juga berlaku pada responden perempuan. Jadi, perempuan sendiri tidak otomatis menerima perempuan sebagai pemimpin kalau masih ada terdapat laki-laki.

B. Berikut adalah tabel mayoritas prilaku responden pada masing-masing profesi.

Tabel 2. Data mayoritas prilaku sosial keagamaan sensitif jender pada Akademisi/Mhsw Doktoral

No.	Indikator	Penilaian	Persentase %	Kecenderungan
1.	Istri bekerja di luar rumah	Mengizinkan/Tidak Mengizinkan/Mengizinkan dalam keadaan darurat	90 / 3 / 7	Tidak Marginalisasi
2.	Harus Punya Anak Laki	Terus berusaha-Menyuruh orang untuk trs berusaha /Tdk terus berusaha/Tdk berusaha	20/70/10	Tidak Stereotype

3.	Mengutamakan Pendidikan anak laki-laki	Mengutamakan laki-laki/ Mengutamakan Pr/ Melihat yang mampu	70/10/20	Subordinate
4.	Suami pengambil keputusan dalam keluarga	Memaksakan/Tdk Memaksakan/Memaksa dalam bidang tertentu	30/50/20	Menolak Kekerasan
5.	Harta Gono-Gini	Memberi pada semua keadaan/Tidak memberi/ Hanya kalau suami istri sama-sama bekerja	70/5/25	Tidak Marginalisasi
6.	Kepemimpinan Perempuan	Memilih/Memilih utk jenjang tertentu/Tdk Memilih	10/25/65	Subordinate
7.	Poligami	Melakukan tanpa disertai syarat/Tidak melakukan kecuali kondisi tertentu/Melakukan dengan syarat tertentu dan wajar selalu berpikir.	5/55/40	Menolak Kekerasan
8.	Upah Pekerja laki-laki lebih tinggi	Melebihkan/ Menyamakan/ Merendahkan	50/50/0	Seimbang antara kecenderungan marginalisasi dan tidak marginalisasi = Ragu-ragu
9.	Keadilan Jender dalam Hukum	Menuntut/Tidak menuntut/Tidak peduli	75/20/5	Menolak Kekerasan
10.	Kecantikan/ Ketampanan Modal Sukses	Tidak mendukung /Mendukung/Mendukung dalam kondisi tertentu	75/5/20	Tidak Stereotype
11.	Atribusi Istri Pada Nama Suami	Meminta Mengatribusi /Menyarankan istri untuk tdk mengatribusi/tdk meminta mengatribusi+ tdk menyarankan	5/5/90	Ragu-ragu

12.	Bagian Waris + Wasiat Perempuan Setengah	Memberikan setengah secara mutlak/Melakukan penafsiran/Mengkalkulasi keadaan ekonomi anak	60/5/35	Subordinasi
13.	Melaporkan Tindak Kekerasan Kpd yang Berwenang	Melaporkan/Tidak Melaporkan/Melaporkan kalau mengancam nyawa	5/85/10	Kekerasan

Tabel 3. Data mayoritas perilaku sosial keagamaan sensitif gender pada Pegawai Pemerintahan

No.	Indikator	Penilaian	Persentase %	Kecenderungan
1.	Istri bekerja di luar rumah	Mengizinkan/Tidak Mengizinkan/Mengizinkan dalam keadaan darurat	10/80/10	Marginalisasi
2.	Harus Punya Anak Laki	Terus berusaha-Menyuruh orang untuk trs berusaha /Tdk terus berusaha/Tdk berusaha	10/70/20	Tidak Stereotipe
3.	Mengutamakan Pendidikan anak laki-laki	Mengutamakan laki-laki/ Mengutamakan Pr/ Melihat yang mampu	70/10/20	Subordinate
4.	Suami pengambil keputusan dalam keluarga	Memaksakan/Tdk Memaksakan/Memaksa dalam bidang tertentu	20/20/60	Ragu-Ragu
5.	Harta Gono-Gini	Memberi pada semua keadaan/Tidak memberi/ Hanya kalau suami istri sama-sama bekerja	60/5/35	Tidak Marginalisasi
6.	Kepemimpinan Perempuan	Memilih/Memilih utk jenjang tertentu/Tdk Memilih	10/55/35	Ragu-Ragu

7.	Poligami	Melakukan tanpa disertai syarat/Tidak melakukan kecuali kondisi tertentu/Melakukan dengan syarat tertentu dan wajar selalu berpikir.	15/10/75	Ragu-Ragu
8.	Upah Pekerja laki-laki lebih tinggi	Melebihkan/ Menyamakan/ Merendahkan	10/90/0	Tidak Mrginalisasi
9.	Keadilan Jender dalam Hukum	Menuntut/Tidak menuntut/Tidak perduli	75/25/0	Menolak Kekerasan
10.	Kecantikan/ Ketampanan Modal Sukses	Tidak mendukung /Mendukung/Mendukung dalam kondisi tertentu	75/5/20	Tidak Streotipe
11.	Atribusi Istri Pada Nama Suami	Meminta Mengatribusi / menyarankan istri untuk tdk mengatribusi/tdk meminta mengatribusi+tdk menyarankan	75/0/25	Subordinate
12.	Bagian Waris + Wasiat Perempuan Setengah	Memberikan setengah secara mutlak/Melakukan penafsiran/Mengkalkulasi keadaan ekonomi anak	40/30/30	Subordinasi
13.	Melaporkan Tindak Kekerasan Kpd yang Berwenang	Melaporkan/Tidak Melaporkan/Melaporkan kalau mengancam nyawa	5/85/10	Kekerasan

Tabel 4. Data mayoritas perilaku sosial keagamaan sensitif jender pada Ulama/Penceramah

No.	Indikator	Penilaian	Persentase %	Kecenderungan
1.	Istri bekerja di luar rumah	Mengizinkan/Tidak Mengizinkan/Mengizinkan dalam keadaan	Tidak menjawab 90 %,	Tidak Jelas

		darurat	Mengizinkan dalam keadaan darurat 10 %	
2.	Harus Punya Anak Laki	Terus berusaha-Menyuruh orang untuk trs berusaha /Tdk terus berusaha/Tdk berusaha	40/50/10	Tidak Streotype
3.	Mengutamakan Pendidikan anak laki-laki	Mengutamakan laki-laki/ Mengutamakan Pr/ Melihat yang mampu	70/0/30	Subordinate
4.	Suami pengambil keputusan dalam keluarga	Memaksakan/Tdk Memaksakan/Memaksa dalam bidang tertentu	10/0/25	Tidak Jelas
5.	Harta Gono-Gini	Memberi pada semua keadaan/Tidak memberi/ Hanya kalau suami istri sama-sama bekerja	50/30/20	Tidak Marginalisasi
6.	Kepemimpinan Perempuan	Memilih/Memilih utk jenjang tertentu/Tdk Memilih	10/20/70	Subordinate
7.	Poligami	Melakukan tanpa disertai syarat/Tidak melakukan kecuali kondisi tertentu/Melakukan dengan syarat tertentu dan wajar selalu berpikir.	20/40/40	Ragu-Ragu
8.	Upah Pekerja laki-laki lebih tinggi	Melebihkan/ Menyamakan/ Merendahkan	1/99/0	Tidak Marginalisasi
9.	Keadilan Jender dalam Hukum	Menuntut/Tidak menuntut/Tidak perduli	75/25/0	Menolak Kekerasan
10.	Kecantikan/ Ketampanan Modal Sukses	Tidak mendukung /Mendukung/Mendukung dalam kondisi tertentu	50/10/40	Tidak Streotype
11.	Atribusi Istri Pada Nama Suami	Meminta Mengatribusi / menyarankan istri untuk tdk	50/0/50	Ragu-Ragu

		mengatribusi/tdk meminta mengatribusi+tdk menyarankan		
12.	Bagian Waris + Wasiat Perempuan Setengah	Memberikan setengah secara mutlak/Melakukan penafsiran/Mengkalkulasi keadaan ekonomi anak	90/10/0	Subordinasi
13.	Melaporkan Tindak Kekerasan Kpd yang Berwenang	Melaporkan/Tidak Melaporkan/Melaporkan kalau mengancam nyawa	0/85/15	Kekerasan

Tabel 5. Data mayoritas perilaku sosial keagamaan sensitif jender pada Praktisi Partai/Ormas/LSM

No.	Indikator	Penilaian	Persentase %	Kecenderungan
1.	Istri bekerja di luar rumah	Mengizinkan/Tidak Mengizinkan/Mengizinkan dalam keadaan darurat	20/20/60	Ragu-Ragu
2.	Harus Punya Anak Laki	Terus berusaha-Menyuruh orang untuk trs berusaha /Tdk terus berusaha/Tdk berusaha	50/40/10	Streotype
3.	Mengutamakan Pendidikan anak laki-laki	Mengutamakan laki-laki/ Mengutamakan Pr/ Melihat yang mampu	70/5/25	Subordinate
4.	Suami pengambil keputusan dalam keluarga	Memaksakan/Tdk Memaksakan/Memaksa dalam bidang tertentu	60/10/30	Kekerasan
5.	Harta Gono-Gini	Memberi pada semua keadaan/Tidak memberi/ Hanya kalau suami istri sama-sama bekerja	60/20/20	Tidak Marginalisasi
6.	Kepemimpinan Perempuan	Memilih/Memilih utk jenjang tertentu/Tdk Memilih	10/10/80	Subordinate

7.	Poligami	Melakukan tanpa disertai syarat/Tidak melakukan kecuali kondisi tertentu/Melakukan dengan syarat tertentu dan wajar selalu berpikir.	20/40/40	Ragu-Ragu
8.	Upah Pekerja laki-laki lebih tinggi	Melebihkan/ Menyamakan/ Merendahkan	10/90/0	Tidak Marginalisasi
9.	Keadilan Jender dalam Hukum	Menuntut/Tidak menuntut/Tidak peduli	60/40/0	Menolak Kekerasan
10.	Kecantikan/ Ketampanan Modal Sukses	Tidak mendukung /Mendukung/Mendukung dalam kondisi tertentu	90/0/10	Tidak Stereotype
11.	Atribusi Istri Pada Nama Suami	Meminta Mengatribusi / menyarankan istri untuk tdk mengatribusi/tdk meminta mengatribusi+ tdk menyarankan	10/10/80	Ragu-Ragu
12.	Bagian Waris + Wasiat Perempuan Setengah	Memberikan setengah secara mutlak/Melakukan penafsiran/Mengkalkulasi keadaan ekonomi anak	30/10/60	Tidak Marginalisasi
13.	Melaporkan Tindak Kekerasan Kpd yang Berwenang	Melaporkan/Tidak Melaporkan/Melaporkan kalau mengancam nyawa	5/80/15	Kekerasan

Tabel 6. Data mayoritas perilaku sosial keagamaan sensitif jender pada Wiraswasta/Pengusaha

No.	Indikator	Penilaian	Persentase %	Kecenderungan
1.	Istri bekerja di luar rumah	Mengizinkan/Tidak Mengizinkan/Mengizinkan dalam keadaan darurat	60/20/20	Tdk Marginalisasi

2.	Harus Punya Anak Laki	Terus berusaha-Menyuruh orang untuk trs berusaha /Tdk terus berusaha/Tdk berusaha	65/35/0	Streotype
3.	Mengutamakan Pendidikan anak laki-laki	Mengutamakan laki-laki/ Mengutamakan Pr/ Melihat yang mampu	50/5/45	Subordinate
4.	Suami pengambil keputusan dalam keluarga	Memaksakan/Tdk Memaksakan/Memaksa dalam bidang tertentu	40/55/5	Menolak Kekerasan
5.	Harta Gono-Gini	Memberi pada semua keadaan/Tidak memberi/ Hanya kalau suami istri sama-sama bekerja	75/0/25	Tidak Marginalisasi
6.	Kepemimpinan Perempuan	Memilih/Memilih utk jenjang tertentu/Tdk Memilih	5/15/80	Subordinate
7.	Poligami	Melakukan tanpa disertai syarat/Tidak melakukan kecuali kondisi tertentu/Melakukan dengan syarat tertentu dan wajar selalu berpikir.	20/60/20	Menolak Kekerasan
8.	Upah Pekerja laki-laki lebih tinggi -	Melebihkan/ Menyamakan/ Merendahkan	35/60/5	Tidak Marginalisasi
9.	Keadilan Jender dalam Hukum	Menuntut/Tidak menuntut/Tidak peduli	40/30/30	Menolak Kekerasan
10.	Kecantikan/ Ketampanan Modal Sukses	Tidak mendukung /Mendukung/Mendukung dalam kondisi tertentu	40/30/30	Tidak Streotype
11.	Atribusi Istri Pada Nama Suami	Meminta Mengatribusi / menyarankan istri untuk tdk mengatribusi/tdk meminta mengatribusi+ tdk menyarankan	20/0/80	Ragu-Ragu

12.	Bagian Waris + Wasiat Perempuan Setengah	Memberikan setengah secara mutlak/Melakukan penafsiran/Mengkalkulasi keadaan ekonomi anak	60/10/30	Subordinasi
13.	Melaporkan Tindak Kekerasan Kpd yang Berwenang	Melaporkan/Tidak Melaporkan/Melaporkan kalau mengancam nyawa	75/5/20	Menolak Kekerasan

C. Penjelasan data per-profesi :

Profesi Akademisi/Intelektualis (Mhsw Doktoral)

Bila melihat data pada masing-masing profesi, maka pola-pola kecenderungan perilaku dapat dijelaskan sebagai berikut. Di kalangan Akademisi dan komunitas kampus, penilaian keseluruhan memperlihatkan pergerakan ke arah perilaku sensitif jender telah meluas dan menguat. Perilaku tersebut menyentuh aspek-aspek yang vital bagi transformasi kehidupan sosial seperti tidak stereotipe bahwa perempuan tidak hanya perlu mengandalkan fisiknya untuk kesuksesannya. Begitu juga, praktik memberikan gonoreografi yang menjadi indikator kuat dihargainya tenaga perempuan di rumah telah menyebar. Hal ini konsisten dengan persepsi harus memiliki anak laki-laki, yang telah memudar di kalangan intelektual. Akan tetapi, bila dilihat lebih teliti dan mempertimbangkan kuantifikasi persentase secara internal, sebenarnya orang yang masih mempertahankan persepsi harus memiliki anak laki-laki masih cukup besar di kalangan akademisi yaitu 20 %. Begitu juga dengan perilaku keputusan rumah tangga di tangan suami dan perilaku persetujuan orang berpikir untuk

poligami, tampak persentasenya masih tinggi yaitu 30 % dan 40 %. Hal ini sungguh tidak diharapkan dan di luar dugaan.

Yang lebih di luar dugaan adalah kelompok akademis juga tidak membedakan diri dalam hal sensitifitas jender dalam perlakuan pendidikan terhadap anak, di mana masih terjadi kecenderungan mengutamakan pendidikan laki-laki dibanding perempuan dalam kondisi harus memilih. Hal ini merupakan suatu indikasi kegagalan sosialisasi jender di kalangan kampus mengingat kelompok ini diduga telah memahami bahwa faktor utama dalam pendidikan bukan jenis kelamin seks melainkan intelektualitas. Sementara, fakta dalam dunia akademis juga telah membuktikan bahwa intelektualitas perempuan tidak bisa direndahkan dari laki-laki. Sama halnya, dalam masalah kepemimpinan wanita kelompok akademis juga belum menunjukkan perilaku sensitif jender dan cenderung tidak memilih pemimpin wanita. Tetapi, yang menjadi catatan khusus adalah bahwa kalangan akademik/intelektual juga belum menyerap kesadaran ranah publik dari kekerasan rumah tangga dengan tidak meluasnya perilaku melaporkan kekerasan rumah tangga pada pihak yang berwenang dan belum tersebarinya exercise (pengasahan) intelektualitas melalui tradisi penafsiran ulang permasalahan hukum waris.

Dapat disimpulkan sebenarnya kelompok akademis belum memperlihatkan ketersebaran perilaku pro jender, terutama ketika menyangkut permasalahan dan kepentingan personal dan rumah tangga.

Profesi Pegawai Pemerintahan (eksekutif/ legislatif/ yudikatif)

Pada profesi pegawai pemerintahan, dapat dicatat kelebihan kalangan ini dalam perilaku terkait kepemimpinan perempuan, keputusan di tangan suami, dan masalah waris. Sementara dalam sejumlah bidang lainnya, ketersebaran perilaku jender telah terlaksana di kalangan profesi ini, namun dalam masalah yang tiga di atas dijumpai gejala yang sedikit berbeda. Pada masalah kepemimpinan wanita, mulai ada gejala pergeseran nilai untuk memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memimpin. Kalau jumlah persentase keseluruhan diajukan maka angka yang memberikan kesempatan cukup tinggi yaitu 65 %, dibanding kelompok lain yang berkisar antara 20-35 %. Dalam masalah kedudukan suami sebagai pengambil keputusan mutlak juga mulai tertolak pada komunitas ini, yang artinya mulai menyadari dan mempertimbangkan kedudukan istri sebagai partner dan memiliki andil yang penting dalam rumah tangga. Sekitar 20% responden menyatakan tidak memaksakan diri menjadi pengambil keputusan tunggal dan 60 % memerankan diri sebagai pengambil keputusan pada bidang tertentu saja. Ini berbeda dengan kelompok politisi yang memiliki perilaku memaksakan menjadi pengambil keputusan mencapai 60 %. Walaupun pada dua bidang profesi, akademisi dan wiraswasta terdapat kecenderungan tidak memaksakan kehendak, akan tetapi jumlah yang memaksakan kehendak malah lebih tinggi, yaitu 30 dan 40 %, dibanding pada kelompok pegawai pemerintahan

dalam keluarga, sehingga memunculkan penilaian tidak jelas. Setelah itu, ada dua indikator di mana jawaban responden sulit menginformasikan pola sensitifitas jender sehingga diberi penilaian 'Ragu-Ragu yaitu, dalam masalah atribusi nama suami dan dalam masalah poligami. Dalam kedua masalah ini, angka persentase memperlihatkan gejala bias jender masih tinggi. Yang meminta mengatribusi diri istri ke suami sekitar 50 % sedangkan yang menindak-lakoni poligami tanpa ada syarat-syarat tertentu juga masih tinggi sekali yaitu 20%. Keadaan ini masih diperburuk dengan sejumlah indikator di mana kalangan profesi ini memperlihatkan gejala insensitifitas jender yang tinggi, yaitu pada indikator ranah privat rumah tangga misalnya melaporkan tindak kekerasan di mana perilaku yang muncul adalah tidak melaporkan, kemudian dalam kepemimpinan perempuan yang memperlihatkan ketersebaran perilaku yang cukup luas yaitu 70 % tidak memilih pemimpin perempuan, kemudian dalam mengutamakan pendidikan anak laki-laki, dalam masalah waris. Dalam masalah memiliki anak laki-laki, kelompok ini juga masih sangat meluas mengusahakan untuk memiliki anak laki-laki yaitu 40 %. Begitu juga berkenaan tindakan memberi harta gono-gini, kelompok ini masih sangat variatif di mana jumlah yang tidak memberikan masih sangat tinggi dan jumlah yang mensyaratkan harus sama-sama bekerja juga masih sangat tinggi, sehingga pandangan bahwa kedudukan ekonomi perempuan dalam rumah tangga tidak perlu masih berlaku dalam kelompok ini. Jadi, secara keseluruhan perilaku sensitif jender hanya terlaksana pada isu-isu publik yang tidak

menyangkut diri personal responden, seperti konsep diri laki-laki dan perempuan tidak lagi disandarkan pada fisik, dan keadilan di tempat kerja telah didukung oleh kelompok ini.

Profesi Pelaku Partai, Ormas dan LSM

Pada kelompok profesi pelaku dan aktivis partai, ormas dan LSM didapati keterbedaan mereka dalam menindaki masalah waris, masalah memiliki anak laki-laki dan juga masalah poligami. Menarik bahwa pada komunitas ini, telah tersebar prilaku memberikan waris dan wasiat dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi anak dan saudara yaitu 60 %. Dalam kelompok ini juga didapati arah prilaku menafsir dan merasionalisasi ulang hukum bagian perempuan setengah dari laki-laki, di mana kecenderungan ini tidak didapati dalam kelompok profesi lain. Dalam masalah harus memiliki anak laki-laki, menarik untuk melihat kecenderungan yang terjadi pada kalangan profesi ini. Walaupun secara persentase menghasilkan angka kecenderungan streotipe, namun harus dipertimbangkan bahwa prilaku non-streotipe juga sudah cukup tersebar karena angkanya berbeda tipis dengan angka kecenderungan streotipe. Jadi, di kalangan profesi pelaku partai dan ormas, sudah diterima bahwa anak laki-laki dan perempuan sama saja nilainya dan tidak mesti merasa hidupnya kurang kalau tidak memiliki anak laki-laki. Hal ini dapat disimpulkan dari jawaban bahwa sekitar 40 % responden menyatakan tidak terus berusaha dan tidak menyuruh orang terus berusaha mendapatkan anak laki-laki. Ketersebaran prilaku menyamakan anak laki-laki dan perempuan dalam waris ataupun ketidakharusan memiliki anak laki-

laki ini mungkin bisa dikaitkan dengan karakter orang-orang yang terjun di bidang profesi ini, yang menuntut karakter yang tidak terikat, biasa menerima perbedaan, pembauran pergaulan antar jender, relatif lebih mobile dan penuh *challenging*. Mereka tidak memiliki penghasilan yang tetap, karena itu agak kurang bisa memastikan dan menetapkan apa yang mereka wariskan. Mereka juga bisa menerima dan menyadari perubahan-perubahan dan melihat kemungkinan-kemungkinan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki.

Pada indikator selebihnya, kelompok ini juga akhirnya sama dengan kelompok profesi lain dalam manifestasi perilaku sensitifitas jender.

Profesi Wiraswasta/Pengusaha

Data penelitian pada kalangan profesi Wiraswasta/Pengusaha memperlihatkan ketersebaran sensitifitas jender yang tinggi dan meluas pada berbagai aspek. Malah dapat dikatakan bahwa di antara kelima profesi, kalangan wiraswasta/pengusaha ini adalah yang paling tinggi dan paling meluas perilaku sensitif jender. Bila ditinjau dari kecenderungan secara umum dan keseluruhan, kalangan profesi wiraswasta/pengusaha ini memang setara dengan kalangan akademisi. Pada kalangan akademisi terjadi kecenderungan bias jender pada batas ranah publik rumah tangga hingga jumlah yang bersikap melaporkan kekerasan rumah tangga sedikit sekali. Pada kalangan wiraswasta/pengusaha kecenderungan bias jender terjadi pada kehendak memiliki anak laki-laki. Sekitar 65 % menyatakan terus berusaha untuk memiliki anak laki-laki bila belum ada. Sementara dari

kalangan akademisi hanya 20 % dan 70 % menyatakan tidak terus berusaha malah 10 % menyatakan tidak merasa perlu berusaha karena laki dan perempuan sama saja. Kecenderungan pada kalangan pengusaha/wiraswasta ini bisa dipahami dari segi bahwa profesi ini menuntut dan membutuhkan anak untuk menurunkan usaha keluarga dan dalam hal ini, masih menaruh harapan pada anak laki-laki menjadi penerus dan pengganti pengelola usahanya tersebut. Selebihnya, kedua profesi ini sebanding dalam hal sensitifitas jender. Akan tetapi, bila dilihat secara detail angka persentase pada masing-masing bidang, akan terlihat bahwa sebenarnya kalangan profesi wiraswasta/pengusaha ini lebih banyak mempraktikkan perilaku jender, artinya lebih tersebar sensitifitas jendernya.

Kalangan akademisi mengungguli profesi wiraswasta/pengusaha dalam hal memberi izin istri bekerja, yaitu 90% berbanding 60 %. Akan tetapi selebihnya mulai dari sikap mengutamakan pendidikan, profesi wiraswasta/pengusaha mengungguli kalangan akademik karena di sini perilaku mengutamakan yang lebih mampu cukup besar yaitu 45 %, malah ada yang mengutamakan pendidikan anak perempuan, yang hal ini tidak terlihat pada profesi lain. Pada masalah pemberian harta gono gini, pada profesi ini tidak didapati jawaban tidak memberi dan yang memberi harta gono gini walaupun istri atau suami tidak bekerja meluas sampai 75 %, sedikit lebih banyak dari kalangan akademisi yang mencapai 70 %. Selanjutnya adalah dalam masalah keadilan di tempat kerja. Walaupun mereka adalah pelaku-pelaku usaha yang biasanya berorientasi materil, akan

tetapi jawaban yang menyatakan menyamakan gaji perempuan dengan laki-laki justru lebih tinggi. Begitupun, dalam hal jawaban memberikan gaji yang sama antara laki-laki dan perempuan ini, yang paling tinggi adalah kelompok ulama dan kelompok pelaku organisasi (partai, ormas, dan LSM).

Akhirnya, terlepas dari penonjolan masing-masing profesi di satu bidang atau keunggulan satu profesi dibanding profesi atau semua profesi lainnya, dari angka-angka data yang didapat diketahui bahwa perilaku sensitif jender di masyarakat Muslim kota Medan dapat dikatakan sebenarnya masih belum mensosialisasi, maksudnya belum terintegrasi pada level individual ataupun sosial dan komunitas. Secara keseluruhan dan melalui penilaian kecenderungan dan mayoritas, baru ada satu perilaku setara jender yang telah tersosialisasi pada semua komunitas, yaitu pemberian harta gono gini. Akan tetapi, lagi-lagi, bila diperhatikan secara individual, sebenarnya praktik ini juga belum sepenuhnya berlaku dan terintegral. Dikatakan demikian karena masih tingginya angka perilaku variasi yaitu 'tidak memberikan' dan 'memberikan hanya bila suami dan istri sama-sama bekerja'. Bila dibandingkan, maka yang akan memberi harta gono gini pada semua keadaan adalah 60% lebih, tetapi masih ada sekitar 23 % yang hanya memberikan kalau kedua suami istri sama-sama bekerja.

Ditinjau dari perilaku keseluruhan profesi pada keseluruhan indikator, maka data memperlihatkan bahwa perilaku tidak sensitif jender masih mendominasi pada masyarakat profesional Muslim kota Medan. Artinya, mayoritas praktik pada berbagai permasalahan yang

berlangsung dalam kehidupan masyarakat masih bersifat diskriminatif dan didasari oleh ketimpangan gender. Pada 13 indikator relasi gender, 7 indikator mengalami mayoritas perilaku non sensitif gender pada semua profesi. Yaitu pada masalah 'mengizinkan istri bekerja', 'memiliki anak laki-laki', 'mengutamakan pendidikan anak laki-laki', 'suami pengambil keputusan dalam keluarga', 'kepemimpinan perempuan', 'atribusi diri pada nama suami', 'pemberian waris dan wasiat, dan dalam 'melaporkan tindak kekerasan'.

Pada indikator istri bekerja, terlihat perilaku bias gender masih sangat kuat di mana ada sekitar 45 % responden memilih untuk tidak mengizinkan istri bekerja dan sekitar 20 % mengizinkan kalau sangat mendesak. Berarti bila ditotal maka sebenarnya kebebasan istri untuk mengembangkan diri dan menyumbangkan peran masyarakatnya terkekang dengan angka 65 % yang tidak mengizinkan. Bisa dibayangkan, dalam zaman dimana kondisi ekonomi sangat sulit ini perempuan masih diinginkan untuk di rumah saja dan tidak mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri dan menyebarkan potensi dirinya. Hal ini tentu saja menggambarkan permasalahan latar belakang konsepsi gender yang masih bias tetapi juga sistem dan desain tempat kerja yang aman bagi perempuan. Sejalan dengan ini dan sekaligus menjadi efeknya adalah kekuatan kekuasaan suami sebagai pengambil keputusan tunggal dalam rumah tangga yang masih menyebar, dan ini bahkan di kalangan profesi, yang diharapkan telah mengalami transformasi karena telah berpendidikan dan hidup dalam

kondisi heterogen dan dinamis. Kalau dijumlahkan maka kategori memaksakan kehendak angkanya hampir mencapai 60 %.

Catatan terakhir yang perlu dikemukakan untuk bab ini adalah tentang kategori relasi jender dari indikator yang diajukan. Dari 13 indikator tersebut, 8 indikator adalah relasi jender dalam konteks keluarga, di mana 5 di antaranya adalah dalam konteks hubungan suami istri dan 3 dalam konteks keluarga utuh. Setelah itu ada 5 indikator adalah relasi jender dalam konteks hubungan kemanusiaan dan kemasyarakatan. Bila dinilai dengan pendekatan ini maka terlihat bahwa kalangan profesi masih terjebak kepada tradisi patriarkis dalam menghadapi situasi relasi jender dalam konteks hubungan suami istri, yang diindikasikan dari kasus izin bekerja untuk istri, menempatkan istri menjadi partner dalam pengelolaan rumah tangga, dan dalam memberikan kepercayaan identitas personal istri. Dalam kasus lainnya yaitu pemberian harta gono gini terlihat ada pergeseran signifikan ke arah persepsi setara jender. Akan tetapi, dilihat dari persentase usaha keras masih harus dibutuhkan karena masih ada 17 % yang tidak memberi dan 23 % yang memberi hanya kalau kedua suami istri bekerja. Perubahan besar tercatat pada kasus poligami di mana telah menyebar pandangan bahwa poligami dalam keadaan normal adalah sebuah kekerasan. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi dalam hal ini. Pertama, dipengaruhi oleh perkembangan kehidupan ekonomi yang makin sulit sehingga orang semakin realistis untuk tidak memiliki imajinasi yang muluk-muluk dengan keindahan beristri dua. Kedua, dipengaruhi oleh pengawalan hukum yang semakin ketat di

mana banyak dampak-dampak kehidupan poligami yang dapat timbul yang akan terjerat oleh hukum mengingat kesadaran dan akses untuk membawa isu ini ke ranah hukum mulai terbuka luas.

Tiga indikator dalam konteks keluarga berikutnya adalah yang melibatkan posisi anak, yaitu dalam hal 'memiliki anak laki', 'perlakuan terhadap pendidikan anak', dan 'warisan/wasiat'. Sementara dalam hal memiliki anak laki-laki kecenderungan telah bergeser kepada kesetaraan, tidak demikian halnya dengan perlakuan terhadap pendidikan anak. Hal ini merupakan perilaku yang masih tidak sensitif gender yang berdampak besar secara sosial. Dalam kondisi harus memilih, hampir 65 % memastikan akan mendahulukan pendidikan anak laki-laki dan hanya 35 % yang bersandar pada kemampuan dan bakat anak tanpa melihat jenis kelaminnya.

Adapun pada 5 masalah relasi gender dalam konteks kehidupan kemasyarakatan dan publik terlihat dominasi ketersebaran gender yaitu pada masalah konsep diri perempuan yang tidak lagi disandarkan pada fisik, kemudian pada kesadaran akan perlunya keadilan di bidang hukum dan pemberian upah kerja yang sebanding. Akan tetapi, pada dua masalah yang menjadi isu hangat dan krusial, konsepsi gender masih tidak tersebar dan terjadi subordinasi dan pembiaran kekerasan. Yaitu pada masalah kepemimpinan wanita dan melaporkan tindak kekerasan rumah tangga. Ternyata, budaya patriarki memang seakan tidak bisa terkikis ke akarnya ketika menyentuh persoalan perebutan kekuasaan dan pertarungan harga diri.

D. Data Tentang Dalil-Dalil dan Alasan Keagamaan pada Indikator

1. Tidak Mengizinkan Istri Bekerja

- Tugas istri adalah mengurus rumah dan melayani suami. Rumah akan tercecer dan anak akan tidak terurus bila istri keluar rumah
- Tidak memerlukan tambahan uang, kebutuhan sudah memadai. Penghasilan yang ada dipadatkan daripada istri harus bekerja
- Istri akan melunjak bila memiliki penghasilan
- Kebutuhan ekonomi merupakan tanggung jawab suami.
- Bekerja tidak merubah pendapatan, kompensasi pengeluaran akan banyak untuk pembantu karena gaji dan upah tidak terlalu besar

2. Harus Memiliki Anak Laki-Laki

- Anak laki-laki bisa meneruskan usaha
- Dituntut keluarga
- Untuk menjadi penjaga/pelindung keluarga
- Untuk kelengkapan hidup
- Untuk meneruskan garis keturunan

3. Mengutamakan Pendidikan Anak laki-Laki

- Karena anak laki-laki akan menghidupi keluarga (ibu dan adik-adiknya) dan juga keluarganya sendiri
- Pada perempuan, biaya bisa sia-sia karena suaminya nanti mungkin tidak mengizinkannya bekerja
- Perempuan harus cepat dinikahkan
- Laki-laki bisa agak lama tidak menikah untuk menyelesaikan sekolah setinggi mungkin
- Laki-laki akan menyelesaikan sedangkan perempuan mungkin tidak selesai karena harus menikah

4. Suami Pengambil Keputusan Dalam Keluarga

- Karena dalam agama suami adalah pemimpin
- Istri dapat memberi saran tetapi keputusan akhir di tangan suami
- Suami penanggung jawab keluarga dan pencari nafkah
- Istri harus menghormati suami
- Suami berkuasa dalam rumah tangga

5. Tidak Memberi Harta Gono Gini

- Karena suami adalah penanggung jawab nafkah maka harta menjadi milik suami seluruhnya
- Karena suami sudah membelanjai istri sepanjang hidupnya
- Karena sudah ada hukum waris jadi tidak perlu pembagian gono-gini
- Aturan Gono gini tidak ada dalam al-Qur'an
- Hukum negara tidak wajib dikerjakan
- Walaupun istri bekerja harta dalam penguasaan suami karena izin bekerja dari suami, begitu juga waktu di rumah yang menjadi hak suami sudah tersita dengan waktu kerja
- Harta gono gini boleh diberikan kalau cerai mati dan bukan cerai hidup. Pada cerai mati istri harus membelanjai anak yang diambil dari harta gono-gini sedangkan pada cerai hidup suami wajib membelanjai anak
- Harta gono gini bisa dilaksanakan kalau suami dan istri sama-sama bekerja sehingga adil harta dibagi dua. Kalau tidak suami akan terkena beban ganda karena harus membelanjai istri dan harus memberikan hartanya lagi separuh kepada istri

6. Kepemimpinan Perempuan

- Dalam al-Qur'an laki-laki adalah pemimpin. Ini termasuk pemimpin dalam rumah tangga dan pemimpin dalam urusan publik

- Laki-laki adalah pemimpin dan semua jabatan ketua dan kepala adalah laki-laki karena laki-laki adalah pemimpin
- Hadis nabi tidak sukses bangsa yang dipimpin perempuan
- Perempuan tidak ahli karena emosional
- Bisa menimbulkan fitnah karena mengurus masyarakat berhadapan dengan banyak laki-laki dan sering berada di luar rumah
- Perempuan adalah aurat, tidak boleh menyita perhatian orang banyak dan hilir mudik di muka publik
- Kalau selain Gubernur dan Presiden, Perempuan bisa dipilih dengan syarat wakilnya adalah laki-laki, begitu juga untuk jabatan ketua dan kepala di kantor

7. Poligami

- Poligami tegas-tegas tertera diizinkan dalam alQuran
- Syarat berlaku adil tidak menggugurkan kebolehan poligami
- Hukum negara yang melarang poligami tidak membatalkan hukum alQuran
- Hukum Poligami untuk melindungi perempuan bukan untuk merendahkan perempuan
- Perkawinan adalah ibadah maka poligami juga adalah ibadah
- Poligami adalah hak di tangan suami tanpa harus minta persetujuan istri
- Nabi mempraktikkan poligami

8. Upah Pekerja Perempuan

- Upah pekerja laki-laki lebih tinggi karena laki-laki lebih kuat, lincah dan ahli, lebih padat waktunya, perempuan lebih lemah dan banyak ngobrol
- Laki-laki penanggung jawab keluarga sedangkan perempuan tidak wajib bekerja.
- Laki-laki tidak banyak cuti

9. Atribusi Diri Istri Pada Nama Suami

- Istri harus menghargai suami
- Istri harus mendukung suami
- Istri harus memberi kepercayaan diri pada suami/harus bangga terhadap suami
- Aktifitas istri di kantor atas nama suami
- Kesuksesan istri adalah untuk kesuksesan suami

10. Konsep Diri Perempuan

- Perempuan harus tetap memperhatikan penampilan walaupun sudah memiliki modal intelektual untuk lebih memuluskan jalan karirnya mengimbangi laki-laki.
- Terbukti kalau perempuan yang lebih cantik mendapat kemudahan dalam beberapa bidang
- Adalah alamiah kalau perempuan mengandalkan fisiknya untuk membantu kesuksesannya
- Untuk beberapa pekerjaan penampilan fisik perempuan membawa keberuntungan
- Dalam beberapa bidang penampilan fisik perempuan lebih dibutuhkan dari kemampuan skill dan pikirannya.
- Penampilan fisik perempuan akan membantu kesuksesannya masih berlaku dan tidak bisa diingkari

11. Waris dan Wasiat Untuk Anak Perempuan

- Ketentuan hukum waris sudah sangat tegas dan Qat'i dalam al-Qur'an dan tidak bisa diganggu gugat karena angkanya tertera jelas
- Wasiat juga harus setengah karena perempuan akan ditanggung biaya hidupnya oleh suami
- Ketentuan waris harus tetap dilaksanakan setengah bagi perempuan, selanjutnya masalah kebutuhan yang tidak mampu anak-anak diajarkan untuk bersedekah dan berkasih sayang membantu saudaranya yang tidak mampu

- Wasiat hendaknya dilakukan sama dan melihat keadaan ekonomi anak, sedangkan waris harus tetap setengah pada perempuan.

12. Ranah Publik Masalah Rumah Tangga/Melaporkan Kekerasan Rumah Tangga

- Masalah rumah tangga adalah ranah privat dan tidak perlu diselesaikan di luar rumah
- Ajaran al-Qur'an bahwa perselisihan rumah tangga diselesaikan dengan keluarga kedua pihak bukan kepada orang yang tidak ada hubungan keluarga
- Masalah rumah tangga tidak boleh disimpulkan sebagai kekerasan melainkan harus dipahami dalam konteks untuk mendidik dan untuk tujuan kebaikan
- Membuak aib keluarga adalah dosa
- Masalah rumah tangga harus diselesaikan secepatnya jangan dibawa keluar sebelum membesar dan membesar dan membahayakan. Kalau tidak bisa diselesaikan di dalam internal keluarga besar harus dibawa ke pihak yang berwenang kalau sudah membahayakan.

Demikian gambaran umum alasan-alasan dan dalil keagamaan yang dikemukakan oleh para responden dalam mendukung perilaku non sensitif jender. Pada bab berikutnya, data kecenderungan dan alasan-alasan yang telah dikemukakan akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori dan kajian-kajian pustaka yang ada untuk mendapatkan pemahaman tentang fenomena yang terjadi.

BAB IV

ANALISIS DAN KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa ada pergeseran perilaku dalam konteks sensitif gender di antara para profesional. Dalam masalah tertentu ada kesamaan dalam cara pandangnya, namun pada masalah yang lain masing-masing kelompok profesional memiliki cara pandang yang berbeda. Berikut ini akan dijelaskan bagaimana para profesional menghadapi dan menyikapi permasalahan relasi gender dalam berbagai konteksnya.

A. Istri Bekerja/Keluar Rumah Mencari Penghasilan

Hasil penelitian menemukan bahwa kelompok profesi akademisi dan wiraswasta/pengusaha memiliki pandangan yang terbuka, bahwa seorang perempuan dapat mengaktualisasikan dirinya, tidak hanya sebagai ibu rumah tangga saja, namun juga bisa bekerja di luar rumah dan mendapatkan penghasilan yang layak. Namun kelompok profesi pelaku partai/ormas/LSM masih tetap menginginkan bahwa perempuan mempunyai tugas utama sebagai ibu rumah tangga karena itu sudah menjadi kewajibannya. Sedangkan kelompok ulama dan pegawai pemerintahan cenderung tidak menentukan sikap berkaitan dengan hal ini.

Polarisasi kepada tiga perilaku ini dalam masyarakat memperlihatkan bahwa pemahaman keagamaan yang menjadi nilai dasar bertindak bisa mengalami penafsiran yang beragam. Kelompok yang memberikan izin kepada istri untuk bekerja telah memahami

bahwa ruang perempuan tidak hanya di lingkup domestik dan laki-laki di lingkup publik. Kelompok ini tidak mampu memberikan dalil atau nas keagamaan tertentu mengenai kebolehan perempuan mengaktualisasikan dirinya. Yang terjadi biasanya adalah merasionalisasi pesan umum agama bahwa agama adalah untuk memberi rahmat kepada seluruh umat manusia dan bahwa setiap orang hendaknya menjadi orang yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada sebanyak mungkin manusia.

Seperti diuraikan pada bab teori, para sarjana Muslim juga telah merumuskan bahwa Islam menggariskan seorang Muslim yang sempurna adalah yang memenuhi kewajibannya terhadap diri, rumah tangga, masyarakat, agama dan negaranya. Kelompok yang tidak mengizinkan istri bekerja bertahan pada pemikiran bahwa tugas utama seorang istri adalah mengurus rumah tangga dan melayani suami. Bila ditelusuri pendapat-pendapat pada fikih klasik maka pandangan tidak mengizinkan istri keluar rumah ini bisa dirujuk kepada hadis-hadis tentang larangan melihat lawan jenis ataupun hadis-hadis tentang keutamaan salat di rumah. Kelompok ini tidak memperdulikan bahwa sebenarnya hadis-hadis tersebut setelah ditelusuri secara sanad sebagian besarnya adalah hadis *maudu'* ataupun hadis *da'if*. Kalaupun ada hadis yang sahih tentang keutamaan salat di rumah, hal itu harus ditafsirkan secara kontekstual dan tidak bisa dijadikan pegangan sebab begitu banyak juga hadis sahih yang menjelaskan bahwa seorang

perempuan tidak boleh dicegah untuk salat di mesjid.¹ Begitu juga nas tentang menahan pandangan (QS. al-Nur 30-31) telah dijelaskan oleh para ahli adalah dalam makna pandangan terhadap hal-hal yang akan menimbulkan syahwat dan birahi bukan pandangan dalam konteks pergaulan manusia. Satu kata yang sering dipakai sebagai senjata dalam melarang perempuan keluar rumah adalah kata fitnah yang didapati dari satu hadis yang memang diriwayatkan oleh Muslim dan juga Bukhari.² Akan tetapi, dengan pembacaan yang teliti akan sejumlah hadis lainnya, pemahaman yang benar akan substansi al-Quran dan juga pembedahan akan makna kata 'fitnah' itu sendiri dalam hadis dan al-Qur'an akan dipahami bahwa kata atau benda yang dirujuk sebagai fitnah tidak mesti kotor dan buruk karena kata ini juga digunakan kepada yang baik. Kata fitnah sendiri sebenarnya merupakan peringatan kepada lawannya. Jadi, laki-laki adalah fitnah kepada perempuan dan perempuan fitnah bagi laki-laki.

Dari pihak yang mendukung, telah muncul pula tafsir progresif yang mengajukan nas al-Qur'an surat al-Nisa 32 sebagai dalil yang mengisyaratkan dukungan al-Qur'an bahwa perempuan bisa dan boleh bahkan wajar memiliki penghasilan sendiri, di mana kata-kata yang dipakai al-Quran *kasabu* sebenarnya dapat dipahami sebagai usaha secara ekonomis dan terkait pencarian nafkah, *Dan janganlah kamu*

¹ Misalnya hadis, *La tamna'u ima'allahi masjidullah* (hadis sahihain-muttafaq ilaih), lihat kritik hadis-hadis tentang kesetaraan jender dalam *Wajah Baru Relasi Suami Istri-Telaah kitab 'Uqud al-Lujjayn* oleh Sinta Nuriyah dkk. (Jokjakarta Lkis dan FK3, 2001), tentang keutamaan salat di rumah hal. 111-136.

² Lihat pembahasan hadis tersebut pada Sinta Nuriyah, *Wajah Baru Relasi Suami Istri...*, hal. 150-159.

beriri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian dari kalian atas sebagian. Bagi laku-laki apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan apa yang mereka usahakan. Dan minta sajalah kepada Allah karuniaNya. Tetapi bagi yang tidak mendukung, ayat ini tidak dipahami berkaitan dengan pencarian harta melainkan sebagai balasan di akhirat, yang disimpulkan berdasarkan *asbab al-nuzul* ayat tersebut.³

Ringkasnya, pada zaman sekarang ini dalam era globalisasi, kebutuhan perempuan untuk keluar rumah pun tidak bisa dicegah dan sangat bervariasi, mulai dari menuntut ilmu, memenuhi kebutuhan rumah tangga, mengantar anak sekolah, dan sebagainya. Dengan pertimbangan masalahat, perempuan yang mengembangkan diri justru lebih baik dari perempuan yang hanya di rumah dan tidak pernah keluar, tidak bekerja atau bermasyarakat. Perempuan-perempuan ini akan ketinggalan zaman, tidak cakap, dan tidak bisa mencari solusi atau berbuat apa-apa ketika tiba-tiba terjadi suatu musibah kepada suaminya. Akhirnya, dia dan anaknya menjadi beban bagi orang lain.

Dengan fakta dan kondisi ini, sebenarnya tidak ada alasan bagi mereka yang melarang istri bekerja kecuali dikarenakan ketinggian egonya dan merasa dirinya terancam sehingga dia membentuk mekanisme pertahanan diri.

³ Syu'bah Asa, "Perempuan : Di Dalam dan di Luar Fikih" dalam *Membicang Feminisme*, (ed.). Mansour Fakih (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 111-112

B. Harus memiliki anak laki-laki

Hanya ada satu kelompok profesi yang menyetujui bahwa dalam keluarga harus ada anak laki-lakinya. Fenomena ini mengindikasikan bahwa di kalangan profesi ini nilai anak laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan. Seperti yang diacu oleh budaya Batak bahwa anak laki-laki adalah penerus marga, artinya kalau dalam suatu keluarga tidak ada anak laki-lakinya maka putuslah penerus generasi marganya.

C. Mengutamakan pendidikan untuk anak laki-laki

Semua kelompok profesi cenderung menyetujui bahwa jika keluarga dihadapkan pada suatu kondisi yang pelik berkaitan dengan keterbatasan dana pendidikan, maka mereka cenderung memilih anak laki-lakinya yang diberi kesempatan lebih dulu karena laki-laki akan menjadi tulang punggung keluarga sehingga anak laki-laki akan lebih didahulukan untuk menyelesaikan pendidikannya.

D. Suami menjadi pengambil keputusan dalam keluarga

Hanya kelompok tokoh ormas saja yang dapat menerima dan menyetujui bahwa suami adalah pengambil keputusan mutlak dalam keluarga. Pada kelompok profesi yang lain pengambil keputusan dalam keluarga tidak mutlak menjadi tugas utama suami, istri juga harus dilibatkan dan bertanggung jawab terhadap keberadaan dan keberlangsungan keluarga. Bahkan juga ikut menyangga segala

kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga, sehingga peran istri dalam keluarga menjadi lebih dihargai.

Seperti telah diajukan dalam bab teori, bahwa perilaku memaksakan keputusan di tangan suami sebenarnya adalah pengingkaran terhadap ajaran al-Quran tentang *mu'asyarah bil ma'ruf* (QS. al-Nisa' 19; al-Baqarah 228). Menurut Wahbah al-Zuhaili, ayat ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak atas laki-laki, sebagaimana laki-laki memiliki hak atas perempuan. Dasar dari pembagian hak ini adalah 'urf dan fitrah. Setiap hak selalu ada kewajiban, dan sebaliknya. Termasuk diantara hak ini adalah hak untuk didengar dan dihargai dalam fitrahnya sebagai manusia yang tentunya merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk diakui keberadaannya. Demikian juga istri dalam rumah tangganya. Jadi yang paling penting dalam *mu'asyarah bil-ma'ruf* adalah bahwa di antara suami dan istri ada visi kuat yang sama tentang kesetaraan manusia dan kebersamaan rasa memiliki rumah tangga tersebut. Yang satu tidak menyusupkan pandangan subordinasi ke hati mereka terhadap yang lain.⁴

E. Harta gono-gini

Dari kelompok profesi yang diteliti diketahui bahwa semua kelompok profesi yang meliputi akademisi, ulama, politisi, tokoh ormas/LSM dan wiraswasta menunjukkan sikap menyetujui adanya

⁴ KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan – Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, pengantar KH. MA. Sahal Mahfud (Jokjakarta : LkiS dan Rahima, 2002), hal. 114-115

pembagian harta gono-gini, artinya mereka bisa memahami bahwa harta yang terkumpul selama masa pernikahan menjadi harta bersama antara suami dan isteri. Hak perempuan setara dengan laki-laki dalam pembagian harta gono-gini.

Dari data ini terlihat bahwa telah berlaku persepsi tentang penghayatan ekonomi pada pekerjaan istri artinya tidak membatasi atau menghalangi hak-hak ekonomi perempuan. Artinya telah mulai tertolaknya pendekatan marxisme atau radikal yang memusatkan nilai ekonomi pada penguasaan materi dan produksi. Sehingga, kerja dihargai secara ekonomis bila menghasilkan materi dan di lingkaran pekerjaan produksi ekonomi.

Walaupun kecenderungan umum adalah tidak marginalisasi akan tetapi masih tercatat adanya kelompok yang tidak memberikan dan kelompok yang hanya memberikan kalau suami dan istri sama-sama bekerja. Kelompok terakhir ini tentunya masih terjebak pada konsep bahwa istri tidak memiliki hak dan kepemilikan pribadi dalam perkawinan. Bahwa seluruh hidup dan diri perempuan adalah pengabdian persembahan untuk suami sehingga ia tidak perlu harus mendapat balasan material. Seperti ditunjukkan dalam kajian teori tentang perilaku-prilaku yang berlaku dalam masyarakat, di antaranya didapat dari kitab-kitab yang diajarkan dan pandangan-pandangan keagamaan yang disosialisasikan, tampak bahwa hadis-hadis yang masuk ke dalam pemikiran masyarakat misalnya bahwa kepatuhan kepada suami adalah kualitas dan kekayaan tertinggi seorang wanita yaitu senilai pahala jihad di medan perang yang

mengorbankan jiwa raga. Panduan wanita salihah yang ditetapkan adalah perempuan yang tidak menuntut-nuntut kepada suaminya, yang menerima apa adanya, yang selalu bersyukur apapun yang diberi suaminya. Hadis-hadis tentang ini yang telah diteliti oleh suatu tim ternyata mayoritas adalah *daif*, atau *maudu'*. Begitu juga dipahami, seorang perempuan jangan berusaha menerima harta dari suaminya, ia malah digariskan memberi semua hartanya bahkan seluruh jiwanya. Dia dilarang menggunakan harta suaminya tanpa izin. Malah lebih parah lagi, bahkan untuk menggunakan harta miliknya sendiri pun dia tetap harus menundukkan diri pada perintah suaminya. Bisa dibayangkan bagaimana perilaku yang muncul kalau yang ditanamkan dalam kelas selama bertahun-tahun adalah teks-teks sebagai berikut.

"Para wanita sebaiknya mengetahui kalau dirinya seperti budak yang dinikahi tuannya dan tawanan yang lemah tak berdaya dalam kekuasaan seseorang. Maka wanita tidak boleh membelanjakan harta suami untuk apa saja kecuali dengan izinnya. Bahkan mayoritas ulama mengatakan bahwa istri itu tidak boleh membelanjakan hartanya sendiri kecuali dengan izin suaminya. Istri dilarang membelanjakan hartanya karena dianggap seperti orang banyak hutang.....Istri wajib malu terhadap suami, tidak boleh menentang, harus menundukkan muka dan pandangannya di hadapan suami, taat terhadap suami ketika diperintah apa saja selain maksiat, diam ketika suami berbicara, berdiri ketika suami datang dan pergi, menampakkan cintanya terhadap suami apabila suami mendekatinya....Hadis dari

Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, "Andaikata seorang wanita mempunyai harta kekayaan seperti kerajaan Nabi Sulaiman bin Daud as. Lalu suaminya memakan harta itu, lalu istrinya bertanya kepada suaminya, "Mana hartaku ?", Allah pasti melebur 40 tahun amal wanita itu", Hadis dari Usman bin 'Affan ra. Bahwa Nabi bersabda, "Andaikata seorang wanita memiliki dunia dan seisinya, lalu membelanjakan semua itu untuk suaminya, kemudian ia mengungkit-ungkit pemberian itu selang beberapa waktu, maka Allah melebur amalnya dan mengumpulkannya bersama Qarun".⁵

Kedua hadis yang diriwayatkan di atas telah ditakhrij oleh tim kajian kitab kuning dan ditemukan bahwa kedua hadis di atas tidak diragukan adalah hadis *maudu'* dan tidak ditemukan dalam kitab-kitab yang muktabar.

F. Kepemimpinan perempuan

Pada umumnya laki-laki belum bisa menerima kenyataan kepemimpinan perempuan di lingkungan sosialnya. Mereka tetap menganggap posisi yang sub ordinat terhadap kepemimpinan perempuan. Secara kodrati laki-laki tidak bisa menerima keunggulan perempuan dalam bidang kepemimpinan. Ada kecenderungan kaum laki-laki menganggap perempuan adalah makhluk yang emosional sehingga di saat menghadapi suatu masalah tidak dapat menyelesaikan secara rasional. Ini terbukti dari 5 kelompok profesi yang diteliti 4

⁵ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Ta'liq wa Takhrij 'ala Syarh 'Uqud al-Lujayn fi Bayan Huquq al-Zaujain li Umar Nawawi (Banten)* (Jakarta : Lajnah Dirasah Kutub al-Turats, tt), hal. 47-48, 59-60.

profesi menolak kepemimpinan perempuan, yaitu kelompok profesi akademisi, ulama, politisi dan wiraswata; sementara kelompok profesi tokoh ormas/LSM cenderung ragu-ragu dalam menentukan sikap terhadap kepemimpinan perempuan. Mereka masih memilah-milah konteksnya, artinya ketika dalam konteks perempuan menjadi gubernur mereka juga cenderung menolak tapi dalam konteks lain seperti kepala kantor atau organisasi mereka masih bisa menerima.

Permasalahan kepemimpinan perempuan dalam fikih klasik termasuk perdebatan yang sangat hangat dan panjang. Diskusi para fuqaha pada umumnya biasanya dimulai dari kepemimpinan perempuan dalam ibadah salat, yang tidak mendapatkan sinyal kebolehan. Setelah menutup pintu ini, lalu para ulama menganalogikan bahwa perempuan tidak bisa diangkat sebagai pemimpin publik dan sosial kemasyarakatan. Ketidakbolehan ini lalu dibentengi dengan berbagai hadis yang menyatakan kelemahan perempuan secara fisik dan intelektual. Ringkasnya, fikih tidak membuka pintu sedikitpun bagi perempuan untuk menjadi pemimpin puncak di suatu negara bahkan daerah. Beberapa pendapat menyendirikan memang membolehkan perempuan menjadi hakim atau bidang lain di mana dirinya sebagai pengambil keputusan, tetapi tidak di bidang politik publik.

Masyarakat umumnya, yang diwakili 5 golongan profesi ini telah terbutakan dengan realitas bahwa telah banyak perempuan, termasuk perempuan Muslim, yang berhasil menembus kursi R1 di sebuah negara. Hal ini karena di semua profesi, kecenderungan

subordinasi terjadi. Begitupun, bila dilihat dari angka persentase telah terdapat pendapat yang memberikan kepercayaan kepada perempuan untuk menjadi pemimpin walaupun masih sampai tingkat gubernur. Karena secara fikih semua pendapat telah menutup rapat kesempatan ini, pendapat yang revolusioner tersebut mestinya telah mencari sandaran pada pesan umum dan esensi etika dari al-Qur'an. Pada sumber ini sangat mudah ditemukan kesepakatan yang akan memayungi pandangan yang membolehkan tersebut. Salah satunya yang telah diajukan dalam bab kajian teori penelitian ini, bahwa perempuan sebagai makhluk manusia memiliki kewajiban terhadap negaranya.

Lantas, bagaimana al-Qur'an dihadapkan dengan kenyataan realitas tersebut dan melepaskan diri dari cengkeraman tafsiran yang patriarkis dan diskriminatif tersebut. Untuk ini maka ayat tentang laki-laki adalah *qawwam* bagi perempuan di mana pengertiannya dalam fikih adalah penguasa, yang kemudian merambat ke seluruh ranah kehidupan, tidak hanya pada ranah rumah tangga tetapi seluruh aspek kehidupan kemasyarakatan termasuk politik, pengertian ini merupakan pengertian yang bersifat sosiologis dan kontekstual. Seharusnya ayat ini tidak menggiring kepada penempatan subordinasi perempuan. Kenyataan sosial dewasa ini memperlihatkan bahwa keyakinan akan kehebatan laki-laki secara intelektual dan profesi telah diruntuhkan. Kehebatan siapapun tidak hanya laki-laki untuk zaman ini ditentukan oleh intelektualitasnya, dan itu menjadi syarat bagi kepemimpinan baik di ruang domestik maupun publik. Dengan syarat

ini maka terbuka kesempatan yang luas bagi perempuan untuk menduduki posisi-posisi kepemimpinan publik, termasuk menjadi presiden. Akan tetapi, bagi yang tidak menerima ini mereka mempertahankan pandangan bahwa makna *qawwam* terkait dengan sifat-sifat fisik dan kodrati, yang alamiah dan merupakan pemberian Tuhan. Karena kata ini diacu kepada laki-laki maka selamanya laki-laki akan menjadi pelindung terhadap perempuan baik dalam urusan rumah tangga maupun publik.

Berkenaan hadis Nabi tentang keadaan penguasa atau Kisra di Persia pada masa ini, dianalisis oleh para ahli tafsir bahwa hadis ini adalah hadis khabar dan bukan hadis tentang ketetapan hukum. Pada waktu itu Nabi memberitahukan bahwa akan ada kerajaan yang di pegang oleh seorang perempuan yang menuju keruntuhan.

G. Poligami

Sungguh menarik bahwa dalam persoalan poligami, sudah banyak kalangan profesi yang cenderung menolak dan tidak sependapat untuk melakukan poligami. Hanya kalangan profesi politisi yang cenderung bersikap ragu-ragu dalam menanggapi konteks poligami. Ini diduga karena sebagai politisi yang berhubungan dengan massal rawan terhadap munculnya skandal-skandal hubungan dan interaksi yang melenceng antara perempuan dan laki-laki.

Dari data yang ditemukan diketahui bahwa indikator poligami berhubungan positif dengan perilaku suami pengambil keputusan

tunggal dalam keluarga. Kelompok politisi yang dominan kepada perilaku suami pengambil keputusan tunggal dalam keluarga ternyata memiliki ketersebaran yang tinggi dalam perilaku menerima poligami. Bahkan angka tertinggi untuk sikap melakukan poligami tanpa disertai syarat terdapat dalam kelompok ini dan juga kelompok ulama. Yang mengherankan dan sepertinya harus dilakukan pengkajian selanjutnya adalah tentang sikap kelompok pemerintahan yang ternyata masih sangat rendah ketersebaran perilaku 'untuk tidak melakukan poligami. Sebaliknya, kelompok ini sangat tinggi persentasenya dalam pemilihan perilaku 'melakukan dengan syarat tertentu dan mereka masih menganggap wajar jika laki-laki selalu berpikir poligami', sampai mencapai angka 75 %. Apa yang dapat dianalisis dari data ini adalah bahwa kelompok profesi pemerintahan secara umum harus tunduk kepada legislasi formal dan aturan yang sudah diundangkan. Seperti diketahui bahwa dalam hukum telah diundangkan bahwa poligami adalah diperketat, bahkan hukum dasarnya sudah dilarang tetapi diberi solusi untuk kondisi tertentu yang merusak tujuan berumah tangga.

Maka terlihat bahwa kelompok profesi pegawai pemerintahan mayoritas memilih perilaku sesuai bunyi peraturan dan tidak terlihat kecenderungan untuk melakukan rasionalisasi dan analisis jender dalam masalah ini. Malah, dalam kelompok ini pemilihan sikap untuk melakukan tanpa disertai syarat masih sangat meluas. Pemilihan sikap ini jelas merupakan bagian dari paket nilai-nilai pengabdian dan pengorbanan total istri yang dibungkus dengan norma-norma dan nas-

nas agama. Bahwa pencapaian tertinggi istri adalah keridaan suami, sampai mengaburkan kebenaran yang hakiki bahwa keridaan Allah yang merupakan puncak pencapaian seluruh manusia. Adapun keridaan Allah tersebut tidak akan berimplikasi kepada menyakiti manusia karena keridaan Allah tidak sejalan dan tidak berada pada orientasi materil, pada kesenangan sekelompok atau segolongan umat manusia dan mengambil hak kemanusiaan segolongan manusia lainnya.

Agama melihat bahwa perkawinan bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai keridaan Allah dan menjalankan hukum-hukum Allah. Karena itu, agama memberikan juga garisan dan prosedur untuk menyelesaikan suatu masalah ketika perkawinan tidak lagi dapat menegakkan hukum Allah dengan adanya hukum perceraian. Tidak ada isyarat sedikitpun dalam agama tentang ketaatan mutlak istri yang harus dipersembahkan untuk segala kemauan dan kesenangan kemanusiaan suami. Kedua, suatu tujuan keridaan suami tidak bisa dicapai dengan jalan dan metode yang merusak dan salah yaitu kekerasan psikologis istri. Ketiga, bahwa hukum poligami sendiri dalam AlQur'an bukanlah hukum primer yang terkait dengan *maqasid* agama secara langsung. Keempat, secara *tariqat al-istinbath*, aturan tentang poligami masih sangat terbuka untuk memunculkan perbedaan pemahaman dari segi status hukumnya dan tingkat kebolehannya.

Dengan kesadaran dan analisis jender ini maka pemahaman tentang kedudukan Poligami sebagai unsur dan bagian dari paket

keistimewaan dan kelebihan laki-laki yang digariskan al-Quran, seperti yang terlihat masih menyebar, utamanya, pada kelompok profesi pemerintahan dan pelaku partai dan ormas akan dapat di atasi. Begitu juga hadis-hadis yang *maudu'* tidak lagi bisa mendominasi akal sehat yang merupakan senjata manusia yang dianugerahkan Allah, seperti hadis "Burung-burung di udara, ikan-ikan besar di laut, dan para malaikat di langit benar-benar memohonkan ampunan bagi wanita yang mentaati suaminya, selagi ia itu dalam keridaan suaminya."⁶

H. Upah pekerja laki-laki lebih tinggi daripada perempuan

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa hanya satu kelompok profesi yang benar-benar menyetujui upah pekerja laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Fenomena ini menggambarkan bahwa kelompok akademisi lebih cenderung bersikap rasional, mereka berpendapat bahwa tanggung jawab dan kepentingan pekerjaan tidak bisa didasarkan pada tinjauan jender. Di saat perempuan mengambil cuti melahirkan maka secara otomatis dia tidak akan bekerja selama 3 bulan, sementara pekerjaan tidak dapat ditinggalkan begitu saja; dengan kata lain tidak dapat dialihkan pada orang lain. Akibatnya pekerjaan tidak dapat dituntaskan. Berdasarkan kondisi inilah maka wajarlah upah pekerja laki-laki menjadi lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kelompok profesi lainnya menolak upah laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, ini karena mereka beranggapan bahwa

⁶ Merupakan teks dalam kitab '*Uqud al-Lujjain*' syekh Nawawi Banten, lihat Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Ta'liq wa Takhrij 'ala Syarh 'Uqud al-Lujjain*, hal. 56

potensi dan kemampuan antara laki-laki dan perempuan adalah sama; sehingga mereka harus mendapatkan penghargaan yang sama dalam pemberian upah.

I. Keadilan hukum berwawasan gender

Dari penelitian ini ditemukan bahwa semua kelompok profesi yang diteliti menyatakan penolakan terhadap adanya keadilan hukum berperspektif gender. Mereka memandang bahwa pada saat ini masih sering terjadi keadilan hukum cenderung berpihak pada laki-laki. Sebagai contoh ketika seorang perempuan menjadi korban perkosaan pengadilan tidak mampu membuktikan adanya saksi dari peristiwa tersebut maka pelaku perkosaan akan terbebas dari tuntutan hukum sementara perempuan sebagai korban perkosaan menderita seumur hidup. Ini membuktikan bahwa keadilan hukum tidak berpihak pada perempuan.

J. Kecantikan/ketampanan modal sukses

Dari penelitian ini ditemukan bahwa ternyata semua kelompok profesi yang diteliti menyatakan penolakan terhadap konteks kecantikan atau ketampanan merupakan modal suksesnya seseorang. Ini artinya modal kecantikan atau ketampanan tidak cukup untuk menentukan sukses tidaknya seseorang. Mereka beranggapan bahwa kecantikan atau ketampanan hanya merupakan faktor pendukung saja, artinya kalau seseorang memiliki kecantikan atau ketampanan akan

memudahkan mereka dalam menjalin relasi interpersonal yang didasarkan oleh daya atraktif yang dimiliki oleh individu tersebut.

K. Atribut nama suami

Hanya kelompok politisi yang dapat menerima dan menyetujui pengenaan nama suami sebagai atribut yang melekat pada diri seorang isteri. Ini mungkin berkaitan dengan upaya untuk promosi nama besar dirinya agar bisa dikenal oleh banyak orang. Kelompok profesi ulama cenderung bersikap abstain dalam konteks ini, karena menurut keyakinan ajaran agama pengenaan nama suami pada nama isteri tidak dianjurkan. Justru di belakang nama isteri seharusnya adalah nama orang tuanya (bapakunya).

L. Warisan anak laki-laki 2 kali lipat perempuan

Hanya kelompok profesi politisi saja yang cenderung bersikap ragu-ragu terhadap konteks pembagian harta waris pada anak laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki mendapatkan dua kali lipatnya perempuan. Mereka beranggapan bahwa pembagian warisan antara anak laki-laki dengan perempuan sebaiknya sama rata dengan dasar adanya keikhlasan dari masing-masing pihak. Pendapat kelompok profesi ini cukup menarik karena memperlihatkan pengaruh ide-ide progresif telah mulai tampak pada masyarakat dengan keberanian merasionalisasi nas-nas yang oleh mayoritas umat Islam dipandang tidak bisa diganggu gugat karena sudah tegas dan *qat'i al-tsubut*.

Dalam hal waris ini, karena menyangkut isu yang sensitif berikut akan diuraikan analisis permasalahan yang berkembang yang direkam dari hasil wawancara⁷ dan temuan data di pengadilan. Hal ini untuk mendudukan di mana dan bagaimana sebenarnya posisi dan keabsahan perilaku masyarakat dan untuk melihat sejauh mana sebenarnya transformasi kesetaraan gender yang telah terjadi dalam bidang waris.

Dalam kewarisan Islam di Indonesia yang awalnya bersumber kepada kitab-kitab fiqih ternyata telah mengalami beberapa pergeseran pemahaman terutama pada hal-hal yang didasarkan kepada dalil-dalil yang masih bersifat *dzonni*. Di bawah ini akan disampaikan beberapa kasus antara lain:

1. Ahli waris pengganti

Dalam beberapa kitab fiqih maupun Kompilasi Hukum Islam, anak yang menggantikan kedudukan ayahnya adalah anak laki-laki dan anak perempuan dari garis keturunan laki-laki yang ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, sedangkan anak laki-laki dan anak perempuan dari garis keturunan perempuan tidak berhak menggantikan kedudukan ibunya untuk memperoleh harta dari kakeknya. Menurut Hazairin bahwa anak yang menggantikan kedudukan anaknya itu boleh dari garis keturunan laki-laki maupun dari garis keturunan perempuan yang terpenting bahwa orang yang digantikan itu kedudukannya sudah lebih dahulu meninggal dari pewaris, dan orang yang digantikan itu merupakan penghubung antara

⁷ Wawancara dengan Bapak A di pengadilan agama Medan, tanggal 5 November 2013.

anaknyanya dengan si pewaris. Hal tersebut senada dengan KUH Perdata bahwa ahli waris pengganti bisa dari pihak keturunan anak laki-laki maupun dari pihak keturunan perempuan.

Memperhatikan pendapat diatas, ternyata dalam masalah waris baik dalam KHI maupun teks-teks Islam masih terjadi diskriminatif terhadap perempuan. Pendapat tersebut masih sangat dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan bangsa Arab yang masih *patrilineal*. Hal tersebut bertentangan dengan sebab turunya al-Quran tentang waris yang merupakan respon dari ketidak-adilan yang menimpa perempuan, karena pada saat itu perempuan tidak mendapat warisan dari peninggalan orang tuanya bahkan dianggap sebagai barang warisan oleh keluarga suaminya apabila suaminya meninggal dunia. Perempuan dianggap rendah bahkan banyak anak perempuan yang dikubur hidup-hidup karena mereka merasa malu memiliki anak perempuan (Q.S 16: 59). Pendapat diatas juga bertentangan dengan esensi ayat al-Quran surat an Nisa ayat 11 bahwa pembagian warisan bukan hanya untuk anak laki-laki tetapi juga anak perempuan.

2. Pembagian waris anak perempuan

Anak perempuan berhak menerima bagian:

- a. Setengah, bila hanya seorang dan tidak bersama dengan anak laki-laki
- b. Dua pertiga, bila dua orang atau lebih dan tidak bersama dengan anak laki-laki. Apabila bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak perempuan adalah setengah bagian anak laki-laki.

Pembagian harta warisan untuk anak perempuan ini dijelaskan dalam Alquran surat an Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرَّمَلْ حَظُّ الْإِنثِيْنِ فَإِنْ كُنْ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَاثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang bagian pusaka untuk anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separuh harta. (Q.S. an Nisa:11).⁸

Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 176 juga dikatakan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian dan apabila perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagi anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Menurut keputusan Mahkamah Agung No.122K/AG/1995⁹ dalam kasus seseorang yang meninggal dengan meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan sekandung dan tiga orang saudara laki-laki sekandung. Dalam keputusan Mahkamah Agung ini dinyatakan bahwa selama masih ada anak baik laki-laki maupun perempuan maka hak mewarisi dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami atau istri, menjadi tertutup. Dengan demikian seorang anak perempuan bisa mendapat seluruh harta warisan orang tuanya apabila ahli waris

⁸ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 116

⁹ Lihat Putusan Mahkamah Agung RI No 122 K/Ag/1995 tanggal 30 April 1996

hanya bersama dengan saudara laki-laki/perempuan sekandung. Hal ini menyalahi kitab-kitab fiqh klasik¹⁰ yang menyatakan bahwa saudara kandung atau saudara seapak baik laki-laki maupun perempuan akan terhibab (tidakmendapat warisan) apabila ada ayah atau anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki .

c. Menjadi asabah, apabila anak perempuan tunggal bersama dengan saudara perempuan. Dalam beberapa kitab fiqh,¹¹ dinyatakan apabila ahli waris hanya seorang anak perempuan bersama dengan saudara perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki dan tidak ada ahli waris laki-laki, maka keduanya secara bersama-sama menjadi ahli waris asabah.

Dalam putusan tersebut ditetapkan bahwa selama masih ada anak (baik laki-laki maupun perempuan), maka hak mewarisi dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dari pewaris kecuali orang tua, suami atau isteri menjadi tertutup.

Putusan Mahkamah Agung itu mengacu kepada surat an Nisa 4:176. Dalam ayat tersebut dinyatakan tentang bagian saudara apabila pewaris tidak meninggalkan anak. Dari ayat di atas dapat dipahami

¹⁰ Lihat Ibn qudamah, *al Mugni li ibn al Qudamah*, (t.t.p: Dar al Manar, Juz XI, Cet ke III, 1367 H), h.166. lihat juga Zainuddin bin Abdul Azis, *al Malibari Fath al Muin*, (Kudus: Menara, Jilid I, 1980), h.420. lihat Juga Ibn Rusyd, *Bidayah al Mujtahid*, (Singapura: Sulaiman Mar'i, Juz II, 1960), h.344. lihat juga Abi Yahya Zakaria al Ansari, *Fath al Wahab*, (Dar al Ihya' al qutub al Arabiyah, Juz II, t.th), h.5. lihat juga Syihabuddin al Qalyubi dan Umairah, *Mahalli*, (Mesir: Dar Ilya al Kutub al Arabiyah, Juz II, t. th), h. 137dan 141 dan masih banyak lagi kitab fiqh yang sepaham dengan pendapat ini

¹¹ Ibn Qudamah, *ibid.*, h.168, Abi Bkr, *'ianah at talibin*, Juz III, (ttp: al-Ma'arif, tt), h.228. lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*, Jilid III, (Beirut: Dar al Fikr, 1977), h.438. lihat juga Syarqawi, *as Syarqawi 'ala at Tahrir*, Juz II, (Mesir: Dar al Ihya al Kutub, t.th), h.192

secara *mafhum mukhalafah* atau kebalikannya bila seorang pewaris meninggalkan anak, maka saudara tidak mendapatkan bagian warisan, karena ayat tersebut dipandang masih dalil yang *zanni*, para ulama dalam menafsirkan ayat tersebut terjadi perbedaan pendapat.

Menurut Jumhur ulama yang dimaksud dengan "*walad*" dalam ayat tersebut adalah khusus untuk anak laki-laki, sedangkan menurut penafsiran Ibn Abbas yaitu seorang sahabat Nabi yang dikutip dalam beberapa tafsir bahwa pengertian "*walad*" tidak hanya untuk anak laki-laki, tetapi juga mencakup anak perempuan.¹²

Perbedaan penafsiran tersebut berakibat kepada terjadinya perbedaan pendapat dalam bidang fiqh. Jumhur ulama berpendapat bahwa keberadaan anak perempuan tunggal tidak merupakan penghalang mewarisi terhadap saudara baik laki-laki maupun perempuan, artinya jika ahli warisnya hanya anak perempuan saja, maka saudara tetap mendapatkan bagian warisan. Menurut mazhab Zahiri keberadaan anak, baik laki-laki maupun anak perempuan dapat menghalangi saudara, baik laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan warisan. Dalam kasus di atas ahli waris yang ada hanya seorang anak perempuan dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan dari orang yang meninggal, maka bagian saudara terhijab atau tidak mendapatkan warisan. Apabila masalah ini dianalisis dari pendekatan sumber, maka putusan Mahkamah Agung tentang anak

¹² Abi Abd Allah Muhammad bin Ahmad al Ansari al Qurtubi, *al Jami' li al Ahkam al Qur'an*, Jilid III, (Beirut: Dar al Kutub al-'Aliyah, 1988), h.21. lihat juga Ibn Kasir al Kursy, *Tafsir Ibn Katsir*, Juz I, (Beirut: Dar al Fikr, 1981), h.594-595. lihat juga Muhammad Husain at Thabataba'i, *al Mizan fi Tafsir al Qur'an*, Juz V, (Beirut: Muasasat al 'Alami li al Matba'ah, 1991), h. 155-158

perempuan dapat menghibab saudara baik laki-laki maupun perempuan adalah suatu putusan yang dianggap baru, karena menyalahi pendapat Jumhur ulama dan bertentangan dengan kitab-kitab Fiqh yang dipakai rujukan oleh KHI. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 182 menyebutkan anak secara mutlak artinya tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, tetapi dalam kitab-kitab fiqh yang menjadi rujukan KHI dinyatakan bahwa anak perempuan tunggal tidak menghibab bagian saudara laki-laki dan perempuan.

Apabila ditinjau menurut hukum Islam karena tidak ada satu aturan yang mengharuskan untuk terikat kepada referensi KHI, maka putusan Mahkamah Agung tidak bisa dikatakan bertentangan dengan hukum Islam, karena Mahkamah Agung merujuk kepada literatur keislaman yang lain yaitu penafsiran ibn Abbas.

Menurut Mansour Faqih agar tujuan hukum dapat tercapai, apabila dalil yang dipakai bersifat *zanni*, maka untuk memahaminya diperlukan pisau analisis yang harus dipinjam dari ilmu-ilmu lain termasuk meminjam pisau analisis gender, sehingga pemahaman dan penafsiran terhadap ajaran agama akan berkembang sesuai dengan realitas sosial dan keadilan yang dicapai tetap relevan sepanjang zaman.¹³

Hal ini sesuai dengan pendapat Nasr Hamid Abu Zayd yang menyatakan bahwa salah satu upaya mengubah pandangan umat Islam tentang perempuan adalah dengan melakukan pembacaan dan penafsiran ulang terhadap teks-teks keagamaan, karena penafsiran

¹³ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet VII, 2003), h.136

terhadap teks-teks keagamaan dikonstruksi sesuai dengan karakter dan situasi sosial pada saat teks-teks keagamaan tersebut ditafsirkan.¹⁴

Berdasarkan paparan di atas menunjukkan adanya peningkatan hak-hak perempuan dalam masalah warisan di Indonesia. Hal tersebut sangat mendekati kepada keadilan dan kesetaraan gender yang diperjuangkan oleh perempuan khususnya di Indonesia. Dengan demikian bila dilihat dari kajian gender mengenai warisan perempuan menurut hukum Islam sangat sesuai dengan misi diturunkannya ayat Alquran mengenai waris. Tujuan ayat tersebut diturunkan adalah dalam rangka memberantas ketidakadilan yang menimpa kaum perempuan, oleh sebab itu pembagian waris menurut hukum Islam lebih mendekati keadilan karena sesuai dengan beban dan hak serta kewajiban perempuan baik dalam rumah tangga maupun masyarakat.

M. Melaporkan kekerasan dalam rumah tangga

Dalam masalah ranah publik dan ranah privat yang diindikasikan dengan perilaku melaporkan kekerasan dalam rumah tangga, tampak bahwa hanya pada kelompok pengusaha dan wiraswasta tersebar kecenderungan perilaku menolak kekerasan dengan melaporkannya. Profesi lainnya cenderung menerima dan memelihara kekerasan tersebut dengan memilih tidak melaporkan. Dari persentase

¹⁴ Nasr Hamid Abu Zayd, *Dawair al Khauf Qira'ah fi Khitabal- Mar'ah*, Terj. Muhammad Nur Ichwan dan Muhammad Syamsul Hadi, *Dekonstruksi Gender Kritik Wacana Perempuan Dalam Islam*, (Yogyakarta: Samha dan PSW IAIN Suka dan Mc Gill, Cet I, 2003), h.VIII

yang terdata, terlihat bahwa sensitifitas jender masih sangat rendah di bidang ini.

Prilaku menerima dan memelihara kekerasan dalam rumah tangga didasari pada pandangan untuk menyembunyikan aib keluarga, yang lebih jauh lagi faktornya untuk menghormati suami, untuk memelihara nama baik suami dan melindungi dan menghindari suami dari hukuman dan akibat-akibat yang akan mensulitkannya. Semua ini dirujuk kepada nilai-nilai yang ditanamkan bahwa kesabaran seorang istri akan mendapat ganjaran surga. Masyarakat belum mendapatkan penjelasan keagamaan yang lebih mencerahkan, yang lebih manusiawi dan memberdayakan bahwa suatu tujuan yang baik tidak boleh dicapai dengan cara yang tidak baik atau memberikan akibat-akibat yang tidak baik. Tujuan untuk menghormati suami dan mempertahankan rumah tangga tidak bisa dicapai dengan cara mengorbankan perasaan istri apalagi sampai mematikan dan menghancurkan kehidupan istri.

Dalam kerangka inilah hendaknya dibaca hadis-hadis yang mungkin bernilai baik tetapi kemudian menggiring kepada penentangan prinsip dasar Islam karena dibaca dengan pendekatan yang subjektif, tidak kontekstual, tidak menggunakan akal dan hati, hingga memunculkan prilaku yang *a-qur'anic*.

Seperti hadis, "Barangsiapa yang sabar menghadapi keburukan budi pekerti suaminya, maka Allah akan memberinya pahala seperti pahala Asiyah (puteri Muzahin) isteri Fir'aun."

Secara sanad, hadis ini adalah hadis *maudu'*. Kalaupun hendak dijadikan sandaran, tentu hadis ini tidak dimaksudkan sebagai

legitimasi bahwa suami bisa berbuat apa saja dan istri harus bersabar dalam semua keadaan.

Begitu juga misalnya teks-teks yang mengajarkan bahwa,

“suami diperbolehkan memukul istri jika (antara lain) : -) istri menolak berhias dan bersolek di hadapan suami, -) menolak ajakan tidur, -) keluar rumah tanpa izin, -) menampakkan wajahnya kepada lelaki yang bukan mahramnya, -) memukul anaknya yang sedang menangis, -) mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti bodoh kepada suami walaupun suami mencaci maki terlebih dahulu, -) dst.¹⁵

Dapat dilihat bahwa teks-teks ini masih sangat menggiring kepada perilaku non sensitif gender.

Terakhir, dari keseluruhan analisis tentang kecenderungan perilaku gender masyarakat di kalangan 5 profesi di kota Medan dapat diberikan catatan akhir sebagai berikut. Bahwa penelitian ini berangkat dari asumsi pertama, telah terjadi kesadaran dan sensitif gender sebagai pengaruh dari program mainstreaming gender yang telah berjalan lebih kurang dua dekade. Asumsi kedua, bahwa perubahan perilaku tersebut mengkondisikan penafsiran ulang terhadap pemahaman keagamaan tradisional masyarakat sebagai pengaruh dari penerimaan ide-ide gender dimaksud. Hal ini berangkat dari teori bahwa pemahaman dan tradisi agama tradisional telah ikut bermain aktif dalam menciptakan pemikiran dan perilaku bias gender.

Di lapangan ditemukan bahwa benar telah terjadi pergeseran nilai, pandangan, sikap dan sampai perubahan dalam perilaku ke arah

¹⁵ lihat Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Ta'liq wa Takhrij 'ala Syarh 'Uqud al-Lujjayn*, hal. 29

yang lebih sensitif gender dalam berbagai bidang, aspek dan konteks kehidupan kemasyarakatan. Secara keseluruhan tanpa melihat variabel profesi dan persentase, perilaku setara gender dapat ditemukan di hampir semua bidang relasi gender, baik dalam konteks kehidupan keluarga ataupun publik. Pada masyarakat profesi telah terdapat perubahan perilaku dalam berbagai masalah yang direpresentasikan pada 13 indikator pada penelitian ini.

Akan tetapi, kesimpulan di atas tersebut secepatnya harus diikuti dengan pernyataan berdasarkan data lainnya, yaitu bahwa perubahan perilaku sensitif gender tersebut dapat dikatakan masih minor atau belum mendominasi. Dengan memakai ukuran persentase dan dari tinjauan kecenderungan dan mayoritas, data menginformasikan bahwa di semua indikator terjadi ketersebaran perilaku 'non sensitif' gender yang cukup luas, dan malah dapat dikatakan mendominasi di hampir seluruh bidang. Sebagaimana diketahui, hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dalam berbagai bidang kehidupan antara lain dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis yakni hukum adat. Hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan tersebut pada umumnya menunjukkan hubungan yang sub-ordinasi yang artinya bahwa kedudukan dan kepentingan perempuan masih dinomorduakan dan lebih rendah bila dibandingkan dengan kedudukan dan kepentingan laki-laki. Tentunya ini menyatakan ketidak-efektifan dan tidak maksimalnya hasil sosialisasi program-

program kesetaraan jender tersebut. Hal lainnya, sebagaimana dikemukakan dalam bab uraian data temuan, penelitian ini mengkorfirmasi peran dan pengaruh pemahaman agama terhadap perilaku relasi jender responden.

Temuan di atas pada akhirnya membawa kepada suatu saran bahwa pelaksanaan dan sosialisasi program-program jender oleh pemerintah secara mutlak harus mengikutsertakan kelompok-kelompok pemuka agama yang telah mengalami transformasi wawasan jender. Sementara dari pihak komunitas agamawan dan akademisi ilmu agama, hal yang mendesak untuk dilakukan adalah merumuskan pemikiran dan penafsiran teks-teks keagamaan dengan memakai analisis jender. Setelah itu, dalam waktu dekat dan secepatnya hendaknya pemikiran dan hasil penafsiran ulang tersebut disusun dalam bentuk buku panduan atau modul yang akan menjadi sandaran bagi kalangan pendidik dan juga masyarakat untuk mengaplikasikan perilaku sensitif jender dalam berbagai konteks relasi jender.

program kesehatan jiwa untuk masyarakat. Hal ini sangat penting karena
diperlukan dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan jiwa masyarakat.
melalui berbagai cara dan upaya yang dilakukan.

Salah satu cara untuk meningkatkan kesehatan jiwa masyarakat adalah dengan
memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai kesehatan jiwa.
Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melalui media massa,
media sosial, atau melalui pertemuan langsung dengan masyarakat.
Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai
kesehatan jiwa. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti
melalui kampanye kesehatan jiwa, atau melalui pertemuan langsung dengan
masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan
jiwa, diharapkan masyarakat akan lebih peduli terhadap kesehatan jiwa
masyarakat.

